

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DENGAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL
MODERASI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2019-2023**

TESIS



Disusun oleh:

LILY ASTRIN AGUSTIANA

NIM. 501230003

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Lily Astrin Agustiana**, NIM **501230003**, Program Magister **Program Studi Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya nyatakan dan elaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 25 Februari 2025

Pembuat Pernyataan,



LILY ASTRIN AGUSTIANA

NIM 501230003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam atas proposal yang ditulis oleh Lily Astrin Agustiana, NIM 501230003 dengan judul: *"Pengaruh Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023"*, maka tesis ini sudah dipandang layak dan diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah tesis.

Ponorogo, 25 Februari 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Shinta Maharani, S.E., M. Ak.
NIP. 197905252003122002



Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I
NIP. 197502072009011007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor: 1975/SK/BAN-PT/AK/PT/X/2024

Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277
Fax. (0352) 461893

Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Lily Astrin Agustiana, NIM 501230003, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul: *"Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023"*, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji:

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Muh. Tasrif, M.Ag NIP. 197401081999031001 Ketua Sidang		29/4 '25
2	Dr. Hj. Ely Masykuroh. S.E., M.Si NIP. 197202111999032003 Penguji Utama		28/4 '25
3	Dr. Shinta Maharani, S.E., M.Ak. NIP 1979052522003122002 Penguji 2		29/4 '25
4	Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I NIP 197502072009011007 Sekretaris		29/4 '25



Ponorogo, 21 April 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
NIP 197401081999031001

P O N O R O G O

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: ***“Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023”*** ini yang membahas isu kajian tentang pembangunan ekonomi.

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Amin Ulumutakim dan Ibu Endang Sriningsih atas semangat dan pengertian mereka. Terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing tesis, yaitu Ibu Dr. Shinta Maharani, S.E., M.Ak. dan Bapak Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I. yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama penyusunan tesis sejak awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Ibu Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Direktur Pascasarjana Bapak Prof. Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. dan Wakil Direktur Bapak Nur Kolis, Ph.D, Ketua Program Studi Bapak Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I. beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah Swt., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul penelitian serupa yang meperdalam dan mengembangkan

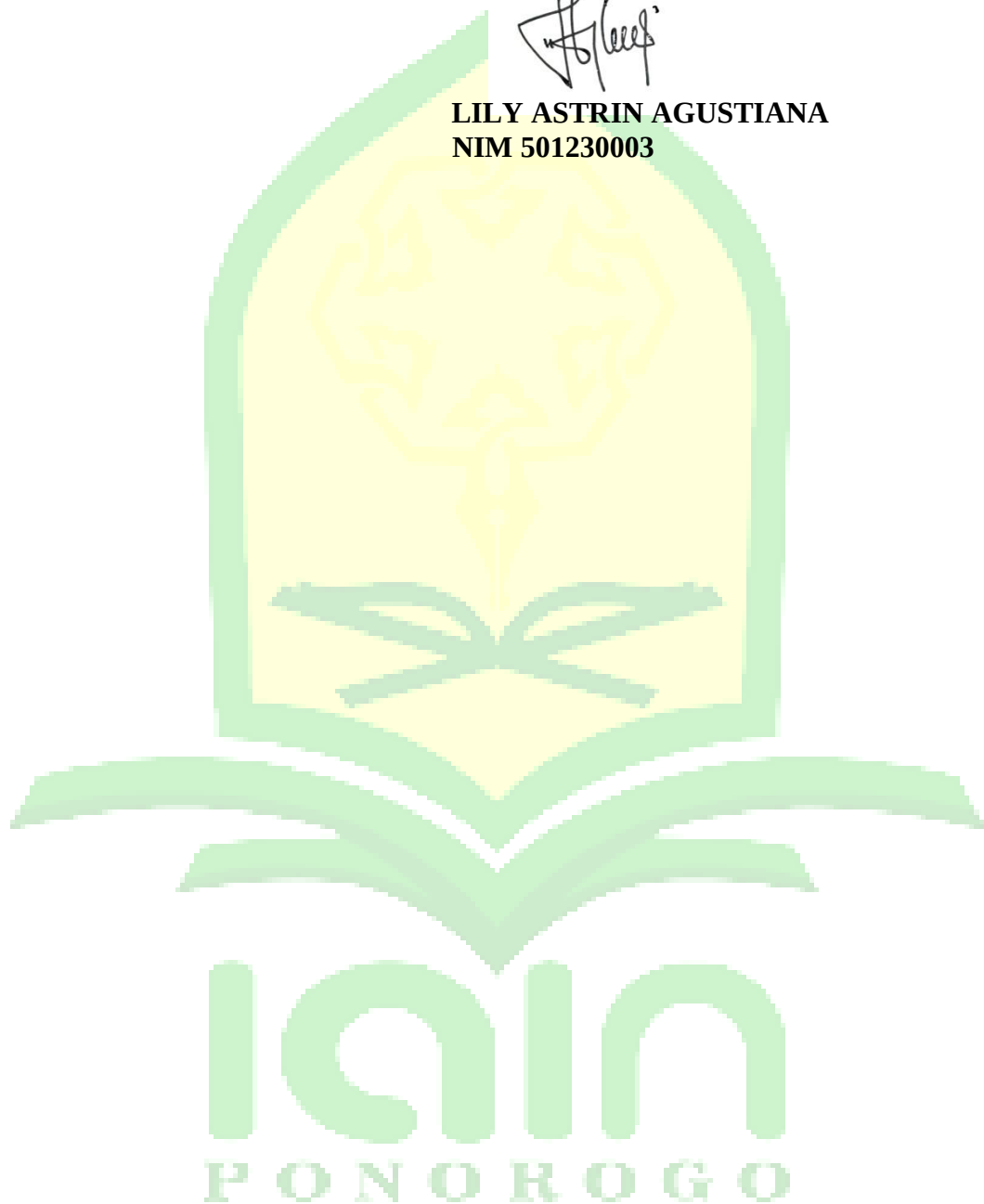
wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, Aamiin.

Ponorogo, 5 Mei2025

Penulis,



LILY ASTRIN AGUSTIANA
NIM 501230003



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lily Astrin Agustiana
NIM : 501230003
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran
Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Indeks
Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di theses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 April 2025

Penulis



Lily Astrin Agustiana
Lily Astrin Agustiana
NIM. 501230003

ABSTRAK

Agustiana, Lily Astrin.2025. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.**Tesis.**Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Ponorogo.Pembimbing 1: Dr. Shinta Maharani, S.E., M.Ak. Pembimbing 2: Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I.

Kata Kunci:Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan IPM.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi berdasarkan lima pembagian Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) Jawa Timur dan ketimpangan pendapatan yang tinggi tersebut terjadi pada tahun 2019 hingga 2023. Dimana tiap Bakorwil dipilih dua Kabupaten/Kota. Bakorwil tersebut meliputi Kabupaten/Kota: Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Bondowoso, Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Ketimpangan pendapatan dapat dikatakan tinggi apabila nilai indeks gini dalam suatu wilayah diatas 0.3-0.5 dikatakan ringan dan rendah apabila nilai indeks gini dibawah 0.3.Nilai rata-rata indeks gini di Bakorwil tersebut antara 0.35-0.42.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan dengan indeks pembangunan manusia sebagai variabel moderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023.

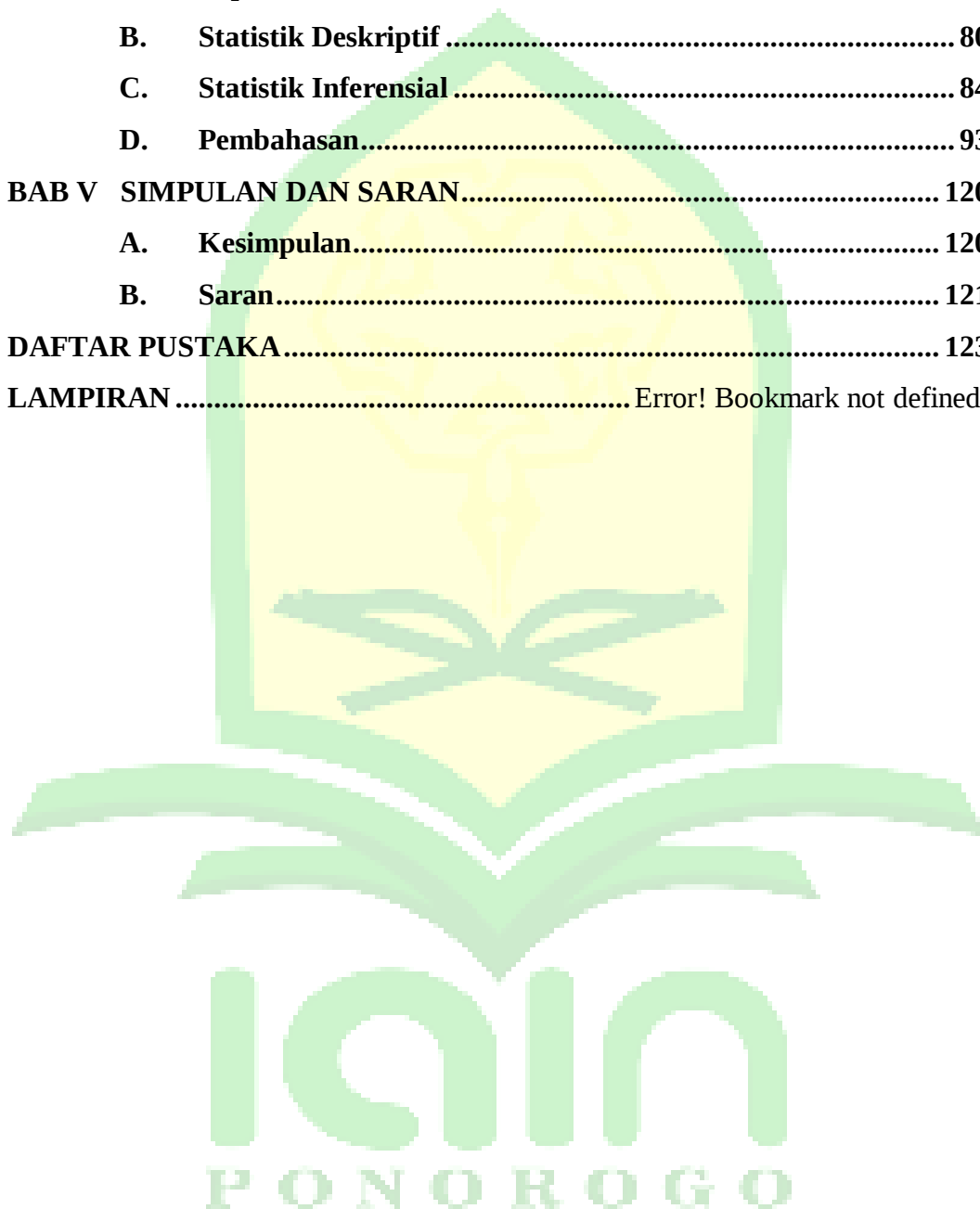
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang terdiri dari tahunan variabel ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode analisis yang digunakan meliputi: analisis regresi data panel, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, uji signifikansi, serta uji moderasi (MRA) dengan menggunakan software Eviews 10.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan:(1)jumlah penduduk berpengaruh, positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; (2) tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh, positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; (3) secara simultan jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berinteraksi dengan jumlah penduduk dan berhubungan signifikan dengan ketimpangan pendapatan; (5)Indek Pembangunan Manusia (IPM) berinteraksi dengan tingkat pengangguran terbuka dan berhubungan signifikan dengan ketimpangan pendapatan; (6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berinterkasi dan berhubungan antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan; (7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi tidak berinteraksi dan tidak berhubungan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota pada Provonsi Jawa Timur periode 2019-2023.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teori	16
B. Kajian Penelitian yang Relevan	36
C. Kerangka Pikir	53
D. Hipotesis Penelitian.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Desain Penelitian	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel Penelitian	58
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	60

E.	Teknik Pengumpulan dan Instrumen Analisis Data.....	62
F.	Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		70
A.	Paparan Data Penelitian	70
B.	Statistik Deskriptif	80
C.	Statistik Inferensial	84
D.	Pembahasan.....	93
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		120
A.	Kesimpulan.....	120
B.	Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....		123
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.



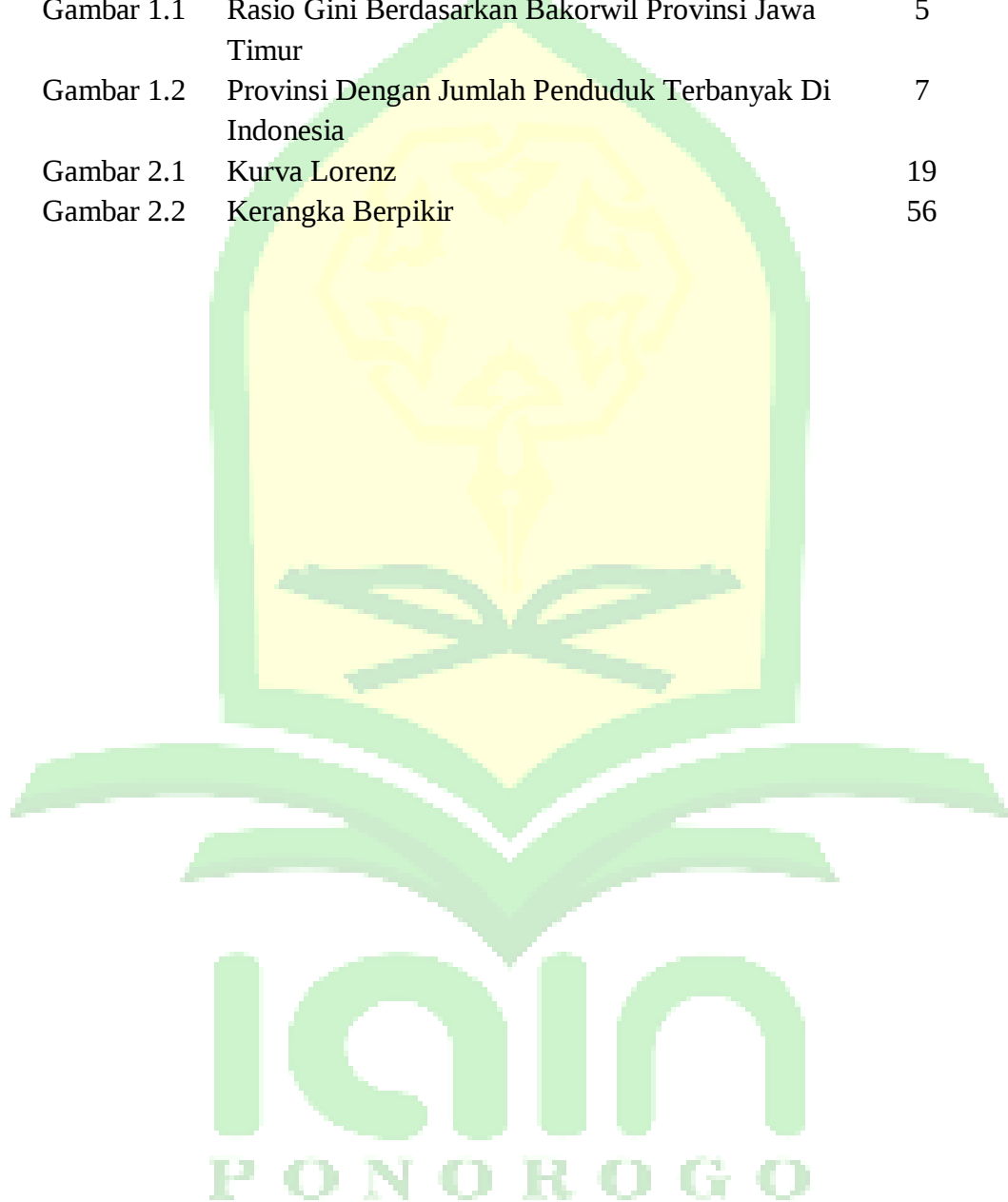
DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Tingkat Pengangguran	10
Tabel 2.1	Penelitian yang Relevan	36
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	60
Tabel 4.1	Ketimpangan Pendapatan berdasarkan Bakorwil Di Provinsi Jawa Timur	71
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Bakorwil Provinsi Jawa Timur	72
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Bakorwil Provinsi Jawa Timur	74
Tabel 4.4	Indeks Pembangunan Manusia di Bakorwil Provinsi Jawa Timur	76
Tabel 4.5	Output Uji Korelasi Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan	77
Tabel 4.6	Output Uji Korelasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin	79
Tabel 4.7	Hasil Statistik Deskriptif	80
Tabel 4.8	Hasil Uji Common Effect Model	82
Tabel 4.9	Hasil Uji Fixed Effect Model	83
Tabel 4.10	Hasil Uji Random Effect Model	83
Tabel 4.10	Hasil Uji Chow	85
Tabel 4.11	Hasil Uji Hausman	86
Tabel 4.12	Hasil Uji LM	86
Tabel 4.13	Hasil Uji Multikolinieritas	88
Tabel 4.14	Hasil Uji Heterokedastisitas	89
Tabel 4.15	Hasil Uji Parsial (Uji T)	89
Tabel 4.16	Hasil Uji Simultan (Uji F)	90
Tabel 4.17	Hasil Uji Determinasi (R^2)	91
Tabel 4.18	Hasil Uji Moderasi (MRA)	92

P O N O R O G O

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.1	10 Provinsi Di Indonesia dengan Ketimpangan Pendapatan yang Tinggi	3
Gambar 1.1	Rasio Gini Berdasarkan Bakorwil Provinsi Jawa Timur	5
Gambar 1.2	Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Di Indonesia	7
Gambar 2.1	Kurva Lorenz	19
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir	56



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	'	سأل	<i>sa'ala</i>
ب	B	بدل	<i>Badala</i>
ت	T	تمر	<i>Tamr</i>
ث	Th	ثورة	<i>Thawrah</i>
ج	J	جمال	<i>Jamâl</i>
ح	H	حديث	<i>Hadîth</i>
خ	Kh	خالد	<i>Khâlid</i>
د	D	ديوان	<i>Dîwân</i>
ذ	Dh	مذهب	<i>Madhhab</i>
ر	R	رحمن	<i>Rahmân</i>
ز	Z	زمزم	<i>Zamzam</i>

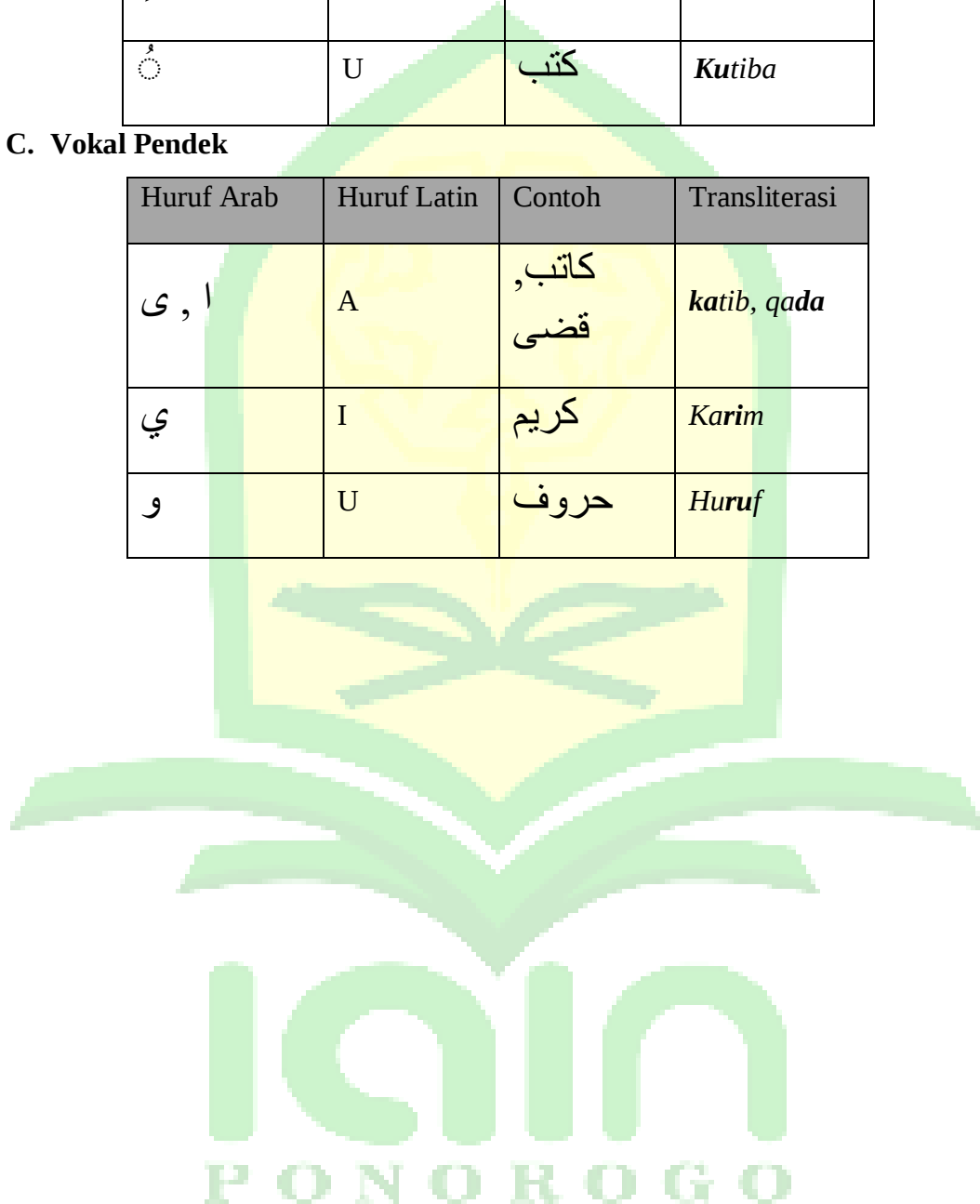
Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
س	S	سلام	<i>Salâm</i>
ش	Sh	شمس	<i>Shams</i>
ص	<u>S</u>	صبر	<i><u>S</u>abr</i>
ض	<u>D</u>	ضمير	<i><u>D</u>amîr</i>
ط	<u>T</u>	طاهر	<i><u>T</u>âhir</i>
ظ	<u>Z</u>	ظهر	<i><u>Z</u>uhr</i>
ع	'	عبد	<i>'abd</i>
غ	Gh	غيب	<i>Ghayb</i>
ف	F	فقه	<i>Fiqh</i>
ق	Q	قاضي	<i>Qâdî</i>
ك	K	كأس	<i>ka's</i>
ل	L	لبن	<i>Laban</i>
م	M	مزمар	<i>Mizmâr</i>
ن	N	نوم	<i>Nawm</i>
هـ	H	هبط	<i>Habata</i>
و	W	وصل	<i>Wasala</i>
ي	Y	يسار	<i>Yasâr</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَ	A	فعل	<i>fa'ala</i>
اِ	I	حسب	<i>Hasiba</i>
اُ	U	كتب	<i>Kutiba</i>

C. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا, ي, اِ	A	كاتب, قضا	<i>katib, qada</i>
ي	I	كريم	<i>Karim</i>
و	U	حروف	<i>Huruf</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia tetap menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, distribusi pendapatan yang tidak merata antarprovinsi masih menjadi permasalahan utama.¹ Selain pertumbuhan ekonomi yang positif, pembangunan daerah juga harus mampu menekan tingkat ketimpangan pendapatan.² Tujuan lain pembangunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana pendapatan di suatu wilayah didistribusikan secara merata dalam kegiatan ekonomi setempat.³ Ketimpangan secara ekonomi ditandai dengan adanya perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin dalam hal distribusi pendapatan, kesejahteraan, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat kepuasan hidup, serta kebahagiaan hidup. Semakin besar pendapatan dalam suatu wilayah akan berdampak pada disparitas pendapatan.⁴ Disparitas antar daerah salah satu masalah dalam pembangunan yang dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.⁵ Ketimpangan yang tinggi di antara daerah juga akan berdampak pada keseimbangan perputaran kegiatan ekonomi yang akan berpengaruh pada kemakmuran antar daerah. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan suatu daerah akan terjebak dalam

¹Harry Aginta, Anang Budi Gunawan, dan Carlos Mendez, "Regional income disparities and convergence clubs in Indonesia: new district-level evidence," *Journal of the Asia Pacific Economy* 28, no. 1 (2023): 6, <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1868107>.

²Muhammad Iqbal Arrahman, Marliyah, dan Budi Dharma, "The Effect of Economic Growth and Interregional Income Disparity on Community Welfare in North Sumatra Province," *JESI : Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 14, no. 1 (2024): 96.

³Sirega, M. F., Nasution, A., Madinah, F., & Zakia, M. U. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Journal Of Management And Creative Business*, 1(1), 53-62.

⁴Rifki Khoirudin dan Jannatul Liutamimma Musta'in, "Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Tirtayasa Ekonomika* 15, no. 1 (2020): 17–30.

⁵Niken Ningtiyas dan Inayati Nuraini Dwiputri, "Analisis disparitas pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019: analisis regresi data panel," *JEBP* 1, no. 7 (2021): 670.

kelompok pendapatan kelas menengah. Indikator ketimpangan pendapatan dapat dikatakan tinggi apabila nilai indeks gini dalam suatu wilayah diatas 0.3-0.5 dikatakan ringan dan rendah apabila nilai indeks gini dibawah 0.3. Namun, pembangunan tidak hanya berfokus pada perhitungan dan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan harus lebih bertumpu pada pembangunan kapasitas manusia.⁶

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia, diberi nama Jawa Timur karena berada di bagian paling timur Pulau Jawa. Provinsi yang terdiri dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.⁷ Sejak kemerdekaannya, Jawa Timur telah menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia tepatnya setelah delapan provinsi Indonesia dibentuk pada 19 Agustus 1945. Secara astronomis, Jawa Timur berada di ujung timur Pulau Jawa dan berbatasan dengan Samudera Hindia di ujung selatan.⁸ Berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara dan Pulau Bali di sebelah timur. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah barat. Secara umum, provinsi Jawa Timur terdiri dari dua wilayah: daratan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Jika kedua wilayah ini dihitung dan digabungkan, kita akan memiliki luas yang jelas. Provinsi Jawa Timur memiliki luas 46.428,57 km², dengan bagian darat dan laut. Provinsi Jawa Timur memiliki luas 46.428 km²⁹ dan terdiri dari 38 kabupaten dan kota, terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Berikut adalah nama-nama semua kabupaten dan kota di Jawa Timur. Semua kabupaten di Jawa Timur termasuk Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Lihat kota-kota berikut: Batu, Blitar, Kediri, Malang, Madiun, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, dan Surabaya.

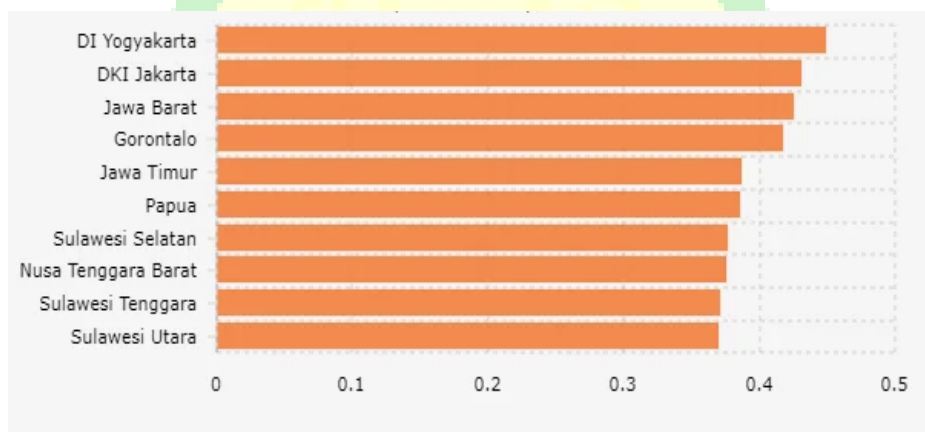
⁶Aqil Muhammad, Salsabila Hana, dan Raehanun Aisyah Fitri, "Kesenjangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Menggali Keterkaitan dan Solusi Kebijakan. , 4(1)," *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 4, no. 1 (2024): 13–28.

⁷Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Jilid II: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta:Lkis, 2008).

⁸"Statistik Balai KSDA Jawa Timur I," 2008.

⁹"Statistik Balai KSDA Jawa Timur I," 1–2.

Berbicara mengenai ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah dengan Kabupaten atau Kota terbanyak di Indonesia tidak terlepas dari masalah ketimpangan wilayah disebutkan bahwa sebagian besar daerah pada provinsi ini yang tergolong dalam kategori daerah yang relative tertinggal, dengan jumlah daerah sebanyak 29 kabupaten dan 9 kota. Hal ini menjadi ironi karena Jawa Timur merupakan kutub aglomerasi poros timur Pulau Jawa yang menjadi salah satu pusat kegiatan nasional.¹⁰ Adapun grafik indeks gini di Indonesia menurut skala nasional menurut 10 provinsi ketimpangan pendapatan yang tergolong tinggi, sebagai berikut.



Gambar 1.1 10 Provinsi Di Indonesia Dengan Ketimpangan Pendapatan yang Tinggi

Sumber: BPS Indonesia, 2025

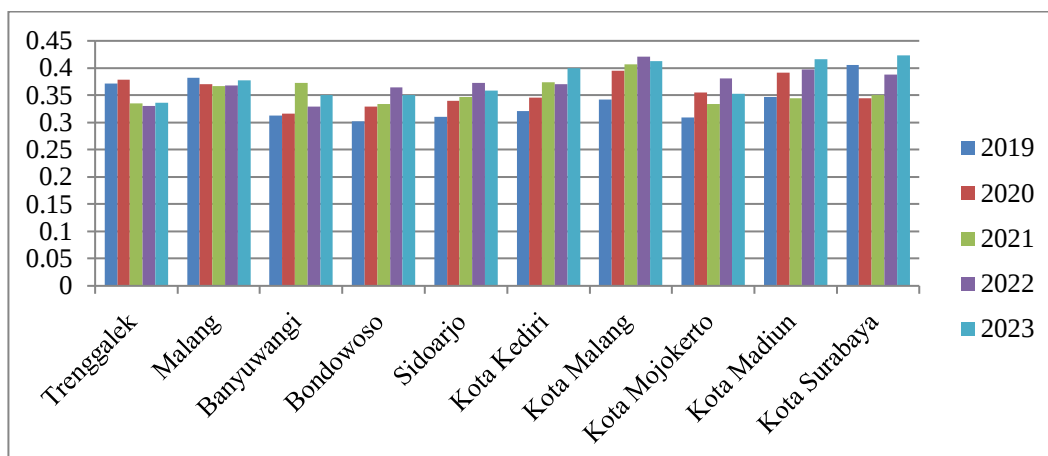
Berdasarkan data grafik diatas untuk ketimpangan pendapatan yang tinggi terjadi di Provinsi D.I Yogyakarta. Sedangkan Provinsi Jawa Timur masuk termasuk dalam bagian 10 peringkat dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Dan Provinsi Jawa Timur sendiri menduduki peringkat ke-5 dari 10 provinsi di Indonesia dengan begitu mencerminkan distribusi kekayaan yang tidak merata diantara penduduknya. Meskipun pertumbuhan ekonomi stabil, manfaat dari pertumbuhan tersebut tampaknya belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsentrasi ekonomi di wilayah perkotaan seperti Surabaya dan sekitarnya menciptakan kesenjangan yang signifikan dibandingkan daerah

¹⁰Muhammad Arif, "Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya," *URECOL*, 2017, 323–28.

pedesaan. Jika ketimpangan pendapatan ini terus meningkat dapat memunculkan dampak buruk yakni menghambat pertumbuhan ekonomi regional dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Gbohoui, Lam, dan Liedo, menunjukkan bahwa disparitas pendapatan regional yang secara signifikan dapat menurunkan insentif migrasi antar wilayah, terutama bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah, sehingga memperkuat ketinggalan wilayah tertentu dan menghambat konvergensi ekonomi sosial.¹¹

Dalam rencana dan tujuan pembangunan wilayah fokus pada pemerataan pendapatan yang merupakan aspek yang paling penting untuk ditindaklanjuti. Untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah, dapat dipertimbangkan pengujian dengan menggunakan PDRB perkapita sebagai indikatornya. Perbedaan tinggi rendahnya PDB dalam setiap daerah bisa menimbulkan pelebaran ketimpangan pendapatan antar wilayah, dimana semakin tinggi nilai PDRB daerah dipastikan tingkat kesejahteraan suatu daerah juga relative tinggi ataupun sebaliknya. Menurut Kusuma, PDRB dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan dikarenakan terdapat perbedaan yang menonjol mengenai sektor pergerakan perekonomian setiap wilayah. Namun demikian, kondisi perekonomian setiap wilayah tidak seluruhnya berdampak pada ketimpangan pendapatan. Menurut Sjafrizal, perbedaan karakteristik akibat perbedaan sumber daya alam serta letak geografis setiap wilayah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap munculnya pola pembangunan di Provinsi Jawa Timur, yang kemudian mengakibatkan pola pembangunan ekonomi tidak merata dan menimbulkan kapasitas pertumbuhan berbeda-beda dalam setiap wilayah. Kapasitas pertumbuhan yang berbeda-beda dalam setiap wilayah ini yang menimbulkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

¹¹William Gbohoui, Waikeli R. Lam, dan Victor Duarte Liedo, "The Great Divide: Regional Inequality and Fiscal Policy," *IMF e-Library* 2, no. 1 (2019): 45.



Gambar 1.2 Rasio Gini Berdasarkan Bakorwil Di Provinsi Jawa Timur

Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

Berdasarkan lima pembagian Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) Jawa Timur,¹² penelitian ini menggunakan 10 Kabupaten/Kota sebagai obyek analisis. Daerah-daerah tersebut dipilih berdasarkan rata-rata rasio gini tertinggi di tiap Bakorwil pada tahun 2019 hingga 2023, dimana tiap Bakorwil dipilih dua Kabupaten/Kota. Bakorwil I yakni Kabupaten Trenggalek dengan rasio gini tertinggi dari tahun 2019 dan 2020 yaitu 0,38 dan Kota Madiun dengan rasio Gini tertinggi tahun 2023 mencapai 0,42. Bakorwil II terdapat Kota Kediri dimana pada tahun 2023 mencapai rasio gini 0,4 dan Kota Mojokerto dengan rasio gini tahun 2022 sebesar 0,38. Bakorwil III terdapat Kabupaten Malang mulai dimana pada tahun 2021 dan 2022 rasio gini mencapai 0,4 dan Kota Malang mulai tahun 2020 hingga 2023 mencapai rasio gini lebih 0,4. Bakorwil IV terdapat Kabupaten Sidoarjo rasio gini tahun 2022 mencapai 0,37 dan Kota Surabaya pada tahun 2022 mencapai rasio gini senilai 0,38 tetapi pada tahun 2019 Kota Surabaya mencapai rasio gini 0,4 dan pada tahun 2023 mencapai 0,42. Bakorwil V terdapat Kabupaten Banyuwangi dimana rasio gini 2023 mencapai 0,35 dan Kabupaten Bondowoso dengan rasio gini 2023 mencapai 0,35. Dari penjabaran ini menjelaskan bahwa besaran rasio gini di Kabupaten/Kota di Jawa Timur menandakan kurangnya distribusi pendapatan yang merata.

¹² "Bakorwil Bojonegoro," t.t., <https://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id/wilayah-kerja-bakorwil-di-provinsi-jawa-timur>.

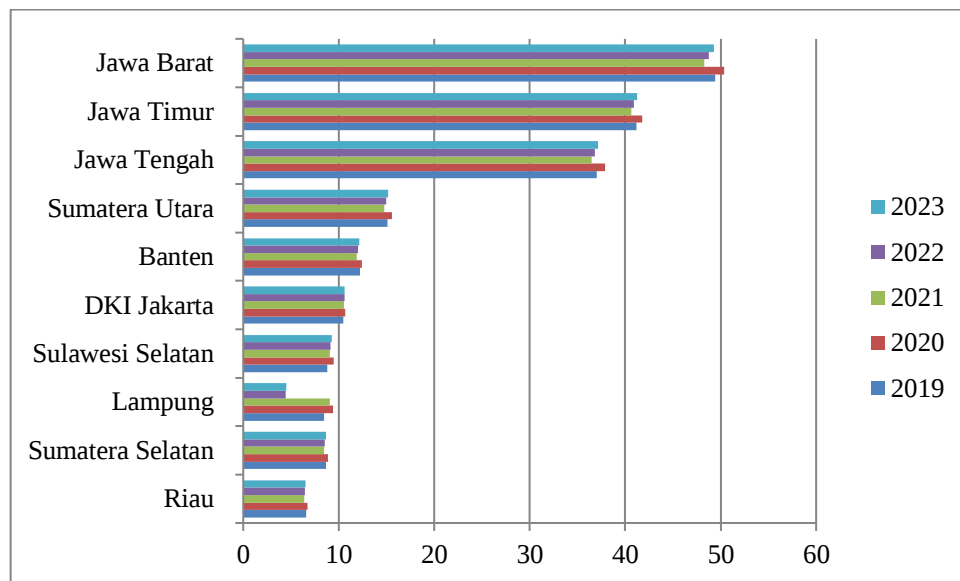
Permasalahan ketimpangan pendapatan ini terjadi akibat adanya distribusi pendapatan diantara berbagai rumah tangga yang tidak merata pada suatu wilayah distribusi pendapatan yang terdapat pada golongan masyarakat ini diukur dan dihitung dengan koefisien gini atau gini ratio. Menurut Kuncoro, ketimpangan terjadi sebab sumber daya alam serta faktor produksi di setiap wilayah berbeda sehingga tingkat pembangunan di setiap wilayah juga berbeda, hal tersebut menciptakan gap atau jurang kesejahteraan di setiap wilayah.¹³ Aspek penting dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat yakni melalui distribusi pendapatan di suatu wilayah. Menurut Kuznets menyatakan bahwa diawal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan meningkat, namun setelah pertumbuhan ekonomi berlangsung lama, maka ketimpangan pendapatan akan menurun karena distribusi pendapatan semakin merata.¹⁴ Menurut Todaro terjadinya ketimpangan pendapatan pada berbagai daerah dikarenakan adanya perbedaan komposisi penduduk, sumber daya yang ada dan karakteristik berbagai daerah. Ketimpangan pendapatan dapat menunjukkan adanya perbedaan pendapatan antara masyarakat dengan daerah maju dan daerah tertinggal.¹⁵ Semakin tingginya ketimpangan pendapatan maka distribusi pendapatan masyarakat semakin tidak merata, kondisi seperti ini akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan di masyarakat dengan ekonomi relatif baik dengan mereka yang berpendapatan rendah¹⁶ Namun pada kenyataan ketimpangan pendapatan belum terselesaikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang artinya bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum menjamin bahwa ketimpangan pendapatan terselesaikan (distribusi pendapatan merata).

¹³ Ingli Intan Hadju dan Vecky A.J Masinambow, "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara" 21, no. 1 (2021): 113.

¹⁴ Yasni dan Yulianto, "Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.," *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 4, no. 1 (2020): 39–63.

¹⁵ Vinsensius Mangundap, Anderson G. Kumenaung, dan Hanly F. Dj. Siwu, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 2 (2024): 25–36.

¹⁶ Agra Julihanza dan Rifki Khoirudin, "Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera," *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 2 (2023): 1–12.



Gambar 1.3 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Di Indonesia

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Jumlah penduduk dan jumlah pengangguran merupakan salah satu indikator dari kondisi demografis suatu daerah yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Jawa Timur menduduki peringkat kedua dari jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Indonesia yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi.¹⁷ Dimana kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tertinggi yaitu sebesar 1.62 dengan nilai kesenjangan pendapatan sebesar 0.34, sedangkan kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu sebesar 0.09 tetapi memiliki nilai ketimpangan pendapatan sebesar 0,32.¹⁸ Walaupun memiliki permasalahan ketimpangan, Provinsi Jawa Timur termasuk provinsi yang berpotensi di sektor-sektor wilayahnya dan memiliki peluang berkembang yang cukup tinggi. Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi juga akan mempengaruhi pelebaran ketimpangan pendapatan. Dengan penambahan populasi dari waktu ke waktu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan populasi di suatu wilayah maka

¹⁷ Arif, "Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya."

¹⁸ Aghni nuzul Firdausy, K., Hanim, A., & Komariyah, S., "Analisis Pengaruh pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekuilibrium, 7(1), 25-31." 7, no. 1 (2023): 25–31.

berhubungan atas tenaga kerja yang semakin bertambah jumlahnya hal ini dapat mengakibatkan output suatu wilayah. Akan tetapi jika tidak ada ketersediaan peluang kerja maka pertumbuhan penduduk berdampak buruk sehingga menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu wilayah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Permasalahan akan muncul apabila jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan pendapatan. Menurut Arsyad, bahwa pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah seperti; struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan pencapaian pembangunan di suatu wilayah adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, daerah, maupun antar daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antar sektor.

Menurut Sjafrizal salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah pengangguran. Ketimpangan pendapatan terjadi ketika distribusi pendapatan di masyarakat tidak merata, sehingga sebagian kelompok memperoleh pendapatan jauh lebih tinggi dari kelompok lainnya. Dalam jangka panjang, jika pengangguran tidak diatasi, maka ketimpangan pendapatan akan semakin melebar.¹⁹ Distribusi pendapatan pada tahap awal pertumbuhan cenderung memburuk tetapi semakin lama ketimpangan pendapatan akan membaik seiring dengan berjalannya proses pertumbuhan ekonomi pada tahap-tahap selanjutnya.²⁰ Hal tersebut disebabkan karena pada proses pertumbuhan terdapat struktur ekonomi yang berubah berupa transisi dari yang awalnya didominasi sektor pertanian kemudian menuju ke sektor industri dan semakin lama berdampak terhadap peningkatan produktivitas tenaga

¹⁹Sjafrizal, "Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 288–89.

²⁰ Devita Fatma Wulandari dan Farida Rahmawati, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Indonesia," *Ekuitas* 3, no. 3 (2022): 583–90.

kerja sehingga bisa mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.²¹ Menurutnya pengangguran adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah.²² Pengangguran menurunkan tingkat pendapatan agregat dan memperburuk situasi ekonomi yang sulit.²³ Untuk memaksimalkan program pengentasan kemiskinan, kondisi pemerataan pendapatan harus diwujudkan. Tingginya pengangguran membuktikan bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah, begitupun sebaliknya, jadi semakin tinggi pengangguran membuat semakin banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pendapatan, karena akan menurunkan tingkat gaji golongan tenaga kerja yang berpendapatan rendah.²⁴ Suatu penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang tergolong rendah, maka proses memproduksi suatu barang akan menurun. Oleh karena itu, para produsen akan mengurangi tingkat penggunaan tenaga kerja. Hal tersebut berhubungan antara jumlah penduduk miskin dan pengangguran yaitu ketika angka jumlah penduduk miskin meningkat maka akan menaikkan tingkat pengangguran.²⁵ Selain itu, juga dapat berakibat pada ketimpangan pendapatan rendah. Pengangguran terbuka terjadi dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga penawaran tenaga kerja tidak sesuai dengan kesempatan kerja. Kenaikan industri pengolahan dan penurunan pada sektor pertanian menunjukkan adanya perubahan struktural ekonomi ditandai dengan perubahan sektor primer ke sektor sekunder.

Masalah ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam upaya mengentaskan ketimpangan tak terkecuali di Provinsi Jawa

²¹Wulandari dan Rahmawati.

²²Viky Mouren dan dkk, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Toraja Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22, no. 5 (2022): 133–44.

²³Willy Hutabarat, Sofyan Syahnur, dan Taufiq C Dawood, "How Population, Economic, Inequality and Unemployment Contribute Affect Indonesian Poverty," *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (2023): 3.

²⁴Aufa Oksamulya dan Ali Anis, "Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia," *JKEP* 2, no. 2 (2020): 19–24.

²⁵Alma Ikhtiar Zusen dan Eni Setyowati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Eks Karasidenan Pati Periode 2017-2020," *Pareto: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (Juni 2022): 2.

Timur. Persoalan pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan struktur umur usia kerja pendidikan, serta distribusi pekerjaan berdasar lapangan kerja. Jika dilihat dari ketersediaan tenaga kerja yang masih bervariasi menyebabkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat. Faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesempatan dalam upaya mempermudah mendapatkan pekerjaan dikarenakan daya saing yang tinggi. Provinsi Jawa Timur ada 5 daerah yang tergolong cukup tinggi dengan permasalahan tingkat pengangguran terbuka diantaranya Sidoarjo, Kota Batu, Bangkalan, Gresik, dan Malang. Walaupun provinsi Jawa Timur dalam Tingkat pengangguran dibawah rata-rata tingkat pengangguran nasional tetapi ada beberapa wilayah di provinsi Jawa Timur masih tinggi tingkat pengangguran.

Tabel 1.1
Perbandingan Tingkat Pengangguran

Tahun	Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Timur (%)	Tingkat Pengangguran Nasional (%)
2020	5,84	6,49
2021	5,74	4,61
2022	5,49	5,86
2023	4,88	5,32

Sumber BPS Jawa Timur, 2023

Menurut Becker, dalam teori *human capital* juga menjelaskan bahwa IPM yang tinggi, dalam hal ini aspek pendidikan tinggi mempengaruhi tingkat pengangguran karena akan mudah dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan, sementara tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah akan kesulitan mencari atau mendapatkan pekerjaan, akibatnya ketimpangan pendapatan akan semakin dalam.²⁶ Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur mencapai 70,27% dimana tahun sebelumnya mencapai 69,74% atau meningkat sebesar 0.53%. Dalam data BPS terlihat bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur masih tergolong yang terendah dibandingkan dengan provinsi

²⁶Salman Alfarsi Abdillah Qurais, "Analisis Pengaruh Human Capital Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2017–2021.," *Journal of Development Economic and Social Studies* 2, no. 2 (2023): 61–70.

lain di Pulau Jawa. Nilai terting Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa terdapat di DKI Jakarta sebesar 83,55 sedangkan Provinsi Jawa Timur hanya mendapat nilai terendah yaitu 73,38. Perbedaan besar yang terjadi antara dua provinsi tersebut mengindikasikan bahwa terjadi ketimpangan dalam pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi variabel moderasi karena data statistik BPS menampilkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, belum pada tingkatan yang maksimal dibanding dengan wilayah lain yang berdekatan dengan Provinsi Jawa timur. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat penting dalam mengevaluasi kemampuan social dan ekonomi dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia mencakup 3 indikator utama diantaranya; aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, sehingga dapat membantu memahami bagaimana ketimpangan pendapatan berdampak pada kesejahteraan. Dengan jumlah penduduk yang besar bisa meningkatkan ketimpangan pendapatan jika tidak diimbangi dengan adanya pembangunan yang merata. Dan Indeks Pembangunan Manusia bisa menunjukkan seberapa efektif suatu wilayah dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup. Hubungan antara IPM dan ketimpangan pendapatan adalah negatif, artinya IPM memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dimana tingginya IPM dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.²⁷ Hal ini didukung dengan teori human capital yang menjelaskan bahwa tingkat IPM berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi sehingga akan menambah atau mengurangi ketimpangan pendapatan, karena IPM bisa bertindak untuk meningkatkan produktivitas hasil ekonomi. Teori *human capital* juga menjelaskan bahwa melalui IPM dalam aspek pendidikan yang ditunjukkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang meningkat, akan membuat kualitas sumber daya manusia meningkat, sehingga produktivitasnya dalam bekerja akan

²⁷ Annisa Febriyani dan Ali Anis, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 3, no. 4 (2021): 9–16.

maksimal.²⁸ Namun, bila tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah akan kesulitan mencari atau mendapatkan pekerjaan dan pengangguran terus meningkat, akibatnya ketimpangan pendapatan akan semakin dalam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan lima pembagian Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) Jawa Timur. Daerah-daerah tersebut dipilih berdasarkan rata-rata rasio gini atau ketimpangan pendapatan tertinggi di tiap Bakorwil. Ketimpangan pendapatan ini terjadi akibat adanya distribusi pendapatan diantara berbagai rumah tangga yang tidak merata pada suatu wilayah. Hal tersebut dapat menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di setiap wilayah khususnya dalam wilayah Bakorwil di Jawa Timur.
- 2) Jumlah penduduk dan jumlah pengangguran merupakan salah satu indikator dari kondisi demografis suatu daerah yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Jawa Timur menduduki peringkat kedua dari jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Indonesia yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Dan permasalahan tersebut akan muncul apabila jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan pendapatan. Selain itu, tingginya pengangguran membuktikan bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah, begitupun sebaliknya. Jadi semakin tinggi pengangguran membuat semakin banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pendapatan, karena akan menurunkan tingkat gaji golongan tenaga kerja yang berpendapatan rendah.
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi variabel moderasi karena data statistik BPS menampilkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, belum pada tingkatan yang maksimal dibanding dengan wilayah lain yang berdekatan dengan Provinsi Jawa timur. Selain itu, Indeks

²⁸Gita Triya Ratnasari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Karesidenan Besuk," *Jurnal Ekuilibrium* 3, no. 2 (2020): 1–14.

Pembangunan Manusia merupakan alat penting dalam mengevaluasi kemampuan sosial dan ekonomi dalam suatu wilayah.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada ***“Pengaruh Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”***.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023?
2. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023?
3. Apakah jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023?
4. Apakah jumlah penduduk dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023?
5. Apakah tingkat pengangguran terbuka dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023?
6. Apakah jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka dengan indeks pembangunan manusia sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023?
7. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh dari jumlah penduduk dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh dari tingkat pengangguran terbuka dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023.
7. Menguji dan menganalisis indeks pembangunan manusia sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi guna memperkaya konsep dan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat menjadi sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan selama ini di Provinsi Jawa Timur, juga sebagai bahan masukan penetapan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur di tahun-tahun mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Ketimpangan Pendapatan

Teori dan Konsep Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan ialah suatu konsep tentang penyebaran pendapatan antara satu golongan dengan lainnya, atau antar rumah tangga dalam masyarakat. Menurut Kuncoro, ketimpangan terjadi sebab sumber daya alam serta faktor produksi di setiap wilayah berbeda sehingga tingkat pembangunan di setiap wilayah juga berbeda, hal tersebut menciptakan gap atau jurang kesejahteraan di setiap wilayah.²⁹ Menurut Baldwin ketimpangan pendapatan ialah perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, karena hal tersebut tercermin dari adanya perbedaan pendapatan.³⁰ Semakin besar jurang pendapatan akan menyebabkan disparitas antar daerah. Todaro dan Smith mengatakan bahwa dua dimensi distribusi pendapatan yakni *size distribution of income* (distribusi ukuran pendapatan) dan *functional or factor share distribution of income* (distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi) adalah dua dimensi distribusi pendapatan utama yang digunakan para ekonom untuk tujuan analisis.³¹

Size distribution of income menghitung langsung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap orang atau rumah tangga.³² Berdasarkan ukuran ini, tidak menjadikan sebuah masalah, ukuran ini lebih memfokuskan seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh individu. Selain itu lokasi sumber pendapatan (desa dan kota) maupun bidang kegiatan yang menjadi sumber pendapatan seperti pertanian, manufaktur, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan. Sedangkan

²⁹ Aufa Nadya, "Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia," *Media Ekonomi* 27, no. 1 (2019): 37–52.

³⁰ Yonanda Yudha Pratama dan Crisanty Sutristyaningtyas Titik, "Pengaruh Teknologi Finansial dan Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara ASEAN-6," *E-Journal Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 1 (2024): 26.

³¹ Afdhal Chatra dkk., *Pengantar Ekonomi Pembangunan (Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia (Jambi, 2023).

³² Chatra dkk., 39.

functional or factor share distribution of income lebih memperhatikan pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi diantaranya: tanah, tenaga kerja, dan modal. Teori distribusi pendapatan nasional ini dasarnya mempersoalkan presentase penghasilan tenaga secara menyeluruh, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual,³³ dan membandingkannya dengan presentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba. Guna menghitung ketimpangan pendapatan di antara penduduk, ukuran yang digunakan berdasarkan ukuran-ukuran pembagian besar pendapatan sebab, data pendapatan sulit diperoleh. Selama ini, distribusi pendapatan didekati dengan data pengeluaran. Dalam kasus ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan sebagai proksi pendapatan.

Aspek penting mengukur tingkat pemerataan pendapatan masyarakat, yakni melalui distribusi pendapatan disuatu wilayah atau negara.³⁴ Tolok ukur untuk menggambarkan apakah pendapatan terdistribusi merata atau tidak yang paling umum digunakan adalah indeks gini atau rasio gini.³⁵ Konsep dasar perhitungan rasio gini berasal dari usaha pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh pendapatan. Kurva tersebut disebut Kurva Lorenz ialah sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari satu variabel tertentu (pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili presentase kumulatif dari penduduk termiskin sampai dengan terkaya, yang digambarkan pada sumbu horizontal dan presentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) pada sumbu vertikal.³⁶ Rasio gini merupakan salah satu ukuran untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Apabila rasio gini nilainya

³³Chatra dkk., 59.

³⁴Dhoya Safira Tresna Lestari dan Muhammad Hamdan Ainulyaqin, "Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 291–92.

³⁵Rizki Aprilian Wijaya dkk., "Ketimpangan Pendapatan Dan Pengeluaran Nelayan Di Kabupaten Pulau Morotai," *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 7, no. 2 (2021): 128.

³⁶Meiki Permana, *Degradasi Lingkungan: Pendekatan Kajian Pembangunan yang Berkelanjutan* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021), 30.

mendekati angka 0 (nol) maka ketimpangan termasuk rendah artinya distribusi pendapatan merata dalam suatu wilayah sempurna. Namun rasio gini nilainya mendekati angka 1 (satu) maka ketimpangan menunjukkan tinggi artinya, distribusi pendapatan dalam suatu wilayah sama sekali tidak merata yang disebut dengan ketimpangan. Untuk menjelaskan besarnya ketimpangan digambarkan pada daerah yang diarsir.

Koefisien gini atau gini rasio adalah suatu ukuran yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.³⁷ Adapun rumus umum koefisien gini dapat dilihat sebagai berikut: ³⁸

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

Dimana :

GR : Koefisien gini (Gini Rasio)

P_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran

F_i : ke-i

Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran

F_{i-1} : ke (i-1)

Koefisien gini atau gini ratio adalah perbandingan antar luas bidang A yang diarsir tersebut dengan luas segitiga BCD. Dapat dilihat pada gambar 2.1 dapat dikatakan bila distribusi pendapatan merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal.

³⁷ Suci Frisnoiry dkk., "Problems of Income Disparity Based on the Gini Ratio in the Indonesian Economy," *Fintech: Indonesian Journal of Banking And Financial Technology* 2, no. 2 (2024): 129.

³⁸ Dedy Harianto Hutasoit dkk., "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2022," *Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 4.



Gambar 2.1 Diagram Lorenz

Menurut Todaro dan Smith, koefisien gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan yang memenuhi empat kriteria, yakni:³⁹

1. Prinsip anonimitas, yang mana ukuran ketimpangan seharusnya tidak bergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa ukuran tersebut tidak bergantung pada apa yang diyakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya maupun orang miskin
2. Prinsip indenpendensi skala, yang mana ukuran ketimpangan seharusnya tidak bergantung pada ukuran perekonomian suatu negara serta tidak tergantung dengan cara mengukur pendapatannya. Dapat diartikan bahwa ukuran ketimpangan tersebut tidak bergantung pada pengukuran pendapatan dalam dollar atau sen, rupee atau rupiah, atau apakah perekonomian tersebut secara rata-rata kaya atau miskin
3. Prinsip independensi populasi, yang mana menghitung ketimpangan tidak seharusnya didasarkan pada jumlah penerima pendapatan (jumlah penduduk). Misalnya perekonomian di China tidak boleh dikatakan lebih merata atau lebih timpang dari perekonomian Vietnam hanya karena penduduk di China lebih banyak disbanding dengan penduduk di Vietnam.
4. Prinsip transfer, yang mana prinsip ini sering disebut sebagai prinsip Pigou-Dalton. Prinsip ini mengasumsikan seluruh pendapatan yang lain konstan. Jika

³⁹Chatra dkk., *Pengantar Ekonomi Pembangunan (Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0)*, 64.

jumlah pendapatan yang ditransfer dari orang kaya ke orang miskin meningkat, itu akan menghasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.

Adapun cara lain yang dapat diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, yakni:⁴⁰

- a. 40% penduduk dengan pendapatan rendah, kelompok ini mencerminkan bagian populasi dengan akses paling terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan sering kali berada dibawah garis kemiskinan atau rentan terhadap guncangan ekonomi. Bank Dunia sering memfokuskan program pengentasa kemiskinan pada kelompok ini.
- b. 40% penduduk dengan pendapatan menengah, merupakan kelompok yang berada diantara orang kaya dan miskin. Pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun masih memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Stabilitas kelompok ini penting untuk menjaga kohesi sosial dan pertumbuhan ekonominya berkelanjutan.
- c. 20% penduduk dengan pendapatan tinggi, kelompok ini menguasai sebagian besar kekayaan dan pendapatan nasional. Di banyak negara berkembang, kelompok ini sering memperoleh porsi pendapatan yang sangat besar disbanding kelompok lainnya, yang memperoleh ketimpangan pendapatan.⁴¹

Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang tidak merata dan tidak adil berpengaruh yang sangat besar dalam kesenjangan perekonomian.⁴² Islam sangat memperhatikan prinsip keadilan dalam distribusi.⁴³ Adanya perbedaan pendapatan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi tetapi Islam tidak membiarkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan menunjukkan terjadi pemusatan kekayaan di tengah masyarakat yang akan menimbulkan masalah

⁴⁰Tri Widayati dkk., *Perekonomian Indonesia: Perkembangan Ekonomi & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 48.

⁴¹World Bank, *World Development Report 2006: Equity and Development*. (Washington, DC: World Bank, 2006), 112.

⁴²Zul Ikram, Sirajuddin, dan Idris Parakkasi, "Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode 1960-1980," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2024): 526–28.

⁴³Hossein Askari dan Abbas Mirakhor, *Conceptions of Justice from Islam to the Present* (Switzerland: Springer Nature, 2020), 186.

kemiskinan. Menurut Sopal, orang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar bagi pembangunan manusia. Jika kekayaan didistribusikan secara tidak merata dan tidak adil dalam ekonomi Islam, akan ada kesenjangan ekonomi, dengan orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin.⁴⁴ Didalam firman Allah SWT banyak dijelaskan mengenai perintah menginfakkan harta dan memberi makan orang kafir, miskin dan yang tidak mampu. Seperti halnya dalam Al-Qur'an; Q.S Al Hajj ayat 28, Q.S Al-Baqarah ayat 177, 184, 215, Q.S al Insan ayat 8. Dalam ayat telah disebutkan bahwa disetiap harta kekayaan terdapat hak bagi orang miskin. Firman Allah Swt Dalam Q.S Ad-Dzariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian”*⁴⁵ (Q.S Ad-Dzariyat/51;19)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan

Menurut Sjafrizal, ketimpangan pendapatan disebabkan adanya beberapa faktor, diantaranya: sumber daya alam yang berbeda, faktor demografis, mobilitas barang dan jasa yang kurang lancar, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan pengalokasian dan pembangunan.⁴⁶

1) Perbedaan sumber daya alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan

⁴⁴Romi Sopal, Amiruddin, dan Abdul Rahman, “Studi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur,” *Icor: Journal of Regional Economics* 2, no. 2 (2021): 54.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011).

⁴⁶Sjafrizal S, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah.⁴⁷ Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barangbarang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.

2) Perbedaan kondisi demografis

Selain itu, adanya perbedaan yang signifikan dalam kondisi demografis antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan. Kondisi demografis yang dimaksud termasuk perbedaan dalam tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, dan tingkah laku, kebiasaan, dan etos kerja masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, kondisi demografis yang buruk pada suatu wilayah akan menyebabkan produktivitas kerja yang lebih rendah, yang menghambat penanaman modal dan menghambat pertumbuhan ekonomi.⁴⁸

3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Selain itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat meningkat sebagai akibat dari mobilitas barang dan jasa yang tidak lancar. Mobilitas barang dan jasa ini mencakup kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi yang disponsori pemerintah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika mobilitas barang dan jasa lancar, produksi yang berlebihan dari suatu wilayah tidak dapat dijual ke wilayah lain yang membutuhkannya. Demikian pula, migrasi yang tidak lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah tidak dapat digunakan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi karena kelebihan tenaga kerja di suatu daerah tidak dapat digunakan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya, sehingga sulit bagi daerah terbelakang untuk mendorong proses pembangunan.

4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

⁴⁷Vera Paulin Kay, "Kesenjangan Pendapatan Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Periode 2005-2010," *Jurnal Administrasi Terapan* 1, no. 1 (2020): 75.

⁴⁸Puti Andiny, Nursani Adelida, dan Rahma Meutia, "Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur Dan Kota Langsa)," *Jurnal Samudera Ekonomika* 3, no. 1 (2019): 47-56.

Sangat jelas bahwa ketimpangan pembangunan di antara wilayah akan dipengaruhi oleh konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi di daerah tertentu. Daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar memiliki kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa daerah tertentu memiliki sumber daya alam yang lebih banyak. Yang kedua adalah bahwa daerah tersebut memiliki lebih banyak pilihan transportasi, baik darat, laut, atau udara, dan yang ketiga adalah kondisi demografis, atau populasi, yang juga mempengaruhi karena kegiatan ekonomi cenderung terkonsentrasi di daerah dengan ketersediaan sumber daya manusia yang lebih baik.

5) Pengalokasian dan pembangunan

Bagaimana investasi pemerintah didistribusikan ke daerah lebih banyak ditentukan oleh bagaimana sistem pemerintahan daerah berfungsi. Jika sistem pemerintahan daerah bersifat sentralistik, dana pemerintah cenderung lebih banyak diberikan kepada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan daerah bersifat otonomi atau federal, dana pemerintah cenderung lebih banyak diberikan kepada daerah, sehingga ketimpangan pendapatan akan lebih rendah. Alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik adalah beberapa sektor yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Ini adalah salah satu cara lain alokasi dana pemerintah akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah.⁴⁹

Menurut Arsyad ketimpangan pendapatan disebabkan dari faktor pembangunan daerah yang berbeda, potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, letak geografis wilayah dan etnis.⁵⁰ Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antara lain sebagai berikut: kurangnya homogenitas angkatan kerja karena perbedaan pendidikan dan bakat antar individu dalam

⁴⁹Andiny, Adelida, dan Meutia, 52.

⁵⁰Frederic Winston Nalle dkk., "Regional development disparity and mapping of economic potential in East Nusa Tenggara province," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 673.

masyarakat, distribusi sumber daya yang tidak merata, perbedaan pembangunan antar wilayah, perubahan teknologi, inflasi, globalisasi, kondisi lapangan kerja, dan pengangguran.⁵¹

2. Jumlah Penduduk

Teori Dan Konsep Jumlah Penduduk

Secara umum, jumlah penduduk adalah total semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu Negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan Negara. Menurut Mulyadi, jumlah penduduk adalah jumlah yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu.⁵² Sedangkan menurut Nurdiman, jumlah penduduk adalah sekumpulan orang yang menetap dan juga berdomisili di dalam suatu Negara.⁵³ Berdasarkan ahli tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa jumlah penduduk ialah jumlah masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah dan menetap untuk mendiami suatu daerah pada suatu wilayah tertentu. Menurut BPS, jumlah penduduk merupakan indikator dan komponen yang penting dalam kegiatan ekonomi. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.⁵⁴ Menurut Sukirno, penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi.⁵⁵

Menurut Latumaerissa, bahwa masalah jumlah penduduk perlu diketahui dalam pembangunan ekonomi, karena hal ini berhubungan erat dengan

⁵¹Chatra dkk., *Pengantar Ekonomi Pembangunan (Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0)*, 71.

⁵²S Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 15.

⁵³Nurdiman, *Ekonomi Kependudukan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 25.

⁵⁴Suaidah dkk., "Analisis Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7, no. 1 (2023): 2, <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v7i1.7505>.

⁵⁵Sela Paula Sianipar dan dkk, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah* 22, no. 1 (2022): 28.

pemediaan tenaga kerja, perencanaan pembangunan dan pertahanan.⁵⁶ Setiap Negara ingin mengetahui jumlah penduduknya didasarkan kepada tiga alasan, yakni alasan politik dan keamanan, alasan sosial, dan alasan ekonomis. Kelebihan penduduk biasanya tidak berarti banyak orang untuk suatu daerah; sebaliknya, itu berarti kelebihan dalam hal kebutuhan dan fasilitas kehidupan. Jumlah penduduk yang terlalu padat akan menyebabkan berbagai masalah, seperti pemukiman, keamanan, kesehatan, pengangguran, dan pangan.⁵⁷ Selain itu, penduduk yang terlalu padat tidak akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang, yang menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan.⁵⁸ Pertumbuhan penduduk hubungannya dengan peningkatan jumlah angkatan kerja dianggap sebagai faktor yang membantu pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan jumlah penduduk berarti peningkatan pasokan tenaga kerja dan peningkatan potensi pasar domestik.⁵⁹ Menurut Adioetomo, teori konfusius membahas hubungan antar jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya jumlah penduduk yang terlampaui besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama kalau jumlah penduduk dikaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk.⁶⁰ Konfusius menganggap ada suatu proporsi yang ideal antara luas tanah dan jumlah penduduk. Sebagai pemecahan masalah kelebihan penduduk, ia menganjurkan agar pemerintah memindahkan penduduk ke daerah yang masih kurang penduduknya.

Dalam perspektif Islam, lebih penting untuk memiliki keturunan yang berkualitas daripada kuantitas (jumlah) banyak. Dalam satu riwayat, Nabi mengatakan bahwa dia bangga dengan banyak orang (ana mukasirun bikum al-

⁵⁶ Zulaika Matondang, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru," *Ihtiyath* 2, no. 2 (2018): 225–70.

⁵⁷ Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2022), 19.

⁵⁸ Chrisnatalya Sembiring dan Vecky A.J Masinambow, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Berkala Ilmiah* 23, no. 2 (2023): 7.

⁵⁹ Darwin Lie dkk., *Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), 28.

⁶⁰ Moh Renaldy Utina, Yetty, dan Muhammad Zais M Samiun, "Pengaruh Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Maluku Utara," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14, no. 1 (2023): 8.

anbiya). Hadis ini harus tetap dibaca dengan kualitas. Memiliki banyak uang tetapi kualitas rendah melemahkan dan merendahkan. Saat ini, kita melihat bahwa banyaknya orang Islam di negeri ini tidak membuat kita bangga sebagai orang Islam.⁶¹ Banyak tidak membantu membangun peradaban yang damai dan sejahtera. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ رِيَّةً ۖ ذُرِّيَّتَهُمْ عَلَيْهِمْ خَافُوا ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".⁶²

Pekerjaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah konsekuensi logis dari posisinya sebagai khalifah. Manusia dilengkapi dengan "aql, qalb, hawa, dan nabs", yang memberinya kemampuan untuk memaksimalkan potensinya. Selain itu, Allah mengajarkan kepada manusia "Al-Asma", atau tanda-tanda, yang memberinya pengetahuan tentang apa yang dapat digunakan untuk mendukung peran kekhalifahannya. Di atas segalanya, manusia juga diberikan kebebasan untuk mengelola bumi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebebasan ini juga memungkinkan manusia untuk memilih khalifah, yang memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, termasuk kepemilikan berganda, kebebasan untuk bertindak, dan keadilan sosial. Orang yang memiliki kemampuan berpikir memiliki kemampuan untuk membuat peradaban yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Tidak sama dengan jenis benda alam lainnya, seperti gunung, bukit, dan bahkan Bumi ini. Mereka lebih besar secara fisik, tetapi mereka tidak memiliki kebebasan. Karena itu, mereka tidak dapat berfungsi sebagai khalifah di alam. Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ۖ وَالْإِنْسَانُ أَوْحَمَهَا إِنَّهُ

⁶¹Eka Susiatun, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016," *Jurnal Untirta* 1, no. 1 (2018): 36.

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011).

كَانَ أَظْلَمًا جَهْلًا

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh*”.⁶³

Menurut perspektif kependudukan, khalifah harus memiliki kemampuan untuk mengatur bumi agar menjadi tempat yang aman untuk tinggal bagi semua makhluknya. Selain itu, manusia harus menatanya, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan sumber daya alam yang tersedia. Menurut teori Malthus dalam Deliarinov, pertumbuhan populasi manusia jauh lebih cepat daripada produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara pertumbuhan manusia hanya diikuti oleh deret ukur, pertumbuhan produksi makanan hanya diikuti oleh deret hitung. Kemiskinan akan meningkat karena pertumbuhan jumlah manusia lebih cepat daripada pertumbuhan produksi hasil pertanian.⁶⁴

Faktor-Faktor Jumlah Penduduk

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu fertisasi (kelahiran), Moralitas (kematian), dan Migrasi.⁶⁵

- a) Fertilisasi atau kelahiran, Menurut Hatmadji sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilisasi ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup.⁶⁶ Sebagai salah satu factor pertumbuhan penduduk yang dapat menyebabkan ketimpangan ketika jumlah kelahiran tinggi tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang cukup, seperti; pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang memadai. Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan dampak ekonomi. Dengan

⁶³Departemen Agama RI.

⁶⁴ Susiatun, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016,” 38.

⁶⁵ Stein Emil Vollset, “Fertility, Morality, Migration, and Population Scenarios for 195 Countries and Territories from 2017 to 2100: a Forecasting Analysis for The Global Burden of Disease Study,” *National Library of Medicine*, 2020, 10.

⁶⁶ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan Edisi Revisi*, 19.

pertumbuhan penduduk yang cepat seringkali diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Namun, jika infrastruktur dan industri tidak berkembang sebanding, pekerjaan rendah-upah cenderung meningkat, yang dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dan jika pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan penciptaan lapangan yang memadai maka akan terjadi peningkatan pengangguran. Inilah yang menyebabkan persaingan yang lebih ketat untuk pekerjaan, dan dapat meningkatkan ketimpangan antara kelompok yang memiliki akses ke pekerjaan yang baik dan yang tidak.

- b) Moralitas atau kematian, merupakan salah satu diantara tiga komponen demografis yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. merujuk pada jumlah kematian dalam sebuah populasi. Semakin meningkat jumlah kematian, maka laju pertumbuhan penduduk akan semakin rendah. Walaupun mortalitas sendiri tidak secara langsung menyebabkan ketimpangan, namun efeknya dapat membantu mengontrol laju pertumbuhan populasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial.
- c) Migrasi, adalah perpindah penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu daerah ke daerah lain yang melampaui batas administrasi, politik/Negara yang seiring juga diartikan perpindahan yang relative permanendari suatu daerah ke daerah lain. Migrasi sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan ekonomi, pendidikan, dan sosial di antara daerah-daerah. Orang-orang sering migrasi karena ingin meninggalkan zona kemiskinan dan mencari lapangan kerja yang lebih baik.⁶⁷ Namun, ketika migran tiba di daerah baru, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang layak, yang dapat memperlebar kesenjangan antara penduduk lokal dan migran, terutama jika migran tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja lokal.⁶⁸ Pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk dapat membawa konsekuensi positif seperti penambahan tenaga kerja potensial. Namun, jika infrastruktur dan industri tidak berkembang sebanding, maka pekerjaan

⁶⁷Mulyadi, 19.

⁶⁸Plamen Nikolov, Leila Salarpour, dan David Titus, "Skill Downgrading Among Refugees and Economic Immigrant in Germany," *Cornell University* 2 (2021): 9.

rendah-upah akan meningkat, mempertahankan atau bahkan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

3. Pengangguran

Teori dan Konsep Pengangguran

Menurut Mankiw berpendapat bahwa pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling sulit.⁶⁹ Kebanyakan orang beranggapan bahwa kehilangan pekerjaan akan berakibat pada menurunnya standar kehidupan dan tekanan pada psikologis. Tidak mengherankan bahwa pengangguran adalah topik yang sering dibahas dalam perdebatan politik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan mereka akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Menurut Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran.⁷⁰ Salah satu parameter penting untuk mengukur seberapa tinggi atau rendah kesejahteraan masyarakat daerah adalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tetap rendah, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, tingkat pengangguran yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pendapatan karena tingkat gaji tenaga kerja berpendapatan rendah akan menurun, yang mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan.⁷¹

Dalam hal ini pengangguran menggunakan indikator TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), karena dalam ilmu demografis, tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan masuk dalam kategori angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran terbuka merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

⁶⁹N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics Edisi ke-8* (Boston: Cengage Learning, 2018), 145.

⁷⁰Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 328–29.

⁷¹Sukirno, 331.

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Jumlah Angkatan Kerja

Besarnya nilai TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pengangguran terbuka yaitu terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam studi ekonomi Islam, Allah Swt. dan para rasulnya mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka harus bekerja, karena dengan bekerja mereka akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Islam juga mengatakan kepada orang-orang untuk tidak berdiam diri atau enggan bekerja.⁷² Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S At-Taubah ayat 105

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”⁷³

Maksud ayat diatas bahwa orang diminta untuk bekerja secara umum, yaitu untuk kedua kehidupan dunia dan akhirat. Allah Swt akan memberikan balasan yang tepat untuk setiap tindakan ini. Baik akan dibalas dengan kebaikan, dan buruk akan dibalas dengan keburukan. Islam mendorong umatnya untuk menghasilkan dan mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi dalam segala bentuk, seperti perdagangan, industri, pertanian, dan lainnya. Islam memerintahkan untuk bekerja, tetapi dengan cara yang lebih baik dan profesional. Bekerja bukanlah masalah kecil.

Jenis-Jenis Pengangguran

⁷²Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2011, cet. 10.

Pengangguran dapat dikategorikan menurut faktor penyebab terjadinya dan menurut lama waktu kerjanya.

a. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya:⁷⁴

- 1) Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Perubahan ini membutuhkan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Pengangguran struktural juga terjadi karena penggunaan alat semakin canggih.⁷⁵
- 2) Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan antara pemberi kerja dan pelamar. Kesulitan ini berupa waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. pengangguran ini juga bisa terjadi karena adanya faktor jarak dan kurangnya informasi. Pengangguran friksional terdapat pada perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh.
- 3) Pengangguran konjungtur/pengangguran siklik adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan ekonomi suatu negara. Pada masa resesi, tingkat pengangguran ini akan semakin meningkat yang disebabkan oleh 2 faktor yakni; jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat dan dibutuhkan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan.
- 4) Pengangguran teknologi pengangguran jenis ini adalah pengangguran yang diakibatkan oleh penggunaan mesin-mesin dan berkembangnya jenis teknologi.⁷⁶ Pengangguran yang dapat disebabkan oleh adanya alih teknologi, seperti pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Contohnya; sudah banyak negara-negara yang menggunakan robot sebagai pengganti tenaga manusia pada berbagai industri berat seperti industri otomotif.⁷⁷

⁷⁴Leo Fernando Simatupang, *Ekonomi Makro* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023), 140.

⁷⁵Honorata Bogusz dan Anna Matysiak, "Structural Labour Market Change, Cognitive Work, and Entry to parenthood in Germany," *A Journal of Demography*, 2024, 5.

⁷⁶Manali Rohan Patil, "The Impact Of Technology On Work And Employment," *ResearchGate* 16, no. 11 (2020): 226–227.

⁷⁷Soetrisno Soetrisno, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 63.

b. Jenis pengangguran berdasarkan waktu lama kerja⁷⁸

1) Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan pekerjaan tidak tersedia. Ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak mau bekerja.

2) Pengangguran tersembunyi/terselubung

Pengangguran tersembunyi terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Hal tersebut disebabkan adanya tidak kesesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Jika hal ini terjadi, pekerjaan akan berlangsung secara tidak optimal.

3) Pengangguran musiman

Pengangguran ini terjadi karena pergantian musim. Ketika musim tertentu, orang yang dalam keadaan tidak berkerja, sehingga ada waktu yang tidak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim yang satu ke musim yang lainnya.

4) Setengah menganggur

Situasi dimana orang bekerja, tetapi tenaganya kurang dimanfaatkan diukur dari jam kerjanya, produktivitas kerjanya, dan penghasilan yang diperoleh. Mereka tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja secara penuh waktu dan jam kerja lebih rendah dari jam kerja normal. Para pekerja tersebut disebut dengan setengah menganggur.⁷⁹

Penyebab pengangguran

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan jumlah pengangguran mengalami peningkatan, diantaranya;

a) Rendahnya pendidikan

Masalah yang utama kerap terjadi dalam penerimaan pegawai yakni rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh sebagian orang. Jika mereka memiliki tingkat

⁷⁸Simatupang, *Ekonomi Makro*, 141.

⁷⁹Soetrisno, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, 65.

pendidikan yang minim, hal tersebut akan mempersulit seseorang dalam mencari pekerjaan⁸⁰.

b) Keterampilan yang dimiliki minim

Saat ini telah banyak orang-orang yang memiliki kriteria yang diinginkan oleh perusahaan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan berguna tanpa adanya keterampilan yang mereka miliki. Sebab perusahaan tidak hanya mencari orang yang memiliki pendidikan yang luas saja, akan tetapi keterampilan yang mereka punya juga perlu dipertimbangkan.⁸¹

c) Lapangan kerja yang minim

Pada setiap tahun mungkin negara kita memiliki sejumlah lulusan dengan angka yang tidak sedikit. Akan tetapi dengan angka yang tidak sedikit ini tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di negara kita.

d) Tidak ada kemauan untuk berwirausaha

Umumnya orang yang baru lulus sekolah/kuliah terpaku dalam mencari pekerjaan, hal tersebut merupakan suatu tujuan yang mutlak. Sehingga persaingan mencari pekerjaan lebih besar juga dibandingkan dengan membuat suatu usaha.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Teori dan Konsep Indeks Pembangunan Manusia

UNDP menjelaskan pembangunan manusia juga sebagai suatu proses untuk mencapai kebutuhan dasar bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, antara lain.⁸² Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran tiga dimensi utama pembangunan manusia yang dapat menciptakan kemampuan dasar penduduk, yaitu kesehatan, umur panjang, pendidikan, dan mencapai standar hidup layak bagi setiap masyarakat.⁸³ Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah ukuran yang mengukur seberapa jauh suatu

⁸⁰Duha Tore Altindag, "The Effect of Education on Unemployment Duration," *University of South Mississippi-Departemen of Political Science and International Development*, 2019, 15.

⁸¹Luz Adriana Florez, "The Impact of Skill Mismatch on Unemployment, Informality, and Labour Turnover," *Cambridge University Press*, 2024, 1–20.

⁸²Juan Telleria, "Defining and Measuring Human Development: A Genealogical Analysis of the UNDP's Human Development Reports," *Springer Link* 35 (2023): 530.

⁸³Simona Sarota Zizek, Mulej Matjaz, dan Nomi Hrads, "Human Development Index," *Springer Link*, 2023, 1303.

negara memiliki harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat penting dan penting dalam pembangunan suatu wilayah karena apabila sumber daya alam (SDA) rendah, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi dapat digunakan untuk membangun dan memajukan wilayah tersebut.⁸⁴ Oleh karena itu, pembangunan manusia harus sangat diperhatikan dan sangat penting. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan indeks pembangunan manusia adalah hasil pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lainnya.⁸⁵ Menurut beberapa penelitian, peningkatan ekonomi akan meningkatkan pendapatan perkapita, yang berarti akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.⁸⁶ Mulai dari kemerdekaannya, Indonesia telah berusaha untuk menghilangkan kemiskinan, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Akibatnya, pembangunan Indonesia menghadapi masalah ini.

Pembangunan sumber daya manusia sangat andil dalam suatu proses jangka panjang dan berbagai faktor sosial ekonomi.⁸⁷ Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memerankan dua kunci dalam bidang pembangunan ekonomi yaitu: sebagai alat untuk mempopulerkan pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang kesejahteraan⁸⁸ serta sebagai alternatif untuk PDB per kapita sebagai cara untuk mengukur tingkat pembangunan untuk perbandingan negara dan waktu. Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan

⁸⁴Jason Hickel, "The sustainable development index: Measuring the ecological efficiency of human development in the anthropocene," *Elsevier* 167 (2020): 2.

⁸⁵Enzo Barberio Mariano dan Diogo Ferraz, "The Human Development Index with Multiple Data Envelopment Analysis Approaches: A Comparative Evaluation Using Social Network Analysis," *Social Indicators Research* 157 (2021): 443–500.

⁸⁶Ambok Pangiuk, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013," *Iltizam: Journal of Sharia Economics Research* 2, no. 2 (2019): 48.

⁸⁷Amiruddin Idris, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 53.

⁸⁸Hariman Dahrif, *Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua Studi Kasus Masyarakat Byak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 4.

pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan.⁸⁹ Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu sebagai berikut:⁹⁰

$$IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3) \dots\dots\dots)$$

Dimana :

X (1) :Indeks harapan hidup

X (2): Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata)

X (3): Indeks standar hidup layak

Menurut Mankiw, modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh karyawan melalui pendidikan. Mengatakan bahwa pembangunan manusia sangat penting untuk menentukan kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi kontemporer dan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang telah mencapai standar hidup yang layak. Jalan yang harus dicapai untuk mencapai sasaran semakin dekat dengan nilai IPM wilayah terhadap angka 100. Angka harapan hidup waktu lahir digunakan untuk mengukur dimensi kesehatan; indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan; dan indikator daya beli mengukur standar hidup.⁹¹

Sumber daya manusia juga merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Bahkan faktor ini disebut kunci dari proses pembangunan itu sendiri.⁹² Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, proses pengorganisasian dalam tujuan mencapai tingkat pembangunan ekonomi dapat terwujud. Negara yang miskin sumber daya alam tapi memiliki sumber daya

⁸⁹ Michael Dickman dan Emma Parry, "Building Sustainable Societies Through Human-Centered Human Resource Management: Emerging Issues and Research Opportunities," *The International Journal of Human Resource Management* 33, no. 1 (2022): 1–15.

⁹⁰ Handika Y Sembiring, Elidawaty Purba, dan Dian G Purba, "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Samosir," *Jurnal Ekuilnome* 6, no. 1 (t.t.): 106–7.

⁹¹ Muhammad Farhan dan Sugianto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa," *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 3 (t.t.): 246.

⁹² Laode Amdan dan Muhammad Rafi'i Sanjani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 5 (2022): 114.

manusia yang baik bisa menjadi negara maju dibandingkan negara yang kaya sumber daya alam tapi memiliki sumber daya manusia yang rendah. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Sumber daya manusia adalah modal yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.⁹³

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
1	Angus S, Deaton and Christina H. Paxson ⁹⁴	<i>The Effects of Economic and Population Growth on National Saving and Inequality</i>	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penggunaan variable pertumbuhan ekonomi dan tabungan nasional pada variable dependen sedangkan dalam penelitian saya tidak menggunakan variabel tersebut.	Dengan menggunakan survey rumah tangga cross-sectional yang dilakukan secara berkala dari Taiwan, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat, kami menunjukkan bahwa kita bisa memaksakan penafsiran siklus hidup pada data konsumsi, pendapatan, dan tabungan. Namun, buktinya tidak demikian, konsistensi dengan dampak tingkat pertumbuhan yang

⁹³Syafruddin dkk., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Batam: Rey Medika Grafika, 2022), 6.

⁹⁴Angus S. Deaton dan Christina H. Paxson, "The Effects of Economic and Population Growth on National Saving and Inequality," *JSTOR* 34, no. 1 (1997): 97–114.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
				besar, dimana pertumbuhan ekonomi dan populasi meningkatkan tingkat tabungan nasional. Kaitan lintas Negara yang sudah terjalin erat antara pertumbuhan ekonomi dan tabungan tidak dapat dikaitkan dengan tabungan dalam siklus hidup dan perubahan dalam pertumbuhan ekonomi atau populas juga tidak akan berdampak besar pada tabungan di masing-masing Negara.⁹⁵ Terdapat bukti yang mendukung prediksi model siklus hidup bahwa ketimpangan konsumsi dalam kelompok dan pendapatan total walaupun belum tentu ketimpangan pendapatan akan meningkat seiring bertambahnya usia kelompok tersebut. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mendistribusikan kembali penduduk ke kelompok yang

⁹⁵Deaton dan Paxson, 97–114.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
				lebih tua, lebih tidak setara, dan dapat meningktka kesenjangan nasional. Kami memberikan perhitungan mengenai besarnya dampak ini.
2	Antonio dan LaPorchia A.Collins ⁹⁶	<i>Differential Effect of decentralization on income</i>	Penelitian ini menguji pengaruh desentralisasi terhadap ketimpangan yang bertempat di Negara Maju dan Negara Berkembang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak marginal suatu dimensi desentralisasi terhadap ketimpangan pendapatan bergnatung pada tingkat desentralisasi pada dimensi lainnya. Temuan-temuan ini menyiratkan bahwa bauran desentralisasi secara keseluruhan penting dalam mengatasi ketimpangan pendapatan, dan tahap pembangunan suatu negara saat ini serta kerangka kelembagaan yang mendasarinya harus dipertimbangkan ketika menentukan bauran desentralisasi, terutama jika pengurangan ketimpangan

⁹⁶ Antonio dan LaPorchia A.Collins, "Differential Effect of decentralization on income inequality: evidence from developed and developing coutries," *Springer Link* 60, no. 4 (2019).

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
				pendapatan merupakan tujuan utama.
3	Jaclyn Butler, Grace A. Wildermut, Brian C. Thiede, David L. Brown ⁹⁷	<i>Population Change and Income Inequality in Rural America</i>	Perbedaan dalam penelitian saya dengan penelitian ini adalah tempat yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan di pedesaan Amerika Serikat, pada periode 1980-2016.	Menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Namun, ini studi sebagian besar dimotivasi oleh teori urbanisasi dan pertumbuhan di wilayah metropolitan, dan tidak secara eksplisit menguji perbedaan antara dampak pertumbuhan dan penurunan populasi. Mengkaji dampak kedua bentuk perubahan populasi terhadap ketimpangan pendapatan adalah hal yang penting di wilayah pedesaan di Amerika Serikat, yang sebagian besarnya mengalami hal ini penurunan populasi. Kami menganalisis data tingkat kabupaten (N=11.320 kabupaten-dekade) dari Amerika Serikat. ⁹⁸ Sensus sepuluh tahun dan

⁹⁷ Jaclyn Butler dkk., "Population Change and Income Inequality in Rural America," *SpringerOpen* 39 (2020): 889–911.

⁹⁸ Butler dkk., 889–911.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
				survey komunitas Amerika, menerapkan model regresi efek tetap untuk memperkirakan dampak pertumbuhan dan penurunan populasi terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten pedesaan. Kami menemukan bahwa kedua bentuk perubahan populasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan ketimpangan relative terhadap pertumbuhan yang stabil. Penurunan populasi dikaitkan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan, sementara pertumbuhan penduduk sedikit berhubungan dengan penurunan ketimpangan. Hubungan ini konsisten di berbagai spesifikasi model, termasuk model memperhitungkan komposisi pekerjaan, sosiodemografi, dan etnis-ras suatu daerah. Kami juga menemukan bahwa hubungan antara

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
				ketimpangan pendapatan dan perubahan populasi berbeda-beda di setiap Negara wilayah geografis, tingkat ketimpangan dasar, dan ukuran populasi dasar, menunjukkan bahwa hubungan antara perubahan populasi dan ketimpangan pendapatan tidak seragam di seluruh wilayah pedesaan Amerika Serikat.
4	Rivanda Fadhila Indra Putra dan Vera Lisna ⁹⁹	<i>Poverty-Growth-Inequality Triangle (Pgi Triangle): Financial Development, Human Development, And Inequality In Asia</i>	Perbedaan dalam penelitian ini adalah obyek penelitian di Asia, sedangkan penelitian saya di Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pembangunan keuangan dan pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi pembangunan keuangan akan mengurangi tingkat ketimpangan dari suatu negara, sedangkan nilai pembangunan manusia yang tinggi justru meningkatkan ketimpangan.

⁹⁹Rivanda Fadhila Indra Putra, "Poverty-Growth-Inequality Triangle (Pgi Triangle): Financial Development, Human Development, And Inequality In Asia," *JEP: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 28, no. 2 (2020): 77–89.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
5	Indra Suhendra, dkk ¹⁰⁰	<i>Human Capital, Income Inequality and Economic Variables: A Panel Data Estimation from a Region in Indonesia</i>	Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek, penelitian ini di 34 Provinsi di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan sumber daya manusia berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan kompetensi karena rata-rata tahun ajaran yang lebih panjang dan ekspektasi tahun ajaran. Modal manusia punya meningkatkan kemungkinan seseorang diterima di pasar kerja dan memperoleh penghasilan lebih tinggi; oleh karena itu, hal ini menurunkan ketimpangan pendapatan. ¹⁰¹ Kami juga menemukan bahwa inflasi menyebabkan kesenjangan distribusi pendapatan yang lebih tinggi. Implikasi lebih lanjut dari situasi ini adalah

¹⁰⁰Indra Suhendra, "Human Capital, Income Inequality and Economic Variables: A Panel Data Estimation from a Region in Indonesia," *Journal of Asian Finance Economics and Business* 7, no. 10 (t.t.).

¹⁰¹Indra Suhendra, "Human Capital, Income Inequality and Economic Variables: A Panel Data Estimation from a Region in Indonesia," *Journal of Asian Finance Economics and Business* 7, no. 10 (t.t.).

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
				kenaikan inflasi peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, dan sebagai konsekuensinya, membuat kehidupan mereka semakin buruk. Makalah ini akan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dimana sumber daya manusia, yang diukur dengan menggunakan indeks pendidikan, merupakan faktor penting yang secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan selain faktor ekonomi lainnya.
6	Krisna Gita Suryani dan Nenik Woyanti ¹⁰²	<i>The Effect Of Economic Growth, Hdi, District/City Minimum Wage And Unemployment On Inequality Of Income Distribution In Province Of D.I Yogyakarta (2010-2018)</i>	Perbedaan dengan penelitian ini pada variabel yang digunakan yakni variabel IPM, dan upah minimum sebagai variabel independen yang tidak digunakan pada penelitian saya. Pada penelitian saya menggunakan variabel moderasi sedangkan dalam penelitian ini	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan IPM, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan

¹⁰² Krisna Gita Suryani dan Nenik Woyanti, "The Effect Of Economic Growth, Hdi, District/City Minimum Wage And Unemployment On Inequality Of Income Distribution In Province Of D.I Yogyakarta (2010-2018)," *Jurnal Discovery* 36, no. 2 (2021): 170–180.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
			tidak. Obyek dalam penelitian ini berlokasi di Yogyakarta sedangkan penelitian saya bertempat di Provinsi Jawa Timur.	distribusi pendapatan. IPM berpengaruh negatif, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010-2018.
7	Seokchae Hwang, Chung Choe, Koangsung Choi. ¹⁰³	<i>Population ageing and income inequality</i>	Obyek dalam penelitian ini berbedanya dengan penelitian saya, penelitian ini dilakukan di Korea Selatan	Memperkirakan dampak penuaan populasi terhadap pendapatan yang berbeda, penuaan menurunkan pendapatan rumah tangga di seluruh distribusi pendapatan. Disisi lain, ketika kita mengontrol karakteristik individu, dampak penuaan populasi secara keseluruhan akan berkurang dan pendapatan rumah tangga dari individu berpenghasilan tinggi justru meningkat.
8	Firman Bunyamin ¹⁰⁴	<i>The Impact of Physical Capital and Human</i>	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penggunaan	Temuan penting untuk analisis kebijakan adalah

¹⁰³Seokchae Hwang, Chung Choe, dan Koangsung Choi, "Population ageing and income inequality," *The Journal of The Economics Of Ageing* 20 (2021): 1–15.

¹⁰⁴Firman Bunyamin, "The Impact of Physical Capital and Human Capital on Growth in Indonesia, 1970–2017," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 30, no. 2 (2022): 115–130.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
		<i>Capital on Growth in Indonesia, 1970–2017</i>	variabel modal fisik, yang tidak ada dalam penelitian saya. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan variabel modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini obyek digunakan di Indonesia, sedangkan dalam penelitian saya di Provinsi Jawa Timur ¹⁰⁵	bahwa sumber daya manusia tampaknya menjadi factor yang terus mempengaruhi pertumbuhan Indonesia, bersamaan dengan modal fisik akumulasi, dengan dampak yang sangat kuat terhadap sumber daya manusia yang timbul dari pendidikan tinggi. Modal fisik telah menunjukkan dampak yang kuat dan signifikan terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang dan mengindikasikan bahwa Indonesia membutuhkan waktu yang lama investasi jangka panjang untuk menghasilkan pertumbuhan. Investasi tersebut memiliki perbedaan terkait dengan operasi berkelanjutan seperti infrastruktur, layanan canggih, dan modal ventura. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kerja berkecakupan tinggi yang dipasok oleh institusi pendidikan tinggi.

¹⁰⁵Firman Bunyamin, "The Impact of Physical Capital and Human Capital on Growth in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 30, no. 1 (t.t.): 115–130.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
				Pengembangan lebih lanjutan pendidikan tinggi di samping peningkatan investasi lingkungan hidup di sector manufaktur dan jasa harus ditetapkan sebagai program prioritas dalam mendorong pertumbuhan.
9	Darol Arkum dan Hattami Amar ¹⁰⁶	<i>The Influence of Economic Growth, Human Development, Poverty and Unemployment on Income Distribution Inequality Study in the Province of the Bangka Belitung Islands</i>	Perbedaan penelitian ini adalah penggunaan variable independen yakni IPM dan kemiskinan yang tidak terdapat dalam penelitian saya. Perbedaan lainnya adalah penggunaan variable moderasi dalam penelitian ini tidak ada sedangkan penelitian saya menggunakan variable moderasi. Obyek dalam penelitian ini di Provinsi Bangka Belitung. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni model regresi linier berganda dan regresi linier	Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor-faktor mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, kemiskinan dan pengangguran sebesar 60.9 persen. Sisanya 3.91 persen yang dipengaruhi factor lainnya, secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai sebesar 30 persen dengan koefisien regresi sebesar 0.009. pembangunan manusia

¹⁰⁶ Darol Arkum dan Hattami Amar, "The Influence of Economic Growth, Human Development, Poverty and Unemployment on Income Distribution Inequality Study in the Province of the Bangka Belitung Islands," *Jurnal Bina Praja* 14, no. 3 (2022): 413–422.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
			sedehana sedangkan dalam penelitian saya regresi linier berganda tetapi dimoderasikan .	berpengaruh negative dan signifikan sebesar 55.5 persen dengan koefisien regresi 0.006 dan kemiskinan¹⁰⁷ mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan dengan nilai sebesar 25.8 persen dengan regresi koefisien sebesar 0.004 dan pengangguran berpengaruh negative dan tidak signifikan dengan nilai sebesar 11.1 persen dengan nilai signifikan sebesar - 0.003. kesimpulannya ternyata factor pembangunan manusia mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung.
10	I Gede Wirian,I Ketut Sudibia ¹⁰⁸	<i>The Effect of Investment, Economic Growth and Education Level on</i>	Pada penelitian variabel independen yang digunakan adalah variabel investasi,	investasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh positif

¹⁰⁷ Darul Arkum dan Hattami Amar, "The Influence of Economic Growth, Human Development, Poverty and Unemployment on Income Distribution Inequality Study in the Province of the Bangka Belitung Islands," *Jurnal Bina Praja* 14, no. 3 (2022): 413–22.

¹⁰⁸ I Gede Wirian dan Ketut Sudibia, "The Effect of Investment, Economic Growth and Education Level on Employment Opportunities and Poverty by Province in Indonesia," *JEKT: Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 16, no. 2 (2022): 270–91.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
		<i>Employment Opportunities and Poverty by Province in Indonesia</i>	tingkat pendidikan. Sedangkan variabel dependen kesempatan kerja dan kemiskinan yang tidak ada dalam penelitian saya. Dan obyek yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian saya, dalam penelitian ini di Provinsi Indonesia, sedangkan penelitian saya di Provinsi Jawa Timur.	dan signifikan terhadap kesempatan kerja, (2) investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, (3) pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, (4) kesempatan kerja sebagai variabel intervening pengaruh tidak langsung antara investasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan
11	Megantoro, Hanafi, Ritonga, dan Wijaya. ¹⁰⁹	<i>The Influence Of Population, Open Unemployment Rates and IPM On Income Inequality In Lampung Province</i>	Pada penelitian ini menggunakan variabel independen yakni jumlah penduduk. Sedangkan dalam penelitian saya tidak menggunakan variabel jumlah penduduk. Dan untuk variabel IPM dalam penelitian sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian saya sebagai variabel moderasi. Obyek	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan variabel IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

¹⁰⁹ Ardi Megantoro, Syafiq Mahmadah Hanafi, dan Anas Habibi Ritonga, "The Influence Of Population, Open Unemployment Rates and IPM On Income Inequality In Lampung Province," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 11, no. 2 (2023).

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
			dalam peneleitian ini bertempat di Provinsi Lampung sedangkan dalam penelitian saya di Provinsi Jawa Timur.	
12	Suparman dan Muzakki ¹¹⁰	<i>Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach</i>	Dalam penelitian ini menggunakan variabel ketimpangan regional, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan variabel ketimpangan pendapatan. Obyek dalam penelitian ini dilakukan di 32 Provinsi di Indonesia, sedangkan dalam penelitian saya di Provinsi Jawa Timur.	Temuan penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan factor ETI terhadap factor LOG (PDRB) selain itu, variable IPM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variable LOG (PDRB), sedangkan variable UNR juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel LOG (PDRB). Selanjutnya variable ETI diketahui mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap UNR. sedangkan variable HDI mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap variable UNR. Terakhir, variable LOG (PDRB) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap

¹¹⁰Suparman, "Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach," *Taylor & Francis* 11, no. 2 (2023): 1–10.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
				variable UNR.
13	Willy Hutabarat, Sofyan Syahnur, Taufiq C Dawood ¹¹¹	<i>How Population, Economic, Inequality and Unemployment Contribute Affect Indonesian Poverty</i>	Perbedaan dalam penelitian ini Obyek dalam penelitian ini di 33 Provinsi Di Indonesia sedangkan dalam penelitian saya hanya di Provinsi Jawa Timur. Kemudian perbedaannya juga dalam penggunaan variabel independen dalam penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian penggunaan variabel dependen adalah kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap keparahan kemiskinan. Variable pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kesenjangan kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Selain itu variable tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, kesenjangan kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah menjaga pertumbuhan penduduk tetap stabil, menciptakan perekonomian yang dapat dinikmati semua kelompok,

¹¹¹Willy Hutabarat, Taufiq C Dawood, dan Sofyan Syahnur, "How Population, Economic, Inequality and Unemployment Contribute Affect Indonesian Poverty," *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (2023): 8–14.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
				pemerataan, infrastruktur, pembangunan sosial dan ekonomi, serta memberikan lebih banyak kesempatan kerja. Selain itu, diperlukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.
14	Nita Sri Rahayu dan Barika. ¹¹²	<i>The Influence Of Economic Factors On HDI In Lampung Province In 2018-2021</i>	Obyek dalam penelitian ini di Provinsi Lampung sedangkan penelitian saya di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan lainnya dalam penelitian ini melihat pengaruh IPM dari segi faktor ekonomi.	Berdasarkan temuan studi tersebut, IPM di Provinsi Lampung meningkat antara tahun 2018 dan 2021 sebagai konsekuensi dari peningkatan PDRB, angka harapan hidup, infrastruktur pendidikan, dan belanja fungsi kesehatan. Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Kesehatan, dan Belanja Fungsi Pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung pada periode yang sama.
15	Nurdini, Yusrizal, Aqwa	<i>The Influence of Open Unemployment</i>	Perbedaan penggunaan variabel dependent	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat

¹¹²Nita Sri Rahayu dan Barika, "The Influence Of Economic Factors On HDI In Lampung Province In 2018-2021," *Ekombis Review: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 1 (2024): 375–386.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Hasil
	Naser Daulay ¹¹³	<i>Rates, Inflation and Minimum Wages on Income Inequality in The North Sumatra Region</i>	pada penelitian ini menggunakan variabel tingkat inflasi dan upah minimum. Dan tempat dalam penelitian ini di Sumatera Utara, sedangkan dalam penelitian saya bertempat di Provinsi Jawa Timur.	pengangguran terbuka dan upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah kebijakan pemerataan pendapatan lapangan kerja dengan membuka lapangan kerja dan pelatihan kerja serta pemerataan pendapatan gaji yang diterapkan secara merata di berbagai daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara.

Sumber oleh peneliti, 2024

Penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil yang beragam dalam memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan. Pada penelitian yang berjudul "*The Influence Of Population, Open Unemployment Rates and IPM On Income Inequality In Lampung Province*", yang ditulis oleh Megantoro, Hanafi, Ritongga, dan Wijayabawha hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu juga terdapat hasil penelitian yang masih beragam dapat

¹¹³Nurdini, Yusrizal, dan Aqwa Naser Daulay, "The Influence of Open Unemployment Rates, Inflation and Minimum Wages on Income Inequality in The North Sumatra Region," *Jurnal Manajemen Bisnis* 11, no. 2 (2024): 1279–1291.

dilihat pada tabel 1.1 penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, kita akan memperluas pemahaman dengan menambah variabel moderasi indeks pembangunan manusia dan fokus pada Provinsi Jawa Timur berdasarkan Bakorwil periode 2019-2023. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi bagaimana indeks pembangunan manusia memoderasikan hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan, memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

C. Kerangka Pikir

Hubungan atau keterkaitan antar variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Hubungan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan

Menurut J Hingan ada tiga ciri utama Negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, kerangka instruktif yang kurang, menyebabkan banyak orang bodoh dan tidak adanya kemampuan dan bakat. Kedua ialah kelamahan kronis kantor dan desain pemanfaat sehingga hanya sebagian kecil dari penduduk yang dapat menjadi pekerja yang berguna dan yang ketiga yakni bahwa penduduk dikumpulkan di kawasan hortikultura dan pertambangan dengan strategi penciptaan yang usang dan usang.¹¹⁴

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu wilayah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Permasalahan akan muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan.¹¹⁵ Menurut Arsyad, bahwa pembangunan kependudukan biasanya memicu munculnya berbagai masalah

¹¹⁴ Dinda Syahri dan Yesy Gustiara, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019," *Journal Of Trends Economics And Accounting Research* \ 1, no. 1 (2020): 35.

¹¹⁵ Agam Firdaus dan Maulidiah Indira Hasmarini, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022," *Primanomics: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 21, no. 3 (2023): 3.

seperti pembangunan usia muda, meningkatnya jumlah pengangguran, serta urbanisasi. Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan perbaikan di Indonesia merupakan antar territorial, maupun antar wilayah pedesaan dan metropolitas serta antar wilayah.

b) Hubungan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan

Menurut Sjafrizal, salah satu parameter penting yang digunakan untuk menentukan seberapa tinggi atau rendahnya kesejahteraan masyarakat daerah adalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah, bukan sebaliknya. Akibatnya, tingkat pengangguran yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang berpendapatan rendah, yang pada gilirannya menyebabkan ketimpangan pendapatan.¹¹⁶

Jika IPM tidak merata di suatu daerah, kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut akan lebih baik, yang mendukung proses pembangunan. Namun, jika peningkatan IPM di suatu daerah tidak diiringi dengan peningkatan IPM di daerah lain, maka dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan.

c) Hubungan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan yang dimoderasikan dengan IPM

Jumlah penduduk yang terus meningkat dapat memperburuk ketimpangan pendapatan apabila pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tidak seimbang dengan penambahan populasi.¹¹⁷ Selain itu, hubungan antara jumlah penduduk dengan ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh beberapa factor salah satunya indeks pembangunan manusia. Meskipun dalam penelitian sering dihasilkan berbanding terbalik atau negative, yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan. Bahwa dari indikator Indeks Pembangunan Manusia yakni pendidikan dan kemiskinan pengaruh yang lebih signifikan daripada jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan. Namun,

¹¹⁶ Mouren dan dkk, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Toraja Utara," 133–44.

¹¹⁷ Erni Dwi Astuti dan Riko Setya Wijaya, "Pengaruh Indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang," *Jambura: Economic Education Journal* 6, no. 2 (2024): 407.

Indeks Pembangunan Manusia dapat menjadi moderator yang efektif dalam memahami bagaimana peningkatan populasi berinteraksi dengan kondisi sosio-ekonomi umum suatu wilayah. IPM yang tinggi biasanya menandakan kualitas hidup yang lebih baik, akses yang lebih luas ke layanan publik, dan potensi yang lebih kuat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.¹¹⁸

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan sebagai moderasi dalam hubungan ini, di mana negara dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta kebijakan sosial yang lebih efektif. Dengan demikian, negara-negara dengan IPM tinggi dapat mengelola pertumbuhan populasi dengan lebih baik, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan menciptakan peluang yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

d) Hubungan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan yang dimoderasikan dengan IPM

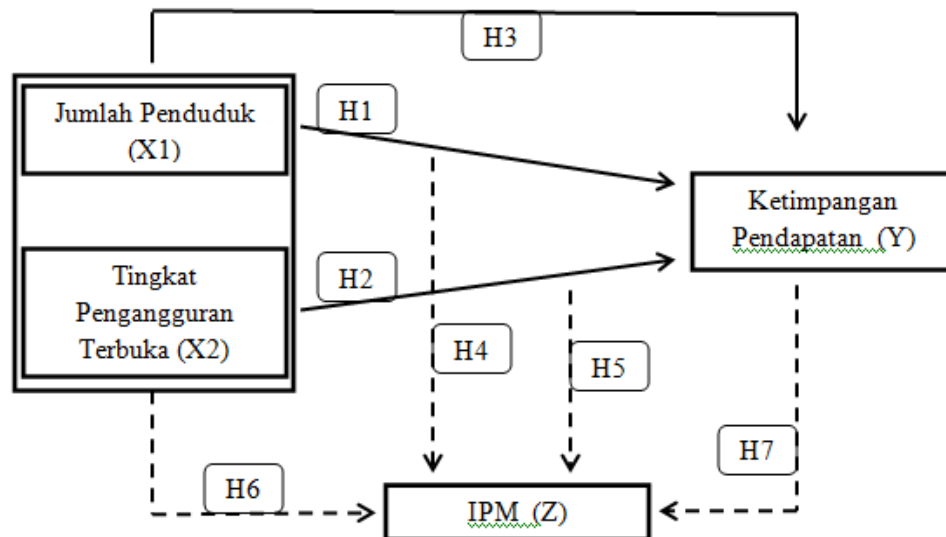
Indeks pembangunan manusia (IPM) tidak merata antar daerah. Ini berarti bahwa daerah dengan IPM yang lebih tinggi memiliki kualitas manusia yang lebih baik, yang dapat mendorong pembangunan. Di sisi lain, peningkatan IPM di suatu daerah akan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar di daerah lain. Teori sumber daya manusia juga menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia akan ditingkatkan melalui IPM dalam aspek pendidikan yang ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga produktivitas kerja maksimal. Namun demikian, tenaga kerja dengan pendidikan rendah akan kesulitan menemukan pekerjaan dan pengangguran akan terus meningkat, menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin dalam.¹¹⁹

Berikut kerangka konseptual yang menggambarkan konsep yang akan dikaji dalam penelitian ini:

¹¹⁸ Andhika Bhagaskara, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur Pada Tahun 2011-2019," *JDESS: Journal of Development Economic and Social Studies* 2, no. 4 (2023): 840.

¹¹⁹ Mahardhika Cipta Raharja dan Unik Lestari, "Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja," *Oeconomicus Journal of Economics* 6, no. 2 (2022): 91.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Keterangan:

—————→ : Pengaruh variabel dependen
 - - - - -→ : Pengaruh variabel moderasi

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

- H_{01} : Tidak ada pengaruh yang signifikan pada jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023,
 H_{a1} : Ada pengaruh yang signifikan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.
 H_{02} : Tidak ada pengaruh yang signifikan pada tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023,
 H_{a2} : Ada pengaruh yang signifikan tingkat pengangguran terbuka terhadap

ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.

- H₀₃ : Tidak ada pengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023,
- H_{a3} : Ada pengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.
- H₀₄ : Tidak ada pengaruh yang signifikan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan dengan IPM sebagai variabel moderasi di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.
- H_{a4} : Ada pengaruh yang signifikan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan dengan IPM sebagai variabel moderasi di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.
- H₀₅ : Tidak ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan dengan IPM sebagai variabel moderasi di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.
- H_{a5} : Ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan dengan IPM sebagai variabel moderasi di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.
- H₀₆ : Tidak ada pengaruh yang signifikan Jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapat dengan IPM sebagai variabel moderasi di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.
- H_{a6} : Ada pengaruh yang signifikan Jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapat dengan IPM sebagai variabel moderasi di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.
- H₀₇ : Tidak ada pengaruh Indeks pembangunan manusia sebagai variabel moderasi terhadap ketimpangan pendapatan.
- H_{a7} : Ada pengaruh Indeks pembangunan manusia sebagai variabel moderasi terhadap ketimpangan pendapatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatory. Eksplanatory adalah penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna untuk memperkuat atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.¹²⁰ Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan gabungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksirkan dan meramalkan hasilnya. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatory digunakan untuk menguji teori dan hipotesis yaitu pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi di Provinsi Jawa Timur.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 10 kabupaten/kota terpilih di Provinsi Jawa Timur sebagai daerah perwakilan. Menurut pembagian wilayah Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah), setiap Bakorwil dipilih dua daerah sehingga diperoleh daerah penelitian yaitu; Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Bondowoso, Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, dan Kota Mojokerto. Dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui website resmi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2025. Untuk periode penelitian pada tahun 2019-2023.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹²¹ Populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”.¹²² Sedangkan pendapat lain populasi adalah “keseluruhan

¹²⁰Nurul Badriah dkk., *Metodologi Penelitian untuk Bidang Ekonomi dan Bisnis* (Malang: UB Press, 2022), 234.

¹²¹Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), 61.

¹²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 173.

objek peneliti baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama.”¹²³Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek yang ada di dalam ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasinya adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data.¹²⁴Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹²⁵Sampel adalah “sebagai bagian dari populasi, contoh (monster) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu”. Berdasarkan pendapat di atas bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Penulis mengacu pada penentuan jumlah sampel yang akan diteliti yaitu: “mengenai penetapan besar kecilnya sampel tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak, artinya tidak ada suatu ketentuan berapa persen suatu sampel harus diambil”. Berdasarkan pendapat di atas penulis berpendapat bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sumber data yang dianggap dapat mewakili dari jumlah keseluruhan. Penulis mengambil sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.

Teknik pengambilan sampel disebut teknik sampling. “Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.”¹²⁶ Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.¹²⁷ Berdasarkan pendapat di atas bahwa teknik pengambilan sampel adalah suatu cara yang digunakan untuk pengambilan sampel dari populasi yang akan diteliti supaya dapat mewakili keseluruhan populasi. Berdasarkan jumlah populasi dan sampel yang telah ditetapkan, teknik pengambilan sampel

¹²³Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 47.

¹²⁴Sukandarrumidi, 50.

¹²⁵Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 174.

¹²⁶Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, 62.

¹²⁷Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 176.

yang penulis lakukan adalah area sampling (cluster sampling), “teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas”.¹²⁸

Karakteristik penelitian ini bersifat homogen (sama) maka pengambilan sampel menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Teknik ini digunakan dengan cara menentukan area yang lebih luas sampai wilayah yang lebih terkecil. Mengacu pada uraian di atas, dari populasi yang berjumlah 29 kabupaten dan 9 kota dengan total keseluruhan 38 kabupaten/kota. Teknik yang digunakan yaitu Cluster Random Sampling, yang mana berdasarkan data Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) terdapat 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan periode 2019-2023 total keseluruhan 50 data. Maka dengan 10 kabupaten/kota dengan periode 2019-2023 tersebut dijadikan sebagai sampel penelitian.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pemaparan variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel dan indikator-indikator variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
1.	Jumlah Penduduk (X1) ¹²⁹	Jumlah penduduk adalah jumlah sekumpulan orang yang berada di suatu daerah yang telah dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi serta tenaga yang	Jumlah penduduk dalam nominal jiwa.	Sukirno (2010)

¹²⁸Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, 65.

¹²⁹Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, 2016, 421.

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
		dimiliki dapat digunakan untuk kegiatan produksi.		
2.	Pengangguran (X ₂) ¹³⁰	Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja, melainkan belum mendapatkan pekerjaan (yang tidak aktif mencari pekerjaan tidak termasuk pengangguran)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Sukirno (2010)
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM ialah pengukuran yang menggambarkan dapatnya penduduk memperoleh akses pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang layak.	1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Standar kehidupan	Todaro (2012)
4.	Ketimpangan pendapatan (Y)	Ketimpangan pendapatan ialah perbedaan perolehan pendapatan antara	Gini ratio menurut kabupaten/kota	Baldwin (1986)

¹³⁰Sukirno, 327.

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
		di miskin dan si kaya sehingga berdampak pada perbedaan kemakmuran ekonomi yang didapatkan.		

Sumber diolah dari peneliti, 2025

E. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Analisis Data

a) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengkopi data berasal dari website BPS Jawa Timur. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data atau teori yang dilakukan sebagai literature penunjang dalam penelitian ini.¹³¹ Literature penunjang diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah lainnya yang erat hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Adapaun dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data dengan cara membuka website Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timuryang berhubungan dengan jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, IPM, dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan Bakorwil yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023.

b) Data dan Sumber Data

Data sekunder ialah data yang digunakan dalam penelitian ini.¹³² Jenis data dalam penelitian ini berupa jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023, Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023, Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 (tolok ukur pengangguran), dan ratio gini kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-

¹³¹Muannif Ridwan, Suhar, dan Bahrul Ulum, "The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 44–45.

¹³²Melissa P. Johnston, "Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come" 3, no. 3 (2014): 620.

2023 (tolok ukur ketimpangan pendapatan). Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari website resmi BPS Jawa Timur.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen dan apakah variabel moderasi dapat memoderasikan pengaruh variabel independen terhadap dependen.¹³³ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis, yaitu statistic deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis di dalamnya uji regresi moderasi (*Moderating Regression Analysis*). Analisis data penelitian ini dengan bantuan *EvIEWS 10*. *EvIEWS* ialah alat bantu pengolahan data karena kemampuannya melakukan olah data panel. *EvIEWS* ini dapat menggenerate model *random effect* dan *fixed effect*. Selain itu, *evIEWS* dapat memilih model mana yang paling relevan atau cocok digunakan untuk menganalisis data panel pada penelitian yaitu melalui uji chow, uji hausman, dan uji LM. Berikut penjelasannya:

(1) Persamaan Regresi Data Panel

Regresi data panel ini dilakukan untuk melakukan pengecekan data crossection yang sama, namun dilakukan pada waktu yang berbeda. Data panel merupakan data dari sejumlah individu yang sama diamati tetapi dengan kurun waktu tertentu. metode regresi data panel ini memberi perkiraan yang sifatnya BLUE (*Best Linier Unbiased Estimation*) apabila dapat memenuhi asumsi.¹³⁴

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen digunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS) terhadap model dengan kombinasi time series dan cross section atau sering disebut dengan data panel (*pooled data*).¹³⁵ Adapun formulasi regresi data panel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut;

$$Y_{it} = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + b_4X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

¹³³ Adji Achmad Rinaldo Fernandes dan Solimun, *Metode Analisis Data Penelitian: Pendekatan Regresi* (Malang: UB Press, 2022), 12.

¹³⁴ Iskandar Ahmaddien dan Bambang Susanto, *EvIEWS 9 Analisis Regresi Data Panel* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 11.

¹³⁵ Setiawan dan Kusri, *Ekonometrika* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 8.

Dimana :

Y_{it}	: Ketimpangan pendapatan
α	: Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4	: Koefisien regresi
X_1	: Pertumbuhan ekonomi
X_2	: Tingkat Pengangguran Terbuka
i	: Entitas ke-1
t	: Period eke-4
ε	: Nilai eror

(2)Pemilihan Model Data Panel

Permodelan data panel terdiri darai tiga pendekatan, yaitu *Model Common Effect* (CEM), *Model Fixed Effect* (FEM), dan *Model Random Effect* (REM), dengan penjelasan berikut ini: ¹³⁶

a) *Common Effect Model* (CEM)

Model regresi data panel yang paling sederhana karena hanya dengan menggabungkan data time series dan data crossection.

b) *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan model efek tetap, yakni model olah data panel dengan menambahkan model dummy, karena model *fixed effect* memprediksi adanya kemungkinan jika peneliti menemui masalah omitted variable (variabel yang hilang), sehingga akan membawa perubahan dengan menahan time series atau cross-section.

c) *Random Effect Model* (REM)

Pendekatan model random effect memperbaiki efisiensi proses least square dengan memperhitungkan eror, cross section dan time series. Selain itu, menekan derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti pada model *fixed effect*, sehingga pengukuran hasil estimasi menjadi efisien dan semakin baik. jikaterjadi gangguan asumsi klasik, model ini telah terdistribusi dengan normal

¹³⁶Eviatiwi Kusumaningtyas dan Sugiyanto, *Konsep Dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews* (Lamongan: Academia Publication, 2022), 57.

dan tidak perlu melakukan uji autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas.

Model mana yang akan dipilih dari tiga pendekatan model yang ada maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu agar diperoleh pendekatan model yang sesuai terhadap hasil penelitian ini.

1) Uji Statistik Data Panel

i) Uji Chow

Uji chow atau likelihood test ratio digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yakni antara model FEM (*Fixed Effect Model*) dengan Model CEM (*Common Effect Model*). Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat signifikansi model FEM menggunakan uji Statisti F. Jika nilai dari F hitung $> F$ tabel¹³⁷ atau $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak yang artinya asumsi koefisien intersep dan slope adalah sama tidak berlaku, sehingga teknik regresi data panel, antara model FEM lebih baik dari model CEM ataupun sebaliknya.¹³⁸

ii) Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model REM (*Random Effect Model*) dengan FEM (*Fixed Effect Model*). Uji ini bekerja apakah terdapat hubungan antara galat pada model dengan satu atau lebih variabel independen dalam model. Jika nilai dari F hitung $> F$ tabel atau $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak yang artinya model FEM lebih baik dibandingkan model REM.

iii) Uji Breusch-Pagan/ Uji LM

Untuk mengetahui apakah model REM lebih baik dibandingkan model CEM, yang sering disebut dengan uji LM (*Lagrange Multipiler*) yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari model CEM. Jika hasil statistik LM lebih besar dibandingkan nilai kritis statistik chi-square, maka H_0 ditolak yang artinya bahwa estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah metode REM.

¹³⁷Sofyan Yamin, *Olah Data Statistik: Smartpls 3-4 Amos dan Stata (Mudah dan Praktis)*, III (Depok: PT Dewangga Energi Nasional, 2023), 611.

¹³⁸Bambang Juanda dan dan Junaedi, *Ekonomika Deret Waktu Teori dan Aplikasi* (Bogor : IPB Press, 2012), 181–83.

2) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik berupa, diantaranya sebagai berikut:

i) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai $Asym.Sig > 0.05$, menunjukkan data tersebut terdistribusi normal. Namun jika $Asym.Sig < 0.05$, data tidak terdistribusi normal.¹³⁹

ii) Uji multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan keadaan dimana model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Untuk mendeteksi atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi yaitu *VIF (Variance Inflation Facktor)* dan *Tolerance*.¹⁴⁰ Uji Multikolinieritas adalah uji untuk variabel bebas dimana korelasi antar variabel bebas dilihat. Jika ada dua variabel bebas dimana kedua variabel tersebut berkorelasi kuat, maka secara logika persamaan regresinya cukup diwakili oleh satu variabel bebas saja. Korelasi yang kuat, apabila nilai $r > 0,80$. Jadi, bila korelasi antar variabel $< 0,80$ dinyatakan tidak ada multikolinieritas.

iii) Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antar nilai yang diprediksi dengan studentized delete residual nilai tersebut sehingga model tersebut dapat dikatakan homokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan

¹³⁹ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*, 3 ed. (Ponorogo: CV Wade Group, 2017), 83.

¹⁴⁰ Duwi Priyanto, *Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), 151.

residualnya.¹⁴¹ Adapun metode yang digunakan untuk menguji heterokedastisitas, sebagai berikut; Uji Gletser, Uji Park, Uji Korelasi Spearman. Dari pengujian heterokedastisitas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- a) Jika nilai sig. $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas
- b) Jika nilai sig. $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas
- iv) Uji autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah data yang diuji terjadi masalah autokorelasi atau tidak. Jika nilai uji chi-square $> 0,05$ tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengujinya menggunakan residual diagnostic dengan serial correlation LM test.

3) Uji Statistik

Untuk mendapat model regresi yang terbaik, beberapa kriteria haruslah dapat dipenuhi antara lain dengan melakukan uji T, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Sebagai berikut:¹⁴²

a) Uji t (Uji Statistik t)

Pada dasarnya pengujian ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh dalam satu variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Maksud dari Pengujian t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain itu konstan.

b) Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen perlu dilakukan pengujian koefisien dengan menggunakan derajat signifikansi dari nilai F. Pengujian dilakukan dengan menggunakan software reviews 9. Jika nilai signifikansi (probability) $> 0,05$ maka H_0 diterima ataupun sebaliknya.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

¹⁴¹Juliansyah Noor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi Dan Manajemen* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), 64.

¹⁴²Noor, 71.

Koefisien determinasi merupakan angka yang menunjukkan besarnya kemampuan variasi dari variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Besarnya koefisien determinasi berkisar 0 sampai 1. Semakin mendakati angka 1 maka semakin dekat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas, artinya bahwa semakin baik variabel bebas menjelaskan variabel tidak bebas.¹⁴³

4) Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Menurut Ghozali, *Modereted Regression Analysis* (MRA) atau sering disebut dengan uji interaksi adalah aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen).¹⁴⁴ Dalam penelitian ini, untuk menguji pengaruh interaksi variabel moderasi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan yang dimoderasi oleh IPM. Persamaan uji regresi moderasi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3Z + b_4X_1Z + b_5X_2Z + \epsilon$$

Keterangan :

Y = ketimpangan pendapatan

α = konstanta

b_1 = koefisien regresi untuk X_1

b_2 = koefisien regresi untuk X_2

b_3 = koefisien regresi moderasi untuk X_1 dan X_2

X_1 = jumlah penduduk

X_2 = pengangguran

Z = Indeks Pembangunan Manusia

e = error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

¹⁴³Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*, 116.

¹⁴⁴Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Univ. Diponegoro Press, 2016), 30.

Menurut Ghazali, untuk menguji keberadaan Z apakah benar sebagai variabel *pure moderate*, *quasi moderator*, *predictor moderate* atau *homologizer moderator*, dapat diketahui dengan kriteria pola hubungan sebagai berikut.¹⁴⁵

1) Sel 1

Variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi (Z) berhubungan dengan variabel kriteria (Y) dan atau *predictor* (X), sehingga variabel tersebut hanya merupakan variabel *intervening*, *Exogenous*, *Antecedent* atau Prediktor dan terjadi apabila b2 signifikan dan b3 tidak signifikan.

2) Sel 2

Variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi (Z) tidak berhubungan dengan variabel kriteria (Y) atau *predictor* (X) dan tidak berinteraksi dengan variabel *predictor* (X) sehingga variabel tersebut hanya merupakan variabel moderator *Homologizer* (moderasi potensial berpotensi menjadi variabel moderasi).

3) Sel 3

Variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi (Z) tidak berhubungan dengan variabel kriteria (Y) dan/atau *predictor* (X) dan berinteraksi dengan variabel, sehingga variabel tersebut hanya merupakan variabel Quasi Moderator (moderator semu yang sekaligus menjadi variabel independen). Quasi Moderator terjadi apabila b2 signifikan dan b3 signifikan.

4) Sel 4

Variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi (Z) tidak berhubungan dengan variabel kriteria (Y) dan atau prediktor (X), sehingga variabel tersebut hanya merupakan variabel Pure Moderator terjadi apabila b2, tidak signifikan dan b3 signifikan.

¹⁴⁵Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Univ. Diponegoro Press, 2016), 30–32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Agar penelitian ini memberikan kontribusi yang nyata dalam perumusan kebijakan, pendekatan yang digunakan harus mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi ketimpangan pendapatan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih inklusif. Kebijakan yang didasarkan pada data dan analisis yang mendalam akan lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap kondisi demografis dan ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini, data jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka dianalisis dengan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pengangguran yang lebih spesifik serta mencari variabel yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan memahami karakteristik pengangguran secara lebih rinci, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tantangan ketenagakerjaan di berbagai kelompok masyarakat. Ketimpangan pendapatan dan IPM merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan pemerataan pembangunan suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi, terutama pada kelompok tertentu, dapat menjadi faktor utama yang memperburuk ketimpangan ekonomi dan menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengklasifikasikan data pengangguran berdasarkan variabel spesifik, penelitian ini berupaya mengungkap hubungan antara ketimpangan kesempatan kerja dengan kesenjangan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat

dalam memahami permasalahan ketimpangan dan mencari solusi yang lebih efektif.

Secara administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Dimana dalam setiap Provinsi terdapat Badan koordinasi wilayah atau sering disebut dengan Bakorwil. Berdasarkan lima pembagian Bakorwil Provinsi Jawa Timur tersebut dibagi menjadi 2 kabupaten/kota dalam setiap wilayah. Dan 10 kabupaten/kota tersebut memiliki nilai ketimpangan pendapatan tertinggi pada tahun 2019-2023, paparan data yang disajikan dalam penelitian ini sudah dilakukan uji korelasi oleh peneliti yang memiliki nilai korelasi paling kuat, yakni: ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk menurut pendidikan khususnya lulusan diploma, tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin khususnya berkelamin laki-laki, dan IPM. sebagai tabel berikut.

a. Ketimpangan Pendapatan Bakorwil Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.1

Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Bakorwil

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023 (dalam presentase)					
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Trenggalek	0.372	0.379	0.335	0.331	0.336
Kota Malang	0.342	0.395	0.407	0.421	0.413
Kabupaten Banyuwangi	0.313	0.316	0.373	0.329	0.351
Kabupaten Bondowoso	0.302	0.329	0.334	0.365	0.350
Kabupaten Sidoarjo	0.311	0.340	0.347	0.373	0.359
Kota Mojokerto	0.309	0.355	0.334	0.381	0.353
Kota Madiun	0.357	0.392	0.345	0.398	0.416
Kota Kediri	0.321	0.346	0.374	0.371	0.400
Kota Surabaya	0.406	0.344	0.351	0.388	0.423
Kabupaten Malang	0.382	0.371	0.367	0.368	0.378

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Dapat dilihat berdasarkan tabel 4.1 bahwa ketimpangan pendapatan di Bakorwil tahun 2019-2023 cukup tinggi. Untuk Kota Surabaya secara konsisten menunjukkan angka ketimpangan tertinggi, yang meningkat dari 0.406 pada 2019 menjadi 0.423 pada 2023. Sementara Kota Madiun juga mengalami

kenaikan signifikan dari 0.3567 menjadi 0.416. sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren yang relatif stabil atau sedikit menurun dalam periode yang sama. Secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung tetap tinggi, menunjukkan adanya disparitas ekonomi yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah.

b. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Lulusan Diploma Di Bakorwil Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Di Bakorwil Provinsi Jawa Timur

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan						
Kabupaten/Kota	Tahun	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1
Trenggalek	2019	263,560	747,987	111,987	9,608	24,056
Trenggalek	2020	258,813	746,967	112,056	9,539	24,145
Trenggalek	2021	205,192	747,649	112,167	9,689	23,987
Trenggalek	2022	216,223	239,945	113,098	9,789	24,245
Trenggalek	2023	142,810	142,810	113,950	7,089	25,490
Malang	2019	104,750	522,959	463,249	10,367	81,735
Malang	2020	104,781	526,063	472,903	10,396	84,353
Malang	2021	866,944	471,402	455,706	9,545	81,612
Malang	2022	866,630	473,334	451,293	9,510	83,588
Malang	2023	867,710	478,020	473,230	9,239	97,107
Banyuwangi	2019	561,235	190,831	324,112	10,292	56,900
Banyuwangi	2020	536,010	190,163	325,724	10,890	57,456
Banyuwangi	2021	530,124	191,345	333,686	11,543	58,978
Banyuwangi	2022	524,501	191,560	343,551	11,906	59,024
Banyuwangi	2023	523,311	192,073	349,073	12,350	60,300
Bondowoso	2019	30,733	50,021	15,345	11,345	78,789
Bondowoso	2020	29,907	49,342	14,890	12,353	79,765
Bondowoso	2021	29,223	49,201	14,280	13,004	61,000
Bondowoso	2022	29,004	48,251	16,153	14,091	62,135
Bondowoso	2023	28,950	48,900	17,304	15,321	63,210
Sidoarjo	2019	158,876	212,945	667,956	5,569	142,432
Sidoarjo	2020	157,522	213,413	668,334	5,745	145,658
Sidoarjo	2021	158,978	223,654	669,089	5,757	145,923
Sidoarjo	2022	295,184	287,376	591,797	6,595	153,470
Sidoarjo	2023	292,141	284,747	607,183	6,666	161,717
Kota Mojekerto	2019	21,722	18,981	44,718	630	11,659

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan						
Kabupaten/Kota	Tahun	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1
Kota Mojekerto	2020	21,422	18,815	45,030	644	11,959
Kota Mojekerto	2021	21,272	18,629	45,105	648	11,975
Kota Mojekerto	2022	21,098	18,487	44,934	701	12,009
Kota Mojekerto	2023	21,050	18,276	44,745	713	12,020
Kota Malang	2019	132,343	178,228	199,560	41,357	104,481
Kota Malang	2020	142,603	163,952	234,747	28,942	115,433
Kota Malang	2021	131,302	168,733	226,695	34,219	127,922
Kota Malang	2022	138,256	150,271	259,083	40,106	155,687
Kota Malang	2023	121,316	155,627	272,284	34,565	147,494
Kota Kediri	2019	27,325	24,219	32,923	6,255	29,727
Kota Kediri	2020	25,908	25,152	33,767	6,976	30,976
Kota Kediri	2021	26,464	24,202	35,387	5,942	31,458
Kota Kediri	2022	31,434	29,150	40,876	8,902	33,346
Kota Kediri	2023	32,296	34,516	42,895	8,829	28,387
Kota Madiun	2019	29,338	28,787	73,045	6,259	20,071
Kota Madiun	2020	28,165	27,997	70,045	6,433	20,561
Kota Madiun	2021	26,006	24,880	69,421	6,289	19,392
Kota Madiun	2022	24,185	25,314	68,824	6,586	21,152
Kota Madiun	2023	24,027	25,050	71,390	6,874	22,100
Kota Surabaya	2019	267,954	350,456	3,098	14,865	400,009
Kota Surabaya	2020	298,567	300,023	2,432	15,550	360,213
Kota Surabaya	2021	320,432	267.435	2,098	15,980	298,345
Kota Surabaya	2022	350,786	380,432	1,839	16,108	201,234
Kota Surabaya	2023	390,570	338,800	1,070	16,550	299,450

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 data jumlah penduduk menurut pendidikan dengan lulusan SD terbanyak terjadi di Kabupaten Malang pada tahun 2021-2023 dengan nilai rata-rata 867.000. Kemudian untuk lulusan SMP terbanyak terjadi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019-2021 dengan nilai rata-rata sebesar 740.000. Kemudian lulusan SMA terbanyak terjadi di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai rata-rata 670.000. kemudian lulusan diploma di Bakorwil Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023, terlihat adanya variasi yang signifikan antar kabupaten/kota. Kota Malang dan Kota Surabaya memiliki jumlah lulusan diploma tertinggi secara konsisten, dengan jumlah Kota Malang mencapai 34.565 orang dan Kota Surabaya 16.550 orang pada tahun 2023. Sementara

itu, Kota Mojokerto memiliki jumlah paling rendah dengan hanya 713 orang pada tahun yang sama. Beberapa daerah seperti Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan yang stabil, sementara Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan signifikan dari 9.608 pada tahun 2019 menjadi 7.089 orang pada tahun 2023. Perbedaan ini mencerminkan distribusi kesempatan pendidikan yang tidak merata serta potensi ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki di Bakorwil Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.3

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Bakorwil Provinsi Jawa Timur

Jumlah Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin			
Kabupaten/Kota	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
Trenggalek	2019	86,12	61,06
Trenggalek	2020	87,44	64,26
Trenggalek	2021	85,69	59,32
Trenggalek	2022	86,15	58,17
Trenggalek	2023	89,02	72,45
Malang	2019	85,18	54,85
Malang	2020	86,99	56,13
Malang	2021	85,08	51,79
Malang	2022	86,26	54,38
Malang	2023	85,47	55,79
Banyuwangi	2019	86,79	87,12
Banyuwangi	2020	57,77	56,80
Banyuwangi	2021	88,34	56,53
Banyuwangi	2022	86,18	58,11
Banyuwangi	2023	89,83	68,37
Bondowoso	2019	91,01	57,77
Bondowoso	2020	89,07	56,80
Bondowoso	2021	88,06	60,70
Bondowoso	2022	89,28	60,96
Bondowoso	2023	87,23	62,11
Sidoarjo	2019	83,20	50,75
Sidoarjo	2020	81,55	52,78
Sidoarjo	2021	82,06	50,86

Jumlah Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin			
Kabupaten/Kota	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
Sidoarjo	2022	89,96	55,76
Sidoarjo	2023	83,17	56,08
Kota Mojekerto	2019	78,85	51,72
Kota Mojekerto	2020	80,98	52,04
Kota Mojekerto	2021	79,26	56,11
Kota Mojekerto	2022	82,51	56,99
Kota Mojekerto	2023	83,87	61,43
Kota Malang	2019	79,96	52,79
Kota Malang	2020	78,21	55,10
Kota Malang	2021	79,74	55,95
Kota Malang	2022	78,04	48,74
Kota Malang	2023	79,85	55,64
Kota Kediri	2019	76,77	53,04
Kota Kediri	2020	76,83	55,35
Kota Kediri	2021	80,24	54,68
Kota Kediri	2022	78,55	61,44
Kota Kediri	2023	83,35	60,37
Kota Madiun	2019	77,32	57,31
Kota Madiun	2020	78,80	59,35
Kota Madiun	2021	75,16	59,31
Kota Madiun	2022	75,94	58,56
Kota Madiun	2023	78,69	60,42
Kota Surabaya	2019	81,79	56,22
Kota Surabaya	2020	81,23	55,35
Kota Surabaya	2021	81,69	53,44
Kota Surabaya	2022	85,07	55,46
Kota Surabaya	2023	80,25	57,61

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 tingkat pengangguran terbuka laki-laki di Bakorwil Provinsi Jawa Timur tingkat pengangguran lebih konsisten tinggi dibandingkan perempuan setiap tahunnya. Rata-rata pengangguran laki-laki berada di kisaran 82%-84%. Sedangkan perempuan 54%-61%. Periode 2020-2021 kedua gender menunjukkan penurunan atau stagnasi dalam tingkat pengangguran. Periode 2023, terjadi lonjakan signifikan pada perempuan dari 54.9% (2022) menjadi 60.6% (2023), menunjukkan potensi dampak ekonomi atau sosial tertentu yang lebih mempengaruhi perempuan. Meskipun laki-laki

memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi, perempuan mengalami fluktuasi lebih besar. Hal ini dapat mencerminkan ketidakstabilan akses kerja perempuan, mungkin karena faktor sosial, budaya atau jenis pekerjaan yang dominan. Secara umum terlihat tren peningkatan di hampir semua kabupaten/kota. Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya konsisten mencatat angka TPT laki-laki yang paling tinggi, sedangkan Kabupaten Trenggalek dan Kota Mojokerto menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih rendah meskipun meningkat. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja di beberapa wilayah belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja laki-laki secara optimal, yang berpotensi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi regional, ketersediaan lapangan pekerjaan.

d. Indeks Pembangunan Manusia di Bakorwil Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.4

Indek Pembangunan Manusia di Bakorwil Provinsi Jawa Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023 (dalam presentase)					
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Trenggalek	69.46	69.74	70.06	71,00	71.73
Kabupaten Malang	70.35	70.36	70.60	71.38	72.16
Kabupaten Banyuwangi	70.6	70.62	71.38	71.94	72.61
Kabupaten Bondowoso	66.09	66.43	66.59	67.31	67.99
Kabupaten Sidoarjo	80.05	80.29	80.65	81.02	81.55
Kota Kediri	78.08	78.23	78.6	79.59	80.44
Kota Malang	81.32	81.45	82.04	82.71	83.39
Kota Mojokerto	77.96	78.04	78.43	79.32	80.07
Kota Madiun	80.88	80.91	81.25	82.01	82.71
Kota Surabaya	82.22	82.23	82.31	82.74	83.45

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 secara umum Indeks Pembangunan Manusia terlihat kenaikan di seluruh kabupaten/kota. Kota Surabaya konsisten memiliki IPM tertinggi menembus angka 84,35 pada tahun 2023. Diikuti oleh Kota Malang dan Kota Madiun yang juga menunjukkan kenaikan signifikan. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi memiliki

IPM yang relatif rendah., meskipun meningkat setiap tahunnya. Kesenjangan nilai IPM antardaerah ini mencerminkan masih adanya perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, diperperluan upaya peningkatan kualitas layanan public serta pemerataan pembangunan infrastruktur agar IPM di Provinsi Jawa Timur dapat meningkat dan lebih rata.

Untuk melihat data yang lebih spesifik, penelitian ini menguji hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tiga klasifikasi yang telah ditentukan menggunakan uji korelasi. Setelah analisis dilakukan, peneliti hanya menampilkan hasil yang menunjukkan korelasi kuat terhadap variabel ketimpangan pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang disajikan memiliki relevansi tinggi dalam menjelaskan dinamika ekonomi yang diteliti.

1) Hubungan Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan IPM Sebagai Variabel Moders Di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.

Tabel 4.5

Output Uji Korelasi Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan

Correlation	Jumlah Penduduk
Prob.	Diploma
Ketimpangan	0.382914
Pendapatan	0.0061
IPM	0.082498
	0.0498

Sumber: Data hasil pengolahan eviws 10, 2025

Berdasarkan hasil uji korelasi pada tabel 4.5 variabel jumlah penduduk menurut pendidikan memiliki nilai p-value sebesar $0.0061 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk menurut pendidikan tingkat diploma memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai correlatioan yang diperoleh bernilai positif sebesar 0.382914 maka dapat diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel yakni searah dengan tingkat keeratan hubungan yang cukup.

Untuk jumlah penduduk lulusan diploma ini memiliki nilai korelasi yang kuat terhadap ketimpangan pendapatan karena keterbatasan dalam penguasaan keterampilan dan pengetahuan. Kurikulum diploma yang hanya lebih focus pada praktik dengan materi yang terbatas dibandingkan dengan pendidikan sarjana membuat lulusan diploma memiliki keahlian yang spesifik namun kurang mendalam. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam mobilitas karir dan akses ke pekerjaan dengan gaji tinggi, terutama di industri perusahaan yang menuntut keahlian kompleks dan inovatif. Akibatnya, lulusan diploma cenderung bekerja pada posisi menengah atau teknis dengan upah yang relative rendah, sehingga berkontribusi pada ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan lulusan sarjana yang memiliki peluang besar untuk mencapai posisi manajerial atau professional.

Selain itu, keterbatasan keterampilan lulusan diploma dalam hal kepemimpinan, manajemen, dan kemampuan analisis juga membatasi peluang mereka untuk naik jabatan. Perusahaan sering kali lebih memilih lulusan sarjana untuk posisi strategis yang memerlukan pemikiran kritis dan pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan segregasi pendapatan dimana lulusan diploma berada di kelompok pendapatan atas.

2) Hubungan Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan IPM Sebagai Variabel Modersi Di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.

Tabel 4.6

Output Uji Korelasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Correlati on Prob.	Jumlah penduduk Lk	Jumlah penduduk Pr	Tingkat Pengangg uran Lk	Tingkat Pengangg uran Pr	Ketimpan gan Pendapat an	IPM
Jumlah pendudu k Lk	1.000000					
Jumlah pendudu k Pr	0.999684 0.0000	1.000000				
Tingkat Pengang guran Lk	0.210742 0.1418	0.209372 0.1445	1.000000			
Tingkat Pengang guran Pr	-0.15777 0.2738	-0.15500 0.2824	0.293661 0.0385	1.000000		
Ketimpa ngan Pendapat an	0.077726 0.5916	0.080258 0.5795	-0.074522 0.0326	-0.15147 0.2937	1.000000	
IPM	-0.07210 0.6187	-0.06909 0.6335	-0.302822 0.0171	-0.17439 0.2258	0.335515 0.0172	1.000000

Sumber: Data hasil pengolahan eviws 10, 2025

Berdasarkan hasil uji korelasi pada tabel 4.6 variabeltingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin memiliki nilai p-value sebesar $0.0326 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin

laki-laki memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai correlation yang diperoleh bernilai negatif sebesar -0.074522, maka bisa disimpulkan bahwa arah hubungan kedua variabel yakni tidak searah dengan tingkat keeratan hubungan yang sedang.

Tingkat pengangguran terbuka pada laki-laki dapat berhubungan signifikan dengan ketimpangan pendapatan dalam rumah tangga. Ketika laki-laki sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama menganggur, sumber penghasilan utama dalam keluarga berkurang, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kondisi ini seringkali memaksa perempuan untuk mencari pekerjaan, termasuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Perubahan peran pencari nafkah ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur keluarga, terutama jika terjadi perbedaan penghasilan yang signifikan antara suami yang menganggur dan istri yang bekerja di luar negeri. Dalam jangka panjang hal ini memicu konflik rumah tangga akibat tekanan ekonomi dan sosial, yang pada beberapa kasus berujung perceraian.

B. Statistik Deskriptif

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Untuk memberikan gambaran analisis deskriptif berikut akan dijelaskan pada tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.7

Hasil Statistik Deskriptif

	Jumlah Penduduk	Tingkat Pengangguran	Ketimpangan Pendapatan	IPM
Mean	11440.78	8259.700	0.361060	7502.239
Median	9576.500	8284.000	0.358000	7851.500
Maximum	41357.00	9101.000	0.423000	8345.000
Minimum	7.089000	5777.000	0.302000	71.94000

Std. Dev.	9366.342	554.0356	0.031270	1211.289
Skewness	1.775303	-1.681792	0.162034	-4.720737
Kurtosis	6.010926	9.079612	2.252474	29.56042
Jarque-Bera	45.15101	100.5737	1.382948	1655.411
Probability	0.000000	0.000000	0.500837	0.000000
Sum	572039.1	412985.0	18.05300	375111.9
Sum Sq. Dev.	4.30E+09	15040818	0.047913	71893863
Observations	50	50	50	50

Sumber: Data hasil pengolahan eviews 10, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 pada variabel ketimpangan pendapatan (Y) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.361060 yang terjadi Bakorwil di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023, nilai tertinggi sebesar 0.423000, lalu nilai terendahnya 0.302000 yang terjadi pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023, denga nilai standar deviasi sebesar 0.31270.

Pada variabel jumlah penduduk menurut pendidikan diploma (X1) nilai rata-rata sebesar 11440.78, nilai tertinggi sebesar 41357.00, yang terjadi pada Bakowil di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023. Lalu nilai terendah sebesar 7.089000 yang terjadi pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023, dengan nilai standar deviasi sebesar 9366.342.

Pada variabel tingkat pengangguran menurut jenis kelamin laki-laki (X2) nilai rata-rata sebesar 8259.700 yang terjjadi pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 lalu nilai standar deviasinya sebesar 554.0356.

Pada variabel IPM (Z) nilai rata-rata sebesar 7502.239, nilai tertinggi sebesar 8345.000 yang terjadi pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023, lalu nilai terendah 71.94000 dengan nilai standar deviasi 1211.289.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Sebelum melakukan pengolahan data, penentuan model terbaik pada estimasi data panel harus dilakukan terlebih dahulu, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM). Teknik yang digunakan adalah Uji Chow untuk memilih antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Sedangkan Uji Hausman untuk memilih antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Serta Uji LM untuk memilih antara model *Common Effect* dan *Random Effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel. Selanjutnya kita pilih persamaan regresi sebagai berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.259045	0.075409	3.435203	0.0013
Jumlah_Penduduk	1.21E-06	4.31E-07	2.798783	0.0075
Tingkat_Pengangguran	3.12E-06	7.62E-06	0.409538	0.6840
IPM	8.32E-06	3.48E-06	2.390510	0.0210
R-squared	0.242389	Mean dependent var		0.361060
Adjusted R-squared	0.192979	S.D. dependent var		0.031270
S.E. of regression	0.028091	Akaike info criterion		-4.230103
Sum squared resid	0.036299	Schwarz criterion		-4.077141
Log likelihood	109.7526	Hannan-Quinn criter.		-4.171854
F-statistic	4.905720	Durbin-Watson stat		1.168632
Prob(F-statistic)	0.004851			

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 10, 2025

Tabel 4.9
Hasil Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.184018	0.086622	2.124372	0.0404
Jumlah_Penduduk	1.41E-06	1.84E-06	0.763000	0.4503
Tingkat_Pengangguran	1.62E-05	8.91E-06	1.817905	0.0772
IPM	3.63E-06	4.15E-06	0.873839	0.3878
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.478342	Mean dependent var	0.361060	
Adjusted R-squared	0.309156	S.D. dependent var	0.031270	
S.E. of regression	0.025991	Akaike info criterion	-4.243262	
Sum squared resid	0.024994	Schwarz criterion	-3.746136	
Log likelihood	119.0815	Hannan-Quinn criter.	-4.053953	
F-statistic	2.827311	Durbin-Watson stat	1.560748	
Prob(F-statistic)	0.007563			

Sumber: Data hasil pengolahan eviews 10, 2025

Tabel 4.10
Hasil Uji Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.244919	0.073247	3.343721	0.0017
Jumlah_Penduduk	1.23E-06	4.68E-07	2.630802	0.0116
Tingkat_Pengangguran	5.48E-06	7.45E-06	0.735636	0.4657
IPM	7.57E-06	3.42E-06	2.214851	0.0318

Effects Specification

	S.D.	Rho	
Cross-section random	0.007433	0.0756	
Idiosyncratic random	0.025991	0.9244	
Weighted Statistics			
R-squared	0.200182	Mean dependent var	0.304181
Adjusted R-squared	0.148020	S.D. dependent var	0.029311
S.E. of regression	0.027055	Sum squared resid	0.033671
F-statistic	3.837697	Durbin-Watson stat	1.214873
Prob(F-statistic)	0.015571		

Sumber: Data hasil pengolahan eviews 10, 2025

C. Statistik Inferensial

Analisis statistik inferensial pada subbab ini digunakan untuk pengujian hipotesis yang sudah dirumuskan, dan sebelum melakukan analisis statistic inferensial terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

1. Analisis Pemilihan Model Terbaik

Dalam analisis model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan *ordinary/pooled least square* (pendekatan kuadrat terkecil), *fixed effect* (pendekatan efek tetap), dan *random effect* (pendekatan efek acak). Dari ketiga model tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan hasil terbaik yang akan digunakan dalam analisis. Maka dalam penelitian itu untuk mengetahui model terbaik yang digunakan dalam menganalisis apakah model *pooled least square*, *fixed effect*, atau *random effect*. Maka perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu menggunakan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier (LM). Adapun hasil uji statistiknya, sebagai berikut.

a. Uji Chow

Dalam uji chow diestimasikan menggunakan efek spesifikasi fixed. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *fixed effect* atau *common effect*. Dengan kriteria hipotesis sebagai berikut.

H0 :Model CEM lebih baik dibandingkan model FEM

H1 :Model FEM lebih baik dibandingkan model CEM

Keputusan apabila nilai *chi square* < 0,05 maka H0 ditolak, sehingga model menggunakan *fixed effect*. Hasil dari estimasi menggunakan effect spesifikasi fixed, sebagai berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.859516	(9,37)	0.0898
Cross-section Chi-square	18.657930	9	0.0283

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 10, 2025

Berdasarkan hasil data diatas, diketahui probability chi-square sebesar 0.0283 < 0.05 sehingga H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model CEM.

b. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah *random effect model* (REM) lebih baik dari *fixed effect model* (FEM). Dengan kriteria hipotesis sebagai berikut.

H0 :Model REM lebih baik dibandingkan model FEM

H1 :Model FEM lebih baik dibandingkan model REM

Keputusan apabila probability *chi square* lebih besar dari hasil estimasi maka menggunakan efek spesifikasi random.

Tabel 4.12
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.844581	3	0.0770

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 10, 2025

Hasil olah data diatas menghasilkan probabilitas chi-square sebesar 0,0770 > 0.05 maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model REM lebih baik dibandingkan model FEM.

c. Uji Breusch-Pagan/ LM

Uji LM dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah model *Random Effect Model* (REM) lebih baik dari *Common Effect Model* (CEM). Dengan criteria hipotesis sebagai berikut.

H0 : Model CEM lebih baik dibandingkan model REM

H1 : Model REM lebih baik dibandingkan model CEM

Keputusan apabila probability lebih besar dari hasil estimasi maka menggunakan efek spesifikasi common effect

Tabel 4.13
Uji LM

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.746555 (0.1863)	0.040609 (0.8403)	1.787164 (0.1813)
Honda	1.321573 (0.0932)	-0.201517 --	0.791999 (0.2142)
King-Wu	1.321573	-0.201517	0.565404

	(0.0932)	--	(0.2859)
Standardized Honda	2.035246 (0.0209)	0.133677 (0.4468)	-1.860056 --
Standardized King- Wu	2.035246 (0.0209)	0.133677 (0.4468)	-1.961084 --
Gourierieux, et al.*	--	--	1.746555 (≥ 0.10)

Sumber: Data hasil pengolahan eviews 10, 2025

Hasil olah data diatas menghasilkan probabilitas sebesar $0.8163 > 0.05$ maka H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model CEM lebih baik dibandingkan model REM.

2. Uji Asumsi klasik

Model yang terpilih adalah CEM, maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi kalsik yang digunakan adalah multikolinieritas dan heterokedastisitas.

a. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan keadaan dimana model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen (variabel bebas). Kriteria pengujiannya adalah:

Apabila nilai $r > 0,85$. Jadi, bila korelasi antarvariabel $< 0,85$ dinyatakan tidak adanya multikolinieritas. Jika nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*) > 10 maka dinyatakan terjadinya multikolinieritas.

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinieritas

Jumlah_PendTingkat_Pen			
	uduk	gangguran	IPM
Jumlah_Pen			
uduk	1.000000	-0.088998	0.082498
Tingkat_Pen			
gangguran	-0.088998	1.000000	-0.302822
IPM	0.082498	-0.302822	1.000000

Sumber: data hasil eviws 10, 2025

Berdasarkan hasil dari tabel 4.14 dapat dilihat koefisien korelasi jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma dan tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki sebesar $-0.088998 < 0.85$, koefisien korelasi jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma dan IPM sebesar $0.082498 < 0.85$, koefisien korelasi tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki dan IPM sebesar $-0.302822 < 0.85$. maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antarvariabel indepeneden yang lebih dari 0.85 sehingga dapat disimpulkan terbebas multikolinieritas atau lolos uji multikolinieritas.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain atau adanya hubungan antar nilai yang diprediksi dengan studentized delete residual nilai. Adapun kriteria dari uji heterokedastisitas sebagai berikut.

Jika nilai sig. $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas. Jika nilai sig. $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas

Tabel 4.15
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.060601	0.040095	1.511433	0.1375
Jumlah_Penduduk	2.09E-07	2.29E-07	0.910353	0.3674
Tingkat_Pengangguran	-4.07E-06	4.05E-06	-1.003802	0.3207
IPM	-9.04E-07	1.85E-06	-0.488205	0.6277

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 10, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel 4.15 dapat diinterpretasikan bahwa nilai probability jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma, tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki, dan IPM masing-masing sebesar 0.3674, 0.3207, 0.6277. lebih besar dari 0.05 yang artinya terbebas heterokedastisitas atau lolos uji heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis dan Interpretasi

Berikut adalah hasil uji hipotesis;

a. Uji Parsial (Uji T)

Bila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel (jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, begitu sebaliknya. Hasil uji t menunjukkan;

Tabel 4.16
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.259045	0.075409	3.435203	0.0013
Jumlah_Penduduk	1.21E-06	4.31E-07	2.798783	0.0075
Tingkat_Pengangguran	3.12E-06	7.62E-06	0.409538	0.6840

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 10, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.16 diatas diketahui bahwa:

1. Nilai probabilitas untuk jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma 0.0075 dan nilai probabilitas hitung lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0.05 dan nilai *coefficient* sebesar 1.21E-06 (arah positif), artinya jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Nilai probabilitas untuk variabel tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki sebesar 0.6840 dan nilai probabilitas hitung lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0.05 dan nilai *coefficient* sebesar 3.12E-06 (arah positif), artinya tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Bila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel (jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, begitu sebaliknya. Hasil uji F menunjukkan;

Tabel 4.17

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan	
Prob (F-statistic)	0.004851

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 10, 2025

Dari tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai (F-statistic) adalah sebesar 0,004851. Dimana nilai F-statistic ini lebih besar dari 0.05 ($0.004851 < 0.05$), untuk itu dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma, dan tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut hasil uji koefisien determinasi (R^2);

Tabel 4.18
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.242389	Mean dependent var	0.361060
Adjusted R-squared	0.192979	S.D. dependent var	0.031270
S.E. of regression	0.028091	Akaike info criterion	-4.230103
Sum squared resid	0.036299	Schwarz criterion	-4.077141
Log likelihood	109.7526	Hannan-Quinn criter.	-4.171854
F-statistic	4.905720	Durbin-Watson stat	1.168632
Prob(F-statistic)	0.004851		

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 10, 2025

Dari tabel 4.18 nilai *R-squared* sebesar $0.242389 \times 100\%$ atau setara dengan 24,23%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yang terdiri dari jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma dan tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki mampu menjelaskan ketimpangan pendapatan pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 sebesar 24,23%. Sedangkan sisanya 75.77% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

d. Uji Moderasi

Pengujian menggunakan metode MRA atau *ModeratedRegression Analysis* merupakan analisis regresi yang menggunakan variabel moderasi, yakni variabel Indeks Pembangunan Manusia. Uji *Moderated Regression Analysis* ini dialkuka dengan membuat regresi interaksi, tetapi variabel moderasi tidak berfungsi sebagai variabel independen. Apabila hasil uji beta yang dihasilkan dari interaksi Z X terhadap Y, menghasilkan nilai negative maka variabel moderasi Z memperlemah pengaruh variable X terhadap variabel Y, meskipun memperlemah tetapi pengaruhnya tidak signifikan, begitupun sebaliknya. Jika beta menghasilkan nilai positif, maka variabel moderasi Z memperkuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut hasil uji variabel moderasi.

Tabel 4.19
Hasil Uji Moderasi (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.226615	0.068087	3.328343	0.0018
Jumlah_Penduduk	-2.25E-07	6.13E-07	-0.366548	0.7157
Tingkat_Pengangguran	-7.70E-06	8.13E-06	-0.946930	0.3488
IPM	3.71E-06	3.55E-06	1.045044	0.3017
Jumlah_Penduduk_IPM	2.25E-08	8.37E-09	2.691590	0.0100
Tingkat_Pengangguran_IPM	2.45E-05	1.01E-05	2.416673	0.0199
R-squared	0.429320	Mean dependent var	0.361060	
Adjusted R-squared	0.364470	S.D. dependent var	0.031270	
S.E. of regression	0.024928	Akaike info criterion	-4.433445	
Sum squared resid	0.027343	Schwarz criterion	-4.204002	
Log likelihood	116.8361	Hannan-Quinn criter.	-4.346072	
F-statistic	6.620203	Durbin-Watson stat	1.144297	
Prob(F-statistic)	0.000113			

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 10, 2025

$Y = 0.226615 - 2.25E-07 \text{ Jumlah Penduduk menurut pendidikan lulusan diploma} - 7.70E-06 \text{ Tingkat Pengangguran Terbuka menurut jenis kelamin laki-laki} + 3.71E-06 \text{ IPM} + 2.25E-08 \text{ Jumlah Penduduk_IPM} + 2.45E-05 \text{ Tingkat Pengangguran Terbuka_IPM} + e$

Pada tabel 4.18 diketahui bahwa:

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan yang dimoderasi IPM

Nilai probabilitas $0.0100 < 0.05$ dan menunjukkan nilai koefisien sebesar $2.25E-08$ dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu memoderasi pengaruh antara jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan

bahwa tinggi rendahnya IPM dapat memperkuat atau memperlemah variabel jumlah penduduk lulusan diploma terhadap penurunan maupun peningkatan ketimpangan pendapatan.

2. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan yang dimoderasi IPM

Nilai probabilitas $0.0199 < 0.05$ dan menunjukkan nilai koefisien sebesar $2.45E-05$ dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu memoderasi pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya IPM dapat memperkuat atau memperlemah variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap penurunan maupun peningkatan ketimpangan pendapatan.

3. Pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan yang dimoderasi IPM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai prob (F-statistic) $0.000113 < 0.05$.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai probabilitas $0.3017 > 0.05$.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini kajian *pertama* adalah pembahasan uji analisis pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan, *kedua* analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan, *ketiga* analisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan, *keempat* analisis pengaruh jumlah penduduk dengan IPM sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, *kelima* analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka dengan IPM sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, *keenam* analisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat

pengangguran terbuka dengan IPM sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, *ketujuh* analisis IPM sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Supaya pembahasan lebih mudah dipahami, peneliti menyajikan pembahasan dengan prosedur terbalik dari susunan bab, yakni pertama menyampaikan hasil penelitian terlebih dahulu, selanjutnya mengkritisi teori dasar yang digunakan apakah sesuai dengan hasil penelitian atau tidak, terakhir justifikasi dari hasil penelitian dan teori, dengan pendekatan nilai keislaman.

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan (H1)

Penelitian ini dilakukan pada jumlah penduduk di Bakorwil Provinsi Jawa Timur mulai dari tingkat pendidikan SD-S1. Untuk memperoleh data penelitian yang relevan dengan topic penelitian yang diambil, maka penulis mengambil data sekunder di laman Badan Pusat Statistik (BPS) Di Provinsi Jawa Timur.

Variabel pertama yakni jumlah penduduk yang terlihat adanya variasi yang signifikan antar kabupaten/kota. Kota Malang dan Kota Surabaya memiliki jumlah lulusan diploma tertinggi secara konsisten, dengan jumlah Kota Malang mencapai 34.565 orang dan Kota Surabaya 16.550 orang pada tahun 2023. Sementara itu, Kota Mojokerto memiliki jumlah paling rendah dengan hanya 713 orang pada tahun yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya jumlah penduduk menurut pendidikan akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. setelah melakukan uji korelasi yang memiliki nilai korelasi paling kuat ialah jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma.

Berdasarkan hasil uji *Common Effect Model* (CEM) pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dibuktikan dengan hasil olah data nilai probabilitas sebesar 0.0075 lebih besar 0.05 dan nilai koefisien sebesar 1.21E-06 atau 1.21% artinya bahwa variabel jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma naik 1% maka ketimpangan pendapatan pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur akan

mengalami kenaikan 1.21% ataupun sebaliknya. Jika jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma turun 1% maka ketimpangan pendapatan pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 1.21%.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Sjafrizal dimana ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya perbedaan kondisi demografis, kondisi yang dimaksud yakni perbedaan dalam tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan.¹⁴⁶ Jumlah penduduk yang tinggi di suatu wilayah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan. permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk di suatu wilayah tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada ketimpangan pendapatan.

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Jaclyn Butler, Grace A. Wildermut, Brian C. Thiede, David L. Brown (2020) dengan judul *“Population Change and Income Inequality in Rural America”* Menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Namun, ini studi sebagian besar dimotivasi oleh teori urbanisasi dan pertumbuhan di wilayah metropolitan, dan tidak secara eksplisit menguji perbedaan antara dampak pertumbuhan dan penurunan populasi. Mengkaji dampak kedua bentuk perubahan populasi terhadap ketimpangan pendapatan adalah hal yang penting di wilayah pedesaan di Amerika Serikat, yang sebagian besarnya mengalami hal ini penurunan populasi.¹⁴⁷

Selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Seokchae Hwang, Chung Choe, dan Koangsung Choi (2021) yang berjudul *“Population and Income Inequality”* yang menyimpulkan bahwa dampak penuaan populasi atau jumlah penduduk secara keseluruhan apabila berkurang maka berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dalam rumah tangga. Artinya pendapatan rumah meningkat dan jumlah penduduk berkurang hal

¹⁴⁶Sjafrizal, “Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi,” 288–89.

¹⁴⁷Butler dkk., “Population Change and Income Inequality in Rural America,” 889–991.

tersebut berdampak pada distribusi pendapatan dalam suatu wilayah merata atau tidak terjadi ketimpangan pendapatan.¹⁴⁸ Dan penelitian membantah penelitian yang dilakukan oleh Megantoro, Hanafi, Ritonggo, dan Wijaya (2023) yang berjudul “*The Influence Of Population, Open Unemployment Rates and IPM On Income Inequality In Lampung Province*” yang menyimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh positif dan signifikan antara jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, hipotesis H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima yang menyatakan adanya pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 diterima.

Adanya perbedaan yang signifikan dalam kondisi demografis antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan. Kondisi demografis yang dimaksud termasuk perbedaan dalam tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, dan tingkah laku, kebiasaan, dan etos kerja masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, kondisi demografis yang buruk pada suatu wilayah akan menyebabkan produktivitas kerja yang lebih rendah, yang menghambat penanaman modal dan menghambat pertumbuhan ekonomi.¹⁴⁹ Ketimpangan pendapatan sering kali dipengaruhi oleh jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, termasuk lulusan diploma. Lulusan diploma umumnya memperoleh keterampilan teknis spesifik yang membuat mereka lebih siap kerja dibandingkan lulusan SMA, tetapi tidak sekompetitif lulusan sarjana di sektor yang menawarkan gaji tinggi. Akibatnya mereka menempati posisi kerja

¹⁴⁸Hwang, Choe, dan Choi, “Population ageing and income inequality,” 34.

¹⁴⁹Puti Andiny, Nursani Adelida, dan Rahma Meutia, “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur Dan Kota Langsa),” *Jurnal Samudera Ekonomika* 3, no. 1 (2019): 47-56.

dengan pendapatan yang stabil dan namun tidak tinggi, sehingga menciptakan celah pendapatan antara berbagai jenjang pendidikan.¹⁵⁰

Maka dari itu ketimpangan pendapatan di suatu wilayah seringkali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Jumlah lulusan diploma yang berada diantara pendidikan menengah dan sarjana, memiliki peran penting dalam struktur tenaga kerja. Jika jumlah lulusan diploma lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA atau sarjana, maka distribusi pendapatan bisa semakin timpang. Lulusan diploma umumnya memiliki ketrampilan lebih dibandingkan lulusan SMA, tetapi daya saing mereka dalam dunia kerja sering lebih rendah dibandingkan lulusan sarjana, sehingga penghasilan mereka berada di tengah-tengah. Ketidakseimbangan jumlah lulusan diploma dapat memperlebar kesenjangan antara pekerja berpendapatan rendah dan tinggi. Karena posisi lulusan diploma kini berada pada tengah-tengah dalam struktur tenaga kerja. Lulusan SD dan SMP cenderung bekerja di sektor informal dengan upah rendah, sementara lulusan sarjana memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Lulusan diploma, yang seharusnya mengisi pekerjaan dengan penghasilan menengah, sering kali mengalami kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan industri. Jika jumlah mereka terlalu sedikit atau terlalu banyak, ketimpangan pendapatan menjadi lebih tajam karena tidak ada keseimbangan dalam distribusi upah di tengah spektrum ekonomi.

Ketimpangan pendapatan terjadi ketika sektor industri yang membutuhkan tenaga diploma tidak berkembang seimbang dengan sektor yang membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan lebih rendah atau lebih tinggi. Jika jumlah lulusan diploma terlalu sedikit, maka posisi pekerjaan dengan penghasilan menengah akan sulit terisi, menyebabkan jurang pemisah antara pekerja bergaji rendah dan tinggi semakin lebar. Sebaliknya, jika lulusan diploma terlalu banyak tetapi industri yang menyerap tidak memadai, mereka

¹⁵⁰Psacharopoulos dan Patrinos, "Returns to Investment in education: a decennial review of the global literature.," *Education Economics* 26, no. 5 (2018): 445–58, <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>.

akan bersaing dengan lulusan SMA untuk pekerjaan dengan upah lebih rendah sehingga pendapatan mereka tidak optimal.

Maka dari itu untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan ini, pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi di tingkat diploma agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan diploma harus diperbarui secara berkala dengan melibatkan pelaku industri agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap kerja. Selain itu, program magang dan kerja sama dengan perusahaan harus ditingkatkan lagi, sehingga lulusan diploma dapat lebih mudah terserap di dunia kerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Selain itu kebijakan pendidikan, pemerintah juga perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi lulusan diploma dengan mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa. Insentif pajak dan bantuan bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja diploma bisa menjadi solusi efektif, pemerintah juga dapat mendorong wirausaha berbasis keterampilan dengan memberikan akses permodalan dan pelatihan bisnis bagi lulusan diploma yang ingin berwirausaha. Dengan demikian, mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Secara keseluruhan, jumlah lulusan diploma yang tidak seimbang dengan kebutuhan pasar kerja dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan diploma serta pengembangannya di industri yang mampu menyerap tenaga kerja ini sangat penting. Dengan langkah-langkah yang tepat, lulusan diploma dapat memiliki peluang kerja yang lebih baik, sehingga dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam perspektif Islam, lebih penting untuk memiliki keturunan yang berkualitas daripada kuantitas (jumlah) banyak. Sebab pertumbuhan penduduk memang sebuah permasalahan dalam jangka panjang dimana peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan dan tidak produktif dengan baik secara individu maka dapat mengganggu

pembangunan ekonomi.¹⁵¹ Menurut Putong, jika pertumbuhan penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan tingkat produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi menurun dan hal tersebut berdampak pada kualitas individu menurun dari segi pendidikan, kesejahteraan. Apabila pertumbuhan penduduk tersebut diikuti dengan tinggi produktivitas individu maka pertumbuhan ekonomi juga tinggi, dan individu tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan tingkat pendidikan berkualitas dan mampu memperbaiki mutu dan cara hidup individu. Dalam Dalam satu riwayat, Nabi mengatakan bahwa dia bangga dengan banyak orang (ana mukasirun bikum al-anbiya). Hadis ini harus tetap dibaca dengan kualitas. Memiliki banyak uang tetapi kualitas rendah melemahkan dan merendahkan. Saat ini, kita melihat bahwa banyaknya orang Islam di negeri ini tidak membuat kita bangga sebagai orang Islam. Banyak tidak membantu membangun peradaban yang damai dan sejahtera. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ رِيَةً ذِئْبًا ضِعْفًا عَلَيْهِمْ خَائِفُوا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".*

Pekerjaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah konsekuensi logis dari posisinya sebagai khalifah. Manusia dilengkapi dengan "aql, qalb, hawa, dan nabs", yang memberinya kemampuan untuk memaksimalkan potensinya. Selain itu, Allah mengajarkan kepada manusia "Al-Asma", atau tanda-tanda, yang memberinya pengetahuan tentang apa yang dapat digunakan untuk mendukung peran kekhalifahannya. Di atas segalanya, manusia juga diberikan kebebasan untuk mengelola bumi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebebasan ini juga memungkinkan manusia untuk memilih khalifah, yang memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan

¹⁵¹ Susiatun, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016," 38.

prinsip ekonomi syariah, termasuk kepemilikan berganda, kebebasan untuk bertindak, dan keadilan sosial. Orang yang memiliki kemampuan berpikir memiliki kemampuan untuk membuat peradaban yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia.

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan (H2)

Penelitian ini dilakukan pada tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil Provinsi Jawa Timur dengan kategori jenis kelamin. Untuk memperoleh data penelitian yang relevan dengan topic penelitian yang diambil, maka penulis mengambil data sekunder di laman Badan Pusat Statistik (BPS) Di Provinsi Jawa Timur.

Variabel kedua tingkat pengangguran terbuka terlihat tingkat pengangguran terbuka laki-laki di Bakorwil Provinsi Jawa Timur tingkat pengangguran lebih konsisten tinggi dibandingkan perempuan setiap tahunnya. Rata-rata pengangguran laki-laki berada di kisaran 82%-84%. Sedangkan perempuan 54%-61%. Periode 2020-2021 kedua gender menunjukkan penurunan atau stagnasi dalam tingkat pengangguran. Periode 2023, terjadi lonjakan signifikan pada perempuan dari 54.9% (2022) menjadi 60.6% (2023), menunjukkan potensi dampak ekonomi atau sosial tertentu yang lebih mempengaruhi perempuan. Meskipun laki-laki memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi, perempuan mengalami fluktuasi lebih besar. Hal ini dapat mencerminkan ketidakstabilan akses kerja perempuan, mungkin karena faktor sosial, budaya atau jenis pekerjaan yang dominan. Secara umum terlihat tren peningkatan di hampir semua kabupaten/kota. Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya konsisten mencatat angka TPT laki-laki yang paling tinggi, sedangkan Kabupaten Trenggalek dan Kota Mojokerto menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih rendah meskipun meningkat. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja di beberapa wilayah belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja laki-laki secara optimal, yang berpotensi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi regional, ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi

dapat dibuatkan kesimpulan bahwa data yang dikumpulkan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan yang memiliki hubungan korelasi paling kuat terhadap ketimpangan pendapatan adalah tingkat pengangguran terbuka berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan perhitungan analisis regresi data panel yang diperoleh dari pemodelan yang terbaik yakni *Common Effect Model* pada tabel 4.8 yang telah dijalankan menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0.6840 > 0.05$ artinya tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023. Dan hasil dari koefisien sebesar $3.12E-06$ atau 3.12% artinya setiap kenaikan 1% tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki akan kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 3.12% begitupun sebaliknya. Jika tingkat pengangguran terbuka turun 1% maka ketimpangan pendapatan akan mengalami peningkatan sebesar 3.12%. Sehingga H_{02} diterima sedangkan H_{a2} ditolak.

Tingkat pengangguran mengacu pada presentase angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan dalam periode tertentu. Ini merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu wilayah, karena mencerminkan sejauh mana penduduk usia produktif dapat terserap oleh pasar kerja. Menurut teori ekonomi makro, pengangguran yang tinggi menunjukkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya manusia, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Menurut Sjafrizal, khususnya pengangguran terbuka dan setengah menganggur, berkontribusi besar terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah dan kelompok sosial karena ketidakmerataan kesempatan kerja.¹⁵² Hasil dari estimasi output terjadi ketidak sejalan dengan teori Sjafrizal. Namun terdapat temuan empiris beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pengangguran tidak selalu berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, yang berlawanan dengan pandangan Sjafrizal. Penelitian yang dilakukan oleh Ofori-Aberbrese, menunjukkan bahwa

¹⁵²Sjafrizal, "Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi."

beberapa berkembang, ketimpangan pendapatan lebih dipengaruhi oleh faktor structural seperti kualitas pendidikan, akses terhadap modal, dan distribusi kekayaan, bukan semata oleh tingkat pengangguran. Dalam konteks ini, meskipun pengangguran tinggi, jika sebagian besar penduduk berada dalam sektor informal dengan pendapatan yang relative homogen, maka ketimpangan bisa tetap rendah.¹⁵³

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Sjafrizal ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapat salah satunya kondisi demografis yang dijelaskan dalam teori tersebut bahwa kondisi demografis yang dimaksud meliputi perbedaan dalam tingkat pertumbuhan kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, serta kondisi ketenagakerjaan. Karena dalam ilmu demografis tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan masuk dalam angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dan kondisi ketenagakerjaan ini berhubungan dengan pengangguran dan tenaga kerja. Melihat focus dari teori tersebut ternyata kondisi demografis yang terbatas pada pertumbuhan penduduk, bukan kondisi ketenagakerjaan. Sjafrizal berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh faktor demografis, namun lebih pada aspek jumlah dan pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka lebih berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja dan efisiensi pasar tenaga kerja, yang tidak secara langsung dibahas dalam teori tersebut. Hal ini menyebabkan tidak adanya keterkaitan langsung antara pengangguran terbuka dengan ketimpangan pendapatan.

Menurut Sukirno pengangguran, adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sukirno, bahwa tingkat pengangguran yang lebih

¹⁵³Ofori Abebrese, Baah Boateng, dan Adjie, "Unemployment and Income Inequality in Sub-Saharan Africa: Does education matter?," *International Journal of Social Economics* 44, no. 11 (2017): 1422–38, <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2016-0161>.

tinggi menyebabkan lebih banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pendapatan karena tingkat gaji tenaga kerja berpendapatan rendah akan menurun, yang akan berakibat pada peningkatan ketimpangan pendapatan.¹⁵⁴ Tingkat pengangguran terbuka sebenarnya dapat dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan meski dalam teori Sjafrizal kondisi demografis yang dibahas lebih focus pada pertumbuhan penduduk. Ketika banyak tenaga kerja yang menagnggur, distribusi pendapatan menjadi tidak merata karena hanya sebagian penduduk yang memiliki akses terhadap sumber penghasilan, sementara yang menagnggur tidak memperoleh pendapatan. Hal ini memperlebar kesenjangan antara kelompok yang bekerja dan yang tidak bekerja. Meskipun teori Sjafrizal tidak secara eksplisit menghubungkan pengangguran dengan ketimpangan pendapatan, namun efek tidak langsungnya terlihat melalui pengaruh pengangguran terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Megantoro, Hanafi, Ritonggo, dan Wijaya (2023) yang berjudul “*The Influence Of Population, Open Unemployment Rates and IPM On Income Inequality In Lampung Province*” yang menyimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.¹⁵⁵

Tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki sering kali dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena laki-laki cenderung memiliki akses yang lebih luas ke berbagai jenis pekerjaan dibandingkan perempuan. Meskipun tingkat pengangguran laki-laki bisa tinggi, banyak dari mereka yang akhirnya beralih ke sektor informal atau pekerjaan serabutan untuk tetap mendapatkan penghasilan. Hal ini membuat dampak ketimpangan pendapatan dari pengangguran laki-laki tidak sebesar

¹⁵⁴Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 328–29.

¹⁵⁵Ardi Megantoro, Syafiq Mahmadah Hanafi, dan Anas Habibi Ritonga, “The Influence Of Population, Open Unemployment Rates and IPM On Income Inequality In Lampung Province,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 11, no. 2 (2023): 23.

pengangguran perempuan, yang sering menghadapi hambatan lebih besar dalam mencari pekerjaan karena faktor sosial, budaya dan beban domestik.

Selain itu, laki-laki yang menganggur biasanya memiliki mobilitas kerja yang lebih tinggi, baik secara geografis maupun sektor pekerjaan. Mereka lebih fleksibel dalam mencari pekerjaan baru, termasuk di bidang yang tidak selalu sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Banyak juga yang beralih ke pekerjaan lepas atau wirausaha kecil menengah untuk memperoleh pendapatan. Dengan demikian, meskipun angka pengangguran laki-laki tinggi, distribusi pendapatan tidak terlalu terpengaruh karena masih ada banyak cara bagi mereka untuk tetap produktif secara ekonomi. Namun, jika tingkat pengangguran laki-laki terus meningkat secara signifikan, dampaknya tetap bisa dirasakan dalam ketimpangan pendapatan jangka panjang. Ini terutama terjadi jika sektor industri dan manufaktur, yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, mengalami stagnasi atau penurunan. Jika peluang kerja laki-laki semakin terbatas, mereka akan bersaing lebih ketat dengan tenaga kerja perempuan atau kelompok lainnya yang dapat menyebabkan upah di sektor tertentu menurun dan meningkatkan kesenjangan pendapatan antar kelompok sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja laki-laki secara optimal. Salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah mempercepat pertumbuhan sektor industri berbasis teknologi dan manufaktur, yang secara tradisional banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Selain itu, program pelatihan dan reskilling harus diperkuat agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan pasar kerja, termasuk dalam sektor digital dan ekonomi kreatif yang semakin berkembang. Selain itu pemerintah juga perlu memperkuat dukungan bagi wirausaha dan usaha mikro, kecil, menengah agar lebih banyak laki-laki yang beralih menjadi pelaku usaha mandiri, insentif pajak, akses permodalan, serta pelatihan kewirausahaan bisa menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran di kalangan laki-laki. Dengan kebijakan yang tepat, tingkat pengangguran laki-laki bisa ditekan, sehingga tidak menimbulkan

dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

Maka dari itu dalam studi ekonomi Islam, Allah Swt. dan para rasulnya mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka harus bekerja, karena dengan bekerja mereka akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Islam juga mengatakan kepada orang-orang untuk tidak berdiam diri atau enggan bekerja.¹⁵⁶ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*

Maksud ayat diatas bahwa orang diminta untuk bekerja secara umum, yaitu untuk kedua kehidupan dunia dan akhirat. Allah SWT akan memberikan balasan yang tepat untuk setiap tindakan ini. Baik akan dibalas dengan kebaikan, dan buruk akan dibalas dengan keburukan. Islam mendorong umatnya untuk menghasilkan dan mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi dalam segala bentuk, seperti perdagangan, industri, pertanian, dan lainnya. Islam memerintahkan untuk bekerja, tetapi dengan cara yang lebih baik dan profesional.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Secara Simultan Terhadap Ketimpangan Pendapatan (H3)

Berdasarkan hasil terbaik yakni *Common Effect Model* (CEM) pada tabel 4.8 menunjukkan hasil bahwa variabel jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma dan tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki dan IPM secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Bakorwil pada Provinsi Jawa Timur periode 2019-

¹⁵⁶Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 45.

2023, dibuktikan dengan hasil nilai (F-statistic) sebesar 0,004851. Dimana nilai F-statistik ini lebih besar dari 0.05 ($0.004851 < 0.05$). Sehingga H_{03} ditolak sedangkan H_{a3} diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antar variabel jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma dan tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki terhadap ketimpangan pendapatan pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 secara simultan.

Nilai Koefisien determinan menunjukkan nilai R-Squared sebesar 0.242389 atau 24,23% yang artinya bahwa variabel jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma dan tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada Bakorwil di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023 sebesar 24.23% sedangkan 75.77% dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Megantoro, Hanafi, Ritonga, dan Wijaya (2023) dengan judul penelitian *“The Influence Of Population, Open Unemployment Rates and IPM On Income Inequality In Lampung Province”* dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan distribusi ekonomi di suatu wilayah maupun Negara. Faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan antara lain tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran. Pendidikan diploma memiliki peran penting dalam meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, namun jika lulusan diploma tidak terserap dengan baik di pasar kerja, maka tingkat pengangguran terbuka pada kelompok ini dapat meningkat, terutama bagi laki-laki yang cenderung memiliki ekspektasi gaji yang lebih tinggi dan beban ekonomi lebih besar. Kondisi ini dapat menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat.

Dari perspektif pendidikan diploma, individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Namun, jika

jumlah lulusan diploma meningkat tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, maka pengangguran di kalangan mereka juga bertambah. Bagi laki-laki, hal ini dapat menjadi lebih kompleks karena adanya norma sosial yang menganggap mereka sebagai pencari nafkah utama. Jika tingkat pengangguran terbuka tinggi di kelompok ini, maka disparitas pendapatan antarindividu semakin tajam.

Pemerintah juga perlu menciptakan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja bagi lulusan diploma seperti memperkuat sektor industri kreatif, digital, dan wirausaha. Selain itu peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri menjadi penting agar lulusan diploma lebih mudah terserap di dunia kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan akibat dari pengangguran.

Ketimpangan pendapatan menunjukkan terjadi pemusatan kekayaan di tengah masyarakat yang akan menimbulkan masalah kemiskinan. Menurut Sopal, orang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar bagi pembangunan manusia. Jika kekayaan didistribusikan secara tidak merata dan tidak adil dalam ekonomi Islam, akan ada kesenjangan ekonomi, dengan orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin.¹⁵⁷ Di dalam firman Allah SWT banyak dijelaskan mengenai perintah menginfakkan harta dan memberi makan orang kafir, miskin dan yang tidak mampu. Seperti halnya dalam Al-Qur'an; Q.S Al Hajj ayat 28, Q.S Al-Baqarah ayat 177, 184, 215, Q.S al Insan ayat 8. Dalam ayat telah disebutkan bahwa disetiap harta kekayaan terdapat hak bagi orang miskin. Firman Allah Swt Dalam Q.S Ad-Dzariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

P O N O R O G O

¹⁵⁷Romi Sopal, Amiruddin, dan Abdul Rahman, "Studi Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur," *Icor: Journal of Regional Economics* 2, no. 2 (t.t.): 54.

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian”¹⁵⁸ (Q.S Ad-Dzariyat/51;19)

Dalam konteks ini, konsep islam tentang “adl” keadilan, umat Islam didorong untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata, sehingga tidak ada seorangpun yang tertinggal atau terpingirkan. Dari sudut pandang Islam, ketimpangan pendapatan dipandang sebagai masalah penting yang tidak hanya mempengaruhi individu melainkan juga masyarakat secara keseluruhan. Al-Quran menyatakan, dan orang-orang yang tamak akan kehidupan dunia, akan melupakan kehidupan akhirat.

4. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan IPM Sebagai Variabel Moderasi (H4)

Berdasarkan estimasi model *common effect* dengan pengujian moderasi (MRA) pada tabel 4.19 diketahui bahwasannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berinteraksi dengan jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma dan berhubungan signifikan dengan ketimpangan pendapatan, maka variabel IPM adalah variabel moderasi potensial quasi, disimpulkan bahwa tinggi rendahnya IPM berpengaruh pada jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga H_{04} ditolak, sedangkan H_{a4} diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM bukan merupakan faktor moderator pada hubungan antara jumlah penduduk dan ketimpangan pendapatan di Bakorwil Provinsi Jawa Timur.

Hasil data Indeks Pembangunan Manusia terlihat kenaikan di seluruh kabupaten/kota. Kota Surabaya konsisten memiliki IPM tertinggi menembus angka 83.45 pada tahun 2023. Diikuti oleh Kota Malang dan Kota Madiun yang juga menunjukkan kenaikan signifikan. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi memiliki IPM yang relatif rendah, meskipun meningkat setiap tahunnya. Untuk rata-rata IPM senilai 75.23 dan nilai maksimum dari IPM senilai 83.45 jadi dapat dibuat kesimpulan bahwa tinggi rendahnya nilai IPM akan berpengaruh terhadap

¹⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2011.

jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma terhadap ketimpangan pendapatan. Walaupun nilai IPM ini akan tercemin dan melihat perubahannya dalam jangka panjang. Sebab pendidikan merupakan investasi di masa yang akan datang.

Teori human capital menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi dalam sumber daya manusia yang akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan di masa yang akan datang. Dalam konteks Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, seperti Indonesia peningkatan kualitas pendidikan menjadi faktor kunci dalam mengubah tantangan demografis menjadi keuntungan ekonomi.¹⁵⁹

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori (modal) *human capital* yang dikemukakan oleh Becker. Dalam teori human capital menjelaskan bahwa orang yang mempunyai tingkat IPM yang tinggi dalam hal ini pendidikan, maka akan mempunyai pekerjaan dan gaji yang tinggi dibandingkan orang yang mempunyai pendidikan rendah. Jika gaji mencerminkan sebuah produktivitas, maka akan semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi akan mempengaruhi tingginya produktivitas yang dihasilkan atau hasil ekonominya semakin banyak.¹⁶⁰ Dalam analisis hubungan antara human capital dan jumlah penduduk bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak selalu berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ada beberapa faktor yang memadai: Kualitas dengan Kuantitas, pertumbuhan jumlah penduduk tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat menyebabkan masalah seperti pengangguran tinggi rendahnya produktivitas. Dengan kata lain jumlah penduduk yang besar tidak menjamin adanya tenaga kerja yang kompeten.

Peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan tekanan pada sumber daya yang ada seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Jika tidak diimbangi dengan investasi dalam *human capital*, pertumbuhan penduduk dapat berujung

¹⁵⁹Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis* (Chicago: University of Chicago Press, 1993), 89.

¹⁶⁰Jhingan M.L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 76.

pada penurunan kualitas hidup dan produktivitas. Dengan demikian tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk yang banyak tanpa kualitas yang memadai maka pertumbuhan tidak akan signifikan. Oleh karena itu, kunci utamanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif yang mengukur tiga aspek utama kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang saling berinteraksi dalam menentukan kualitas hidup suatu populasi.¹⁶¹ Dalam konteks ini, interaksi antara IPM dengan jumlah penduduk yang memiliki latar belakang pendidikan lulusan diploma menjadi menarik untuk dikaji, mengingat tingkat pendidikan tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan peluang kerja yang berdampak pada distribusi pendapatan. Jumlah penduduk dengan pendidikan lulusan diploma menunjukkan tingkat keahlian tertentu yang menjadi aset penting bagi perkembangan ekonomi. Individu dengan kualifikasi ini sering kali memiliki kemampuan teknis dan profesional yang dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor strategis. Oleh karena itu, daerah dengan proporsi lulusan diploma yang tinggi cenderung menunjukkan perkembangan ekonomi yang lebih cepat, yang pada gilirannya dapat tercermin dalam nilai IPM yang lebih tinggi. Namun, interaksi positif antara IPM dan jumlah lulusan diploma tidak serta-merta menghasilkan pemerataan pendapatan. Studi menunjukkan bahwa meskipun peningkatan IPM sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan, terdapat kecenderungan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena akses terhadap peluang ekonomi tidak merata, di mana sebagian lulusan diploma mungkin mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan kelompok lain yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda, sehingga menciptakan disparitas dalam distribusi pendapatan.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat guna mengatasi ketimpangan pendapatan yang muncul. Kebijakan yang dapat

¹⁶¹Jason Hickel, "The Sustainable Development Index: Measuring the Ecological Efficiency of Human development In The Anthropocene," *Elsevier* 167, no. 2 (t.t.): 2.

dipertimbangkan meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua tingkatan, pemberian pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta penerapan program-program pengembangan ekonomi yang inklusif. Selain itu, reformasi di sektor ketenagakerjaan dan sistem perpajakan yang progresif juga dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis ini menekankan bahwa hubungan antara IPM, jumlah penduduk lulusan diploma, dan ketimpangan pendapatan merupakan isu kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada data dan bukti empiris untuk memastikan bahwa investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup secara umum, tetapi juga mengurangi ketimpangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan strategis dan integratif menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

5. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan IPM Sebagai Variabel Moderasi (H5)

Berdasarkan estimasi model *common effect* dengan pengujian moderasi (MRA) pada tabel 4.19 diketahui bahwasanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berinteraksi dan berhubungan signifikan dengan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga variabel IPM adalah variabel moderasi quasi, disimpulkan bahwa tinggi rendahnya IPM berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga H_{05} ditolak sedangkan H_{a5} diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM merupakan faktor moderator pada hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan di Bakorwil Provinsi Jawa Timur.

Indeks Pembangunan Manusia terlihat kenaikan di seluruh kabupaten/kota. Kota Surabaya konsisten memiliki IPM tertinggi menembus angka 84,35 pada tahun 2023. Diikuti oleh Kota Malang dan Kota Madiun yang juga

menunjukkan kenaikan signifikan. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi memiliki IPM yang relatif rendah, meskipun meningkat setiap tahunnya. Kesenjangan nilai IPM antardaerah ini mencerminkan masih adanya perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, diperperlukan upaya peningkatan kualitas layanan public serta pemerataan pembangunan infrastruktur agar IPM di Provinsi Jawa Timur dapat meningkat dan lebih rata. Dapat dilihat tingginya nilai IPM dalam jangka panjang akan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori modal (*human capital*) yang dikemukakan oleh Becker, yang menjelaskan bahwa melalui IPM dalam aspek pendidikan yang ditunjukkan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang meningkat, akan membuat kualitas sumber daya manusia meningkat, sehingga produktivitasnya dalam bekerja akan maksimal. Namun, bila tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah akan kesulitan mencari atau mendapatkan pekerjaan dan tingkat pengangguran akan terus meningkat, akibatnya ketimpangan pendapatan akan semakin dalam.¹⁶² Dengan demikian tidak adanya pengaruh moderasi dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa meningkatkan maupun menurunkan tingkat IPM di Bakorwil Provinsi Jawa Timur tidak dapat memperkuat maupun memperlemah tingkat pengangguran terbuka terhadap penurunan atau peningkatan ketimpangan pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki dan ketimpangan pendapatan. IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Ketika IPM tinggi, potensi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga meningkat, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, IPM yang rendah dapat memperparah ketimpangan,

¹⁶²Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*.

terutama bagi kelompok laki-laki yang mengalami pengangguran terbuka lebih tinggi.

Dalam banyak kasus, tingkat pengangguran terbuka pada laki-laki cenderung lebih dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dan struktur pasar kerja dibandingkan dengan perempuan. Sektor-sektor yang mayoritas mempekerjakan laki-laki, seperti manufaktur dan konstruksi, lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Jika tingkat IPM suatu daerah rendah, tenaga kerja laki-laki yang menganggur memiliki keterampilan yang kurang kompetitif, sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan pasar kerja. Akibatnya, kelompok ini lebih berisiko mengalami stagnasi ekonomi dan meningkatkan kesenjangan pendapatan di masyarakat. IPM sebagai variabel moderasi dapat memperkecil dampak pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan jika pendidikan dan keterampilan tenaga kerja laki-laki meningkat. Dengan akses terhadap pendidikan berkualitas, peluang kerja yang lebih baik dapat terbuka, mengurangi angka pengangguran dan secara langsung menekan ketimpangan pendapatan. Namun, jika IPM tidak berkembang secara merata, hanya kelompok tertentu yang dapat menikmati peningkatan kualitas hidup, sementara yang lain tetap tertinggal, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kebijakan pemerintah harus fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Program pelatihan kerja yang berbasis teknologi dan kewirausahaan dapat menjadi solusi bagi tenaga kerja laki-laki yang terdampak pengangguran, terutama di sektor-sektor yang sedang mengalami disrupsi. Selain itu, investasi dalam sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tenaga kerja laki-laki.

Di sisi lain, kebijakan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, seperti insentif bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja laki-laki dari kelompok rentan, juga perlu diterapkan. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau keringanan pajak bagi perusahaan yang menerapkan sistem pelatihan kerja bagi

pengangguran. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pengangguran terbuka terhadap kesenjangan pendapatan. Secara keseluruhan, IPM sebagai variabel moderasi dapat memperkecil atau memperbesar dampak tingkat pengangguran laki-laki terhadap ketimpangan pendapatan, tergantung pada kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang komprehensif, mulai dari peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga reformasi kebijakan ketenagakerjaan, menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapat Dengan IPM Sebagai Variabel Moderasi (H6)

Berdasarkan estimasi model *common effect* dengan pengujian moderasi (MRA) pada tabel 4.19 diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berinteraksi dan berhubungan antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai prob (F-statistic) $0.000113 < 0.05$, sehingga tinggi rendahnya IPM berpengaruh signifikan pada jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga H_{06} ditolak sedangkan H_{a6} diterima.

IPM menekankan pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup adalah investasi dalam modal manusia yang akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan individu maupun wilayah.¹⁶³ Berdasarkan teori modal (human capital) menunjukkan bahwa kedua variabel yakni jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara bersama-sama dalam membentuk kualitas hidup masyarakat. Untuk meningkatkan IPM melalui human capital perlu adanya kebijakan yang berfokus pada pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan keterampilan dan pendidikan agar dapat mengurangi tingkat pengangguran serta ketimpangan pada masyarakat

¹⁶³Becker, 89.

tidak terjadi, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat baik.¹⁶⁴ Ketika pengangguran tinggi meskipun pendidikan meningkat juga berdampak terhadap IPM mungkin tidak optimal karena ketidakmampuan untuk menyerap tenaga kerja terdidik dalam pasar kerja, sebaliknya jika jumlah penduduk dikelola dengan baik melalui kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesempatan kerja maka dampak positif pada IPM tercapai. Maka dapat dibuatkan sebuah kesimpulan jumlah penduduk yang tinggi apabila diimbangi dengan pendidikan yang memadai serta keterampilan yang baik maka hal tersebut akan mengurangi ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah sebab penyerapan tenaga kerja menjadi baik dan tidak ada orang yang menganggur.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara jumlah penduduk lulusan diploma, tingkat pengangguran terbuka jenis kelamin laki-laki, dan ketimpangan pendapatan. IPM yang tinggi mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik, yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja. Dalam hal ini, lulusan diploma memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak jika mereka berada di daerah dengan IPM rendah, lulusan diploma mungkin tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran laki-laki dan memperparah ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk dengan pendidikan lulusan diploma seharusnya menjadi asset dalam pertumbuhan ekonomi karena mereka memiliki keterampilan menengah yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Namun, jika pertumbuhan jumlah lulusan diploma tidak diimbangi dengan peluang kerja yang cukup, maka tingkat pengangguran, terutama pada laki-laki, dapat meningkat. Di daerah dengan IPM rendah, kesempatan kerja bagi lulusan diploma bisa lebih terbatas, menyebabkan mereka bersaing dengan lulusan pendidikan lebih rendah, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan dalam distribusi pendapatan.

¹⁶⁴ Muara Ati Asri Ariasta dan Ririt Iriani Sri Setiawati, "The Impact of TPT, HDI and Population on the Widening Income Inequality between Regions in East Java," *Jurnal Samudera Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 3 (2024): 702.

Tingkat pengangguran terbuka laki-laki juga memainkan peran penting dalam ketimpangan pendapatan, terutama jika terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dan permintaan pasar kerja. Jika IPM suatu daerah tinggi, maka kualitas pendidikan dan pelatihan kerja lebih baik, sehingga lulusan diploma lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan industri dan mengurangi risiko pengangguran. Namun, di daerah dengan IPM rendah, kurangnya fasilitas pendidikan berkualitas dan akses terhadap pelatihan kerja dapat memperburuk tingkat pengangguran laki-laki dan meningkatkan ketimpangan ekonomi. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan akses terhadap pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Meningkatkan IPM melalui investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan dapat memastikan bahwa lulusan diploma memiliki keterampilan yang relevan dengan industri, sehingga peluang kerja mereka lebih tinggi. Selain itu, kebijakan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran laki-laki serta memperkecil kesenjangan pendapatan.

Secara keseluruhan, IPM sebagai variabel moderasi memiliki peran krusial dalam menentukan apakah peningkatan jumlah lulusan diploma dapat berdampak positif atau justru memperburuk ketimpangan pendapatan. Jika IPM tinggi, maka lulusan diploma memiliki kesempatan kerja yang lebih baik dan tingkat pengangguran laki-laki dapat ditekan, sehingga ketimpangan pendapatan berkurang. Namun, jika IPM rendah, maka lulusan diploma tetap menghadapi risiko pengangguran tinggi, yang dapat memperburuk distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang terintegrasi, mencakup pendidikan, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja, menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

7. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan (H7)

Berdasarkan estimasi model *common effect* dengan pengujian moderasi (MRA) pada tabel 4.19 Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel

moderasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai probabilitas $0.3017 > 0.05$ diketahui bahwasannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi tidak berinteraksi dan tidak berhubungan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga H_{07} diterima sedangkan H_{a7} ditolak.

Hasil data yang diperoleh dari BPS bahwa nilai IPM setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik. Kota Surabaya konsisten memiliki IPM tertinggi menembus angka 83.45 pada tahun 2023. Diikuti dengan Kota Malang dan Kota Madiun juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebaliknya kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai IPM yang relative rendah kedua kabupaten tersebut memiliki nilai IPM rata-rata sebesar 66.50 jadi dapat diberikan kesimpulan bahwa dengan IPM sebagai variabel moderasi dengan kurun waktu hanya 5 tahun tidak dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. sebab nilai IPM akan terlihat dalam jangka panjang.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *human capital*, sebab individu yang memiliki keterampilan dan pendidikan lebih tinggi akan memiliki pendapatan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterampilan rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sering dianggap sebagai faktor yang dapat memoderasi hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan sosial, termasuk ketimpangan pendapatan. Namun, dalam beberapa kasus, IPM tidak selalu mampu berinteraksi secara efektif dengan faktor-faktor seperti jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan atau tingkat pengangguran, sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi ketika peningkatan IPM tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu alasan utama mengapa IPM tidak selalu mampu berinteraksi dengan ketimpangan pendapatan adalah karena indikator IPM hanya mengukur rata-rata pencapaian di bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli tanpa memperhitungkan distribusi kesejahteraan secara detail. Artinya, meskipun suatu daerah memiliki IPM tinggi, pendapatan tetap bisa

terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara kelompok lainnya tetap mengalami kesenjangan ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan IPM tidak selalu berarti pengurangan ketimpangan pendapatan jika tidak diiringi dengan kebijakan distribusi yang adil.

Selain itu, dalam beberapa kondisi, peningkatan IPM lebih didorong oleh perbaikan dalam sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Misalnya, daerah dengan IPM tinggi mungkin memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang baik, tetapi jika pasar tenaga kerja masih terbatas dan tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat berpendidikan, maka kesenjangan pendapatan tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IPM meningkat, tanpa pertumbuhan ekonomi yang merata, dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan tetap minimal. Faktor struktural dalam perekonomian juga dapat menjadi penyebab mengapa IPM tidak berinteraksi dengan ketimpangan pendapatan. Di banyak negara berkembang, peningkatan IPM sering kali didorong oleh kebijakan jangka pendek, seperti subsidi kesehatan atau pendidikan gratis, tetapi tidak disertai dengan kebijakan jangka panjang untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Akibatnya, manfaat dari peningkatan IPM hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara kelompok rentan tetap mengalami kesenjangan ekonomi yang signifikan.

Selain itu, ketimpangan pendapatan sering kali dipengaruhi oleh faktor lain seperti struktur ketenagakerjaan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan kebijakan fiskal. Jika kebijakan ekonomi lebih berpihak pada kelompok dengan pendapatan tinggi atau sektor tertentu, maka meskipun IPM meningkat, kesenjangan pendapatan tetap melebar. Misalnya, pertumbuhan sektor teknologi atau keuangan yang mendorong IPM tinggi di beberapa wilayah belum tentu bermanfaat bagi pekerja sektor informal atau masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, meskipun IPM merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup suatu wilayah, ia tidak selalu mampu berinteraksi dengan variabel lain dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ekonomi lebih dipengaruhi oleh kebijakan redistribusi

pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan struktur ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, peningkatan IPM harus diiringi dengan kebijakan ekonomi yang memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dalam *common effect* model menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023.
2. Berdasarkan analisis dalam *common effect* model menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh, positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023.
3. Berdasarkan analisis dalam *common effect* model menggunakan uji F dapat disimpulkan bahwa secara simultan jumlah penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023.
4. Berdasarkan analisis uji moderasi (MRA) dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berinteraksi dengan jumlah penduduk dan berhubungan signifikan dengan ketimpangan pendapatan, maka variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah variabel moderasi quasi, dimana IPM mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023.
5. Berdasarkan analisis uji moderasi (MRA) dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berinteraksi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka dan berhubungan signifikan dengan ketimpangan pendapatan, maka variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah variabel moderasi quasi, dimana Indeks Pembangunan Manusia mampu memperkuat atau memperlemah hubungan

antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023

6. Berdasarkan analisis uji moderasi (MRA) dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berinteraksi dan berhubungan antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023.
7. Berdasarkan analisis uji moderasi (MRA) dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi tidak berinteraksi dan tidak berhubungan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam proses penelitian, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan agar lebih diperhatikan lagi bagi peneliti-peneliti yang akan datang agar bisa lebih menyempurnakan penelitiannya, karena peneliti sendiri tentu dalam hal memiliki banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya, beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dan peneliti memberikan saran serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengklasifikasikan variabel IPM berdasarkan 3 indikator: pendidikan, kesehatan, serta daya beli. Serta menambah variabel lain tidak hanya jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, karena berdasarkan hasil uji koefisien determinan (R^2) yang mana kemampuan variabel bebas yang terdiri jumlah penduduk menurut pendidikan lulusan diploma, tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki, IPM hanya mampu menjelaskan ketimpangan pendapatan di Bakorwil Provinsi Jawa Timur sebesar 24.23% sedangkan 75.77% dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel lain seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam, investasi, rendahnya mobilitas sosial, alokasi infrastruktur, perubahan teknologi, dan globalisasi.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemangku kebijakan wilayah untuk kedepannya mampu memberikan penguatan kualitas

pendidikan diploma, berupa meningkatkan kurikulum pendidikan diploma agar lebih relevan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan diploma memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Selain itu menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk program magang atau pelatihan langsung yang meningkatkan pengalaman kerja

3. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka akses luas ke lapangan kerja sehingga dapat membangun dan memperkuat pusat karir yang menghubungkan lulusan diploma dengan peluang kerja yang sesuai. Selain itu memberikan intensif kepada perusahaan yang merekrut lulusan diploma bisa berupa pengurangan pajak dan subsidi pelatihan.
4. Bagi pemerintah mengembangkan keterampilan tambahan seperti halnya: menyelenggarakan program pelatihan ketrampilan tambahan (*upskilling*), dan keterampilan baru secara berkala bagi lulusan diploma agar lebih kompetitif dalam pasar kerja. Selain itu focus pada keterampilan digital dan teknologi yang semakin dibutuhkan dalam berbagai sektor ekonomi.
5. Bagi pemerintah memberikan pemberdayaan kewirausahaan seperti mendorong lulusan diploma untuk menjadi wirausaha dengan memberikan akses pemodalan, pelatihan bisnis, dan pendampingan usaha. Selain itu membuka peluang pendanaan dan kemudian perizinan bagi startup yang didirikan lulusan diploma.
6. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya 5 tahun saja, yaitu dari tahun 2019-2023 dan Pembahasan variabel yang mungkin belum dapat menggambarkan indikator-indikator dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Saran untuk penulis selanjutnya, untuk menambahkan jumlah variabel yang diteliti agar dapat lebih luas menggambarkan variabel-variabel yang dapat menggambarkan terkait ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan terkait dengan bagaimana usaha untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Qurais, Salman Alfarsi. "Analisis Pengaruh Human Capital Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2017–2021." *Journal of Development Economic and Social Studies* 2, no. 2 (2023).
- Abebrese, Ofori, Baah Boateng, dan Adjie. "Unemployment and Income Inequality in Sub-Saharan Africa: Does education matter?" *International Journal of Social Economics* 44, no. 11 (2017): 1422–38. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2016-0161>.
- aghni nuzul Firdausy, K., Hanim, A., & Komariyah, S. "Analisis Pengaruh pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekuilibrium, 7(1), 25-31." 7, no. 1 (2023).
- Aginta, Harry, Anang Budi Gunawan, dan Carlos Mendez. "Regional income disparities and convergence clubs in Indonesia: new district-level evidence." *Journal of the Asia Pacific Economy* 28, no. 1 (2023): 6. <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1868107>.
- Ahmaddien, Iskandar, dan Bambang Susanto. *Evies 9 Analisis Regresi Data Panel*. Gorontalo : Ideas Publishing, 2020.
- Altindag, Duha Tore. "The Effect of Education on Unemployment Duration." *University of South Mississippi-Departemen of Political Science and International Development*, 2019.
- Amdan, Laode, dan Muhammad Rafi'i Sanjani. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 5 (2022).
- Andiny, Puti, Nursani Adelida, dan Rahma Meutia. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur Dan Kota Langsa)." *Jurnal Samudera Ekonomika* 3, no. 1 (2019).
- Antonio, dan LaPorchia A.Collins. "Differential Effect of decentralization on income inequality: evidence from developed and developing countries." *Springer Link* 60, no. 4 (2019).

- Arif, Muhammad. "Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya." *URECOL*, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arkum, Darol, dan Hattami Amar. "The Influence of Economic Growth, Human Development, Poverty and Unemployment on Income Distribution Inequality Study in the Province of the Bangka Belitung Islands." *Jurnal Bina Praja* 14, no. 3 (2022).
- Arkum, Darul, dan Hattami Amar. "The Influence of Economic Growth, Human Development, Poverty and Unemployment on Income Distribution Inequality Study in the Province of the Bangka Belitung Islands." *Jurnal Bina Praja* 14, no. 3 (2022).
- Arrahman, Muhammad Iqbal, Marliyah, dan Budi Dharma. "The Effect of Economic Growth and Interregional Income Disparity on Community Welfare in North Sumatra Province." *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 14, no. 1 (2024).
- Askari, Hossein, dan Abbas Mirakhor. *Conceptions of Justice from Islam to the Present*. Switzerland: Springer Nature, 2020.
- Asri Ariasta, Muara Ati, dan Ririt Iriani Sri Setiawati. "The Impact of TPT, HDI and Population on the Widening Income Inequality between Regions in East Java." *Jurnal Samudera Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 3 (t.t.).
- Astuti, Erni Dwi, dan Riko Setya Wijaya. "Pengaruh Indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang." *Jambura: Economic Education Journal* 6, no. 2 (2024).
- Badriah, Nurul, Setyo Tri Wahyudi, Kartika Sari, dan dkk. *Metodologi Penelitian untuk Bidang Ekonomi dan Bisnis*. Malang: UB Press, 2022.
- "Bakorwil Bojonegoro," t.t. <https://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id/wilayah-kerja-bakorwil-di-provinsi-jawa-timur>.
- Bank, World. *World Development Report 2006: Equity and Development*. Washington, DC: World Bank, 2006.

- Becker. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
- Bhagaskara, Andhika. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur Pada Tahun 2011-2019." *JDESS: Journal of Development Economic and Social Studies* 2, no. 4 (2023).
- Bogusz, Honorata, dan Anna Matysiak. "Structural Labour Market Change, Cognitive Work, and Entry to parenthood in Germany." *A Journal of Demography*, 2024.
- Bunyamin, Firman. "The Impact of Physical Capital and Human Capital on Growth in Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 30, no. 1 (2022).
- Butler, Jaclyn, Grace A. Wildermuth, Brian C. Thiede, dan David L. Brown. "Population Change and Income Inequality in Rural America." *SpringerOpen* 39 (2020).
- Chatra, Afdhal, Dyah Ayu Suryaningrum, Yuliana, dan dkk. *Pengantar Ekonomi Pembangunan (Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi, 2023.
- Dahrif, Hariman. *Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua Studi Kasus Masyarakat Byak*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Deaton, Angus S., dan Christina H. Paxson. "The Effects of Economic and Population Growth on National Saving and Inequality." *JSTOR* 34, no. 1 (1997).
- Dedy Harianto Hutasoit, Enzelina Sitanggang, Wira Hadi Sugara, dan Putri Sari Margaret Julianty Silaban. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2022." *Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024).
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.
- Dickman, Michael, dan Emma Parry. "Building Sustainable Societies Through Human-Centered Human Resource Managemen: Emerging Issues and

- Research Opportunites.” *The International Journal of Human Resource Management* 33, no. 1 (2022).
- Farhan, Muhammad, dan Sugianto. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa.” *Jurnl Ilmiah Bidang Soial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 3 (t.t.): 246.
- Febriyani, Annisa, dan Ali Anis. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 3, no. 4 (2021).
- Firdaus, Agam, dan Maulidyah Indira Hasmarini. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022.” *Primanomics: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 21, no. 3 (2023).
- Florez, Luz Adriana. “The Impact of Skill Mismatch on Unemployment, Informality, and Labou Turnover.” *Cambridge University Press*, 2024.
- Frisnoiry, Suci, Dwi Ayu Febrianti, Engeli Emmanuela Br Tambunan, dan Gita Helena Tarigan. “Problems of Income Disparity Based on the Gini Ratio in the Indonesian Economy.” *Fintech: Indonesian Journal of Banking And Financial Technology* 2, no. 2 (2024).
- Gbohoui, William, Waikei R. Lam, dan Victor Duarte Liedo. “The Great Divide: Regional Inequality and Fiscal Policy.” *IMF e-Library* 2, no. 1 (2019): 45.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*,. Semarang: Univ. Diponegoro Press, 2016.
- Hadju, Ingli Intan, dan Vecky A.J Masinambow. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara” 21, no. 1 (2021): 113.
- Hickel, Jason. “The sustainable development index: Measuring the ecological efficiency of human development in the anthropocene.” *Elsevier* 167 (2020).
- Hutabarat, Willy, Taufiq C Dawood, dan Sofyan Syahnur. “How Population, Economic, Inequality and Unemployment Contribute Affect Indonesian

- Poverty.” *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (2023).
- Hutabarat, Willy, Sofyan Syahnur, dan Taufiq C Dawood. “How Population, Economic, Inequality and Unemployment Contribute Affect Indonesian Poverty.” *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (2023).
- Hwang, Seokchae, Chung Choe, dan Koangsung Choi. “Population ageing and income inequality.” *The Journal of The Economics Of Ageing* 20 (2021).
- Idris, Amiruddin. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Ikram, Zul, Sirajuddin, dan Idris Parakkasi. “Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode 1960-1980.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2024).
- Indra Putra, Rivanda Fadhila. “Poverty-Growth-Inequality Triangle (Pgi Triangle): Financial Development, Human Development, And Inequality In Asia.” *JEP: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 28, no. 2 (2020).
- Johnston, Melissa P. “Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come” 3, no. 3 (2014).
- Juanda, Bambang, dan dan Junaidi. *Ekonomika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor : IPB Press, 2012.
- Julihanza, Agra, dan Rifki Khoirudin. “Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera.” *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 2 (2023).
- Kay, Vera Paulin. “Kesenjangan Pendapatan Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Periode 2005-2010.” *Jurnal Administrasi Terapan* 1, no. 1.
- Khoirudin, Rifki, dan Jannatul Liutamimma Musta’in. “Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Tirtayasa Ekonomika* 15, no. 1 (2020).
- Kusumaningtyas, Eviatiwi, dan Sugiyanto. *Konsep Dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews*. Lamongan: Academia Publication, 2022.

- Lie, Darwin, Lora Ekana Nainggolan, Nana Triapnita Nainggolan, dan dkk. *Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022.
- Mangundap, Vinsensius, Anderson G. Kumenaung, dan Hanly F. Dj. Siwu. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 2 (2024).
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics Edisi ke-8*. Boston: Cengage Learning, 2018.
- Mariano, Enzo Barberio, dan Diogo Ferraz. "The Human Development Index with Multiple Data Envelopment Analysis Approaches: A Comparative Evaluation Using Social Network Analysis." *Social Indicators Research* 157 (2021).
- Matondang, Zulaika. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru." *Ihtiyath* 2, no. 2 (2018).
- Megantoro, Ardi, Syafiq Mahmadah Hanafi, dan Anas Habibi Ritonga. "The Influence Of Population, Open Unemployment Rates and IPM On Income Inequality In Lampung Province." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 11, no. 2 (2023).
- M.L, Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mouren, Viky, dan dkk. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Toraja Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22, no. 5 (2022).
- Muhammad, Aqil, Salsabila Hana, dan Raehanun Aisyah Fitri. "Kesenjangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Menggali Keterkaitan dan Solusi Kebijakan." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 4, no. 1 (2024).

- Muljana, Slamet. *Kesadaran Nasional Jilid II: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan* (. Yogyakarta:Lkis, 2008.
- Mulyadi, S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nadya, Aufa. "Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia." *Media Ekonomi* 27, no. 1 (2019).
- Nalle, Frederic Winston, Yuliati Sengkoen, Rikhardus Bria Seran, dan Winda Aulia Rahmarini. "Regional development disparity and mapping of economic potential in East Nusa Tenggara province." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023).
- Nikolov, Plamen, Leila Salarpour, dan David Titus. "Skill Downgrading Among Refugees and Economic Immigrant in Germany." *Cornell University* 2 (2021).
- Ningtiyas, Niken, dan Inayati Nuraini Dwiputri. "Analisis disparitas pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019: analisis regresi data panel." *JEBP* 1, no. 7 (2021).
- Noor, Juliansyah. *Analisis Data Penelitian Ekonomi Dan Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Nurdiman. *Ekonomi Kependudukan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nurdini, Yusrizal, dan Aqwa Naser Daulay. "The Influence of Open Unemployment Rates, Inflation and Minimum Wages on Income Inequality in The North Sumatra Region." *Jurnal Manajemen Bisnis* 11, no. 2 (2024).
- Nurmandi, Achmad. *Manajemen Perkotaan*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2022.
- Oksamulya, Aufa, dan Ali Anis. "Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia." *JKEP* 2, no. 2 (2020).
- Pangiuk, Ambok. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013." *Iltizam: Journal of Sharia Economics Research* 2, no. 2 (2019).

- Patil, Manali Rohan. "The Impact Of Technology On Work And Employment." *ResearchGate* 16, no. 11 (2020).
- Permana, Meiki. *Degradasi Lingkungan: Pendekatan Kajian Pembangunan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021.
- Pratama, Yonanda Yudha, dan Crisanty Sutristyaningtyas Titik. "Pengaruh Teknologi Finansial dan Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara ASEAN-6." *E-Journal Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 1 (2024).
- Priyanto, Duwi. *Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.
- Psacharopoulos, dan Patrinos. "Returns to Investment in education: a decennial review of the global literature." *Education Economics* 26, no. 5 (2018): 445–58. <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. 3 ed. Ponorogo: CV Wade Group, 2017.
- Raharja, Mahardhika Cipta, dan Unik Lestari. "Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja." *Oeconomicus Journal of Economics* 6, no. 2 (2022).
- Rahayu, Nita Sri, dan Barika. "The Influence Of Economic Factors On HDI In Lampung Province In 2018-2021." *Ekombis Review: Jurnal Ekonomi Dan Bsinis* 12, no. 1 (2024).
- Ratnasari, Gita Triya. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Karesidenan Besuk." *Jurnal Ekuilibrium* 3, no. 2 (2020).
- Ridwan, Muannif, Suhar, dan Bahrul Ulum. "The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021):.
- Rinaldo Fernandes, Adji Achmad, dan Solimun. *Metode Analisis Data Penelitian: Pendekatan Regresi*. Malang: UB Press, 2022.
- S, Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

- Sembiring, Chrisnatallya, dan Vecky A.J Masinambow. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Berkala Ilmiah* 23, no. 2 (2023).
- Sembiring, Handika Y, Elidawaty Purba, dan Dian G Purba. "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Samosir." *Jurnal Ekuilnome* 6, no. 1 (t.t.): 106–7.
- Setiawan, dan Kusri. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sianipar, Sela Paula, dan dkk. "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah* 22, no. 1 (2022).
- Simatupang, Leo Fernando. *Ekonomi Makro*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023.
- Sjafrizal. "Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi," 288–89. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soetrisno, Soetrisno. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Sopal, Romi, Amiruddin, dan Abdul Rahman. "Studi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur." *Icor: Journal of Regional Economics* 2, no. 2 (2021).
- "Statistik Balai KSDA Jawa Timur I." 2008.
- Suaidah, Isnaini Harahap, Muhammad Rajab Ardiansyah, dan Faisal Hamdani. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7, no. 1 (2023): 2. <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v7i1.7505>.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendra, Indra. "Human Capital, Income Inequality and Economic Variables: A Panel Data Estimation from a Region in Indonesia." *Journal of Asian Finance Economics and Business* 7, no. 10.

- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suparman. "Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach." *Taylor & Francis* 11, no. 2 (2023).
- Suryani, Krisna Gita, dan Nenik Woyanti. "The Effect Of Economic Growth, Hdi, District/City Minimum Wage And Unemployment On Inequality Of Income Distribution In Province Of D.I Yogyakarta (2010-2018)." *Jurnal Discovery* 36, no. 2 (2021).
- Susiatun, Eka. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016." *Jurnal Untirta* 1, no. 1 (2018).
- Syafruddin, Periansya, Elis Anita Farida, dan dkk. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Batam: Rey Medika Grafika, 2022.
- Syahri, Dinda, dan Yesy Gustiara. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019." *Journal Of Trends Economics And Accounting Research* \ 1, no. 1 (2020).
- Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Telleria, Juan. "Defining and Measuring Human Development: A Genealogical Analysis of the UNDP's Human Development Reports." *Springer Link* 35 (2023).
- Tresna Lestari, Dhoya Safira, dan Muhammad Hamdan Ainulyaqin. "Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022).
- Utina, Moh Renaldy, Yetty, dan Muhammad Zais M Samiun. "Pengaruh Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap

- Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Maluku Utara.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14, no. 1 (2023).
- Vollset, Stein Emil. “Fertility, Morality, Migration, and Population Scenarios for 195 Countries and Territories from 2017 to 2100: a Forecasting Analysis for The Global Burden of Disease Study.” *National Library of Medicine*, 2020, 10.
- Widayati, Tri, M. Afdhal Chatra, Achmad Daengs, Nugroho, dan dkk. *Perekonomian Indonesia: Perkembangan Ekonomi & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Wijaya, Rizki Aprilian, Riesti Triyanti, Achmad Zamroni, dan dkk. “Ketimpangan Pendapatan Dan Pengeluaran Nelayan Di Kabupaten Pulau Morotai.” *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 7, no. 2 (2021).
- Wirian, I Gede, dan Ketut Sudibia. “The Effect of Investment, Economic Growth and Education Level on Employment Opportunities and Poverty by Province in Indonesia.” *JEKT: Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 16, no. 2 (2022).
- Wulandari, Devita Fatma, dan Farida Rahmawati. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Indonesia.” *Ekuitas* 3, no. 3 (2022).
- Yamin, Sofyan. *Olah Data Statistik: Smartpls 3-4 Amos dan Stata (Mudah dan Praktis)*. III. Depok: PT Dewangga Energi Nasional, 2023.
- Yasni, dan Yulianto. “Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.” *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 4, no. 1 (2020).
- Zizek, Simona Sarota, Mulej Matjaz, dan Nomi Hrads. “Human Development Index.” *Springer Link*, 2023.
- Zusen, Alma Ikhtiar, dan Eni Setyowati. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Eks Karasidenan Pati Periode 2017-

2020.” *Pareto: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (Juni 2022):.



